



Katalog: 2101038



 Sensus
Penduduk
2020
#Mencatat Indonesia

Analisis Profil Penduduk Indonesia

Mendesripsikan Peran Penduduk
dalam Pembangunan



BADAN PUSAT STATISTIK



Sensus
Penduduk
2020

#Mencatat Indonesia

Analisis Profil Penduduk Indonesia

Mendesripsikan Peran Penduduk
dalam Pembangunan



BADAN PUSAT STATISTIK



<https://www.bps.go.id>

Analisis Profil Penduduk Indonesia

Mendesripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan

ISBN: 978-602-438-432-6

No. Publikasi: 07300.2205

Katalog: 2101038

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 112 halaman

Naskah: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Desain Kover: Direktorat Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh: ©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi: www.shutterstock.com, www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Pengarah:

Moh Edy Mahmud, S.Si., M.P.

Penanggung Jawab:

Dr. Muchammad Romzi

Penyunting:

Wisnu Winardi, S.ST., M.E.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Ema Tusianti, S.ST., S.AB., M.T., M.Sc., I Gusti Ngurah Agung Rama
Gunawan, S.ST., M.T., Dede Yoga Paramartha, S.Tr.Stat., Syukriyah
Delyana, S.ST., Dyah Retno Prihatinningsih, B.St., Adi Nugroho, S.ST.

Pemeriksa Aksara:

Syukriyah Delyana, S.ST., Fenny Afifatul Awwaliyah, S.Tr.Stat., Dewi
Widyawati, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Zulhan Rudyansyah, S.E., M.E., Dimas Hari Santoso, S.Si., M.Ec., M.E.,
Dede Yoga Paramartha, S.Tr.Stat., Dewi Widyawati, S.Tr.Stat.

Kata Pengantar

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan.

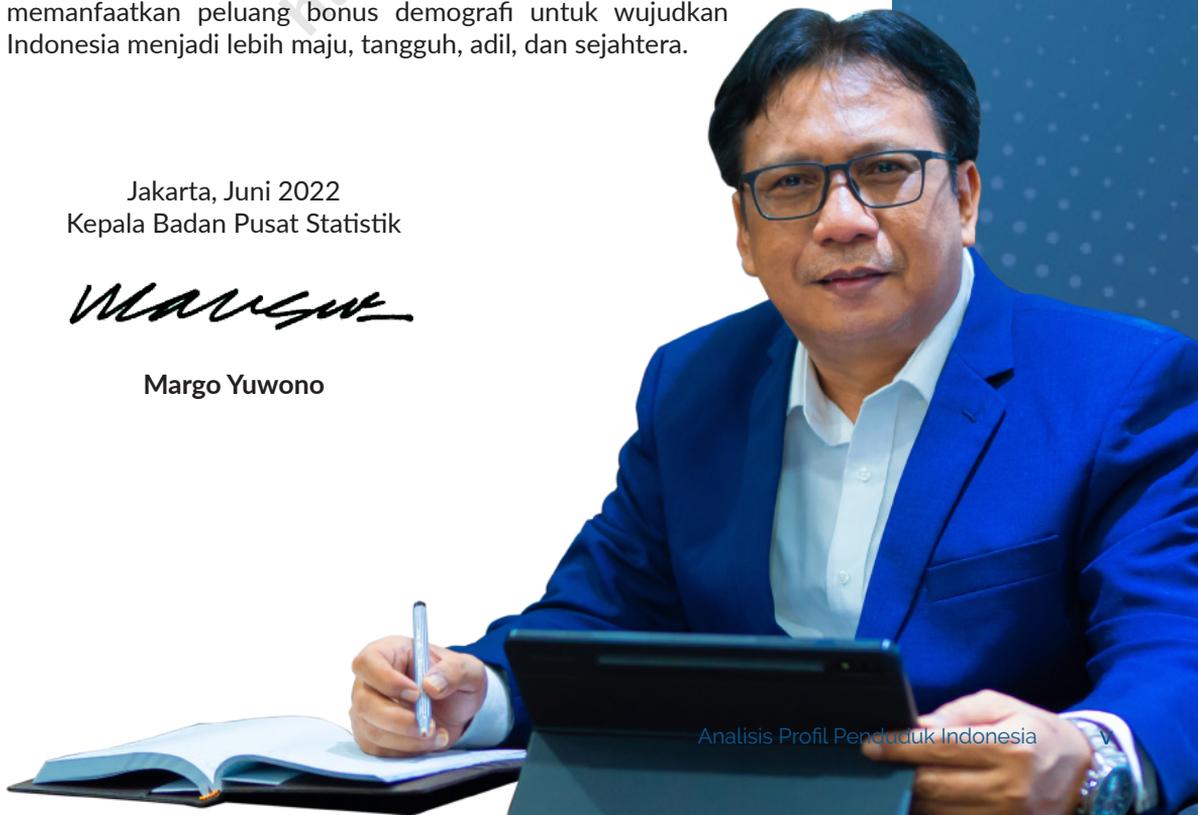
Publikasi **Analisis Profil Penduduk Indonesia, Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan** merupakan analisis hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan sumber data terkait lainnya yang menyajikan informasi tentang dinamika penduduk dan profil penduduk usia produktif, anak-anak, dan lanjut usia. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna, baik sebagai dasar penyusunan kebijakan, sumber informasi, atau referensi kajian lanjutan yang lebih mendalam.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan publikasi ini. Semoga Allah SWT, Tuhan YME, memudahkan langkah kita dalam memanfaatkan peluang bonus demografi untuk wujudkan Indonesia menjadi lebih maju, tangguh, adil, dan sejahtera.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Badan Pusat Statistik



Margo Yuwono



Daftar Isi

	Halaman
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
1. Dinamika Penduduk di Indonesia	3
A. Jumlah Penduduk Indonesia Peringkat Keempat Dunia	3
B. Sebaran Penduduk dan Pembangunan Antarwilayah	7
C. Perubahan Struktur Penduduk Indonesia	12
D. Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi	15
E. Implikasi Perubahan Struktur Umur Penduduk pada Masa yang Akan Datang	16
F. Kesimpulan	18
G. Referensi	19
2. Anak Investasi Masa Depan Bangsa.....	25
A. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pondasi Daya Saing Bangsa.....	25
B. Struktur Penduduk dan Persebaran Anak Indonesia.....	28
C. Membangun Generasi Berpengetahuan	31
D. Menyiapkan Generasi Berumur Panjang dan Hidup Sehat.....	34
E. Pekerja Anak dan Ekonomi Keluarga	38
F. Perkawinan Anak	41
G. Kesimpulan	44
H. Referensi	45
3. Penduduk Usia Produktif sebagai Aktor Utama Pembangunan Nasional	55
A. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif di Indonesia.....	55
B. Sebaran Penduduk Usia Produktif di Indonesia	58
C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Indonesia	59
D. Penduduk Usia Produktif dalam Pasar Tenaga Kerja.....	62
E. Penduduk Usia Produktif menurut Generasi	65
F. Kesimpulan	74
G. Referensi	75
4. Penduduk Lanjut Usia di Indonesia	81
A. Lansia Indonesia dalam Perbandingan Internasional	81
B. Sebaran Lansia di Indonesia.....	85
C. Lansia Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif (SMART) dan Tantangan yang Dihadapi	89
D. Lansia dalam Perlindungan Keluarga dan Negara.....	93
E. Menyongsong Era Pasca-Bonus Demografi.....	103
F. Kesimpulan	107
G. Referensi	108



Dinamika Penduduk di Indonesia

- A. Jumlah Penduduk Indonesia Peringkat Keempat Dunia
- B. Sebaran Penduduk dan Pembangunan Antarwilayah
- C. Perubahan Struktur Penduduk di Indonesia
- D. Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi
- E. Implikasi Perubahan Struktur Umur Penduduk pada Masa yang Akan Datang
- F. Kesimpulan
- G. Referensi



Hasil Sensus
Penduduk Indonesia
tahun 2020
menunjukkan bahwa
jumlah penduduk
Indonesia mencapai
270 juta jiwa.

Dinamika Penduduk di Indonesia

A. Jumlah Penduduk Indonesia Peringkat Keempat Dunia

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa. Angka tersebut hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan hasil sensus tahun 1961. Selama tahun 1961-2020, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi antara tahun 1971-1980. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun pada periode tersebut sekitar 2,4 persen. Pada tahun 1980-1990 pertumbuhan penduduk turun menjadi 2 persen, kemudian secara bertahap kembali turun menjadi di bawah 2 persen pada periode setelahnya, hingga pada periode 2010-2020 pertumbuhan penduduk per tahun menjadi 1,25 persen (BPS, 2021a). Perlambatan pertumbuhan penduduk ini tidak terlepas dari penurunan tingkat kelahiran sebagai hasil dari program keluarga berencana yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an (Adioetomo dan Mujahid, 2014). Pada awal tahun 1970, setiap perempuan Indonesia rata-rata memiliki anak sebanyak 5-6 orang, sementara pada tahun 2020 setiap perempuan Indonesia rata-rata memiliki 2 orang anak (BPS et. al., 2018).

Jika pola pertumbuhan penduduk terus berlanjut mengikuti perkembangan tahun-tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk pada tahun 2030 diperkirakan



Sumber: tahun 1961-2010 dikutip dari BPS (2020), tahun 2020 hasil SP2020, tahun 2030 & 2040 dikutip dari BPS, Bappenas, UNFPA (2018)

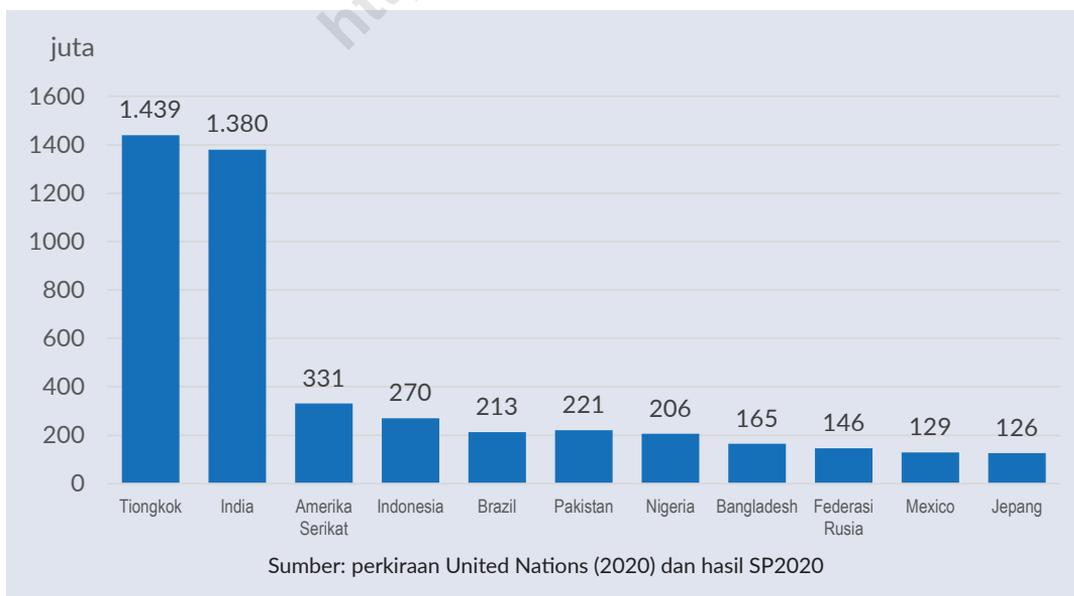
Gambar 1. Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa), 1961-2040

akan mencapai 294,11 juta jiwa (bertambah sekitar 23,91 juta dibandingkan tahun 2020), dan pada tahun 2040 diperkirakan akan mencapai 312,51 juta jiwa (bertambah sekitar 18,40 juta dibandingkan tahun 2030). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan penambahan penduduk dari tahun 2010 ke tahun 2020 yang sebesar 32,56 juta jiwa (Gambar 1).

Dalam lingkup global, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 adalah yang tertinggi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat (Gambar 2). Persentase jumlah penduduk Tiongkok, India, dan Amerika Serikat terhadap total penduduk dunia masing-masing mencapai 18,46 persen, 17,70 persen, dan 4,25 persen, sedangkan Indonesia mencapai 3,47 persen.

Meski jumlah penduduk Indonesia terbilang tinggi, akan tetapi kepadatannya Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 141 penduduk per km² (Tabel 1). Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki daratan yang luas. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2018, terdapat 16.056 pulau yang terbentang dari Pulau Sumatera hingga Papua. Luas keseluruhan daratan Indonesia yang mencakup pulau-pulau tersebut mencapai hampir 2 juta km². Namun demikian, tidak semua pulau dihuni penduduk, sehingga kepadatan penduduk di masing-masing pulau sangat bervariasi.

Kepadatan penduduk Indonesia (141 penduduk per km²) tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Bangladesh (1.266 penduduk per km²), Nigeria (226 penduduk per km²), dan Pakistan (286 penduduk per km²) yang jumlah penduduknya lebih rendah (Tabel 1). Apabila dibandingkan dengan wilayah di Indonesia, kepadatan penduduk Bangladesh setara dengan kepadatan penduduk di Banten (1.232 penduduk per km²), sementara kepadatan penduduk Nigeria hampir setara dengan Kepulauan Riau (252 penduduk per km²), sedangkan kepadatan penduduk Pakistan setara dengan Nusa Tenggara Barat (286 penduduk per km²).



Gambar 2. Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia (Juta Jiwa), 2020

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Indikator Pembangunan di Beberapa Negara, 2020

Negara	Jumlah Penduduk (Juta) ¹	Kepadatan Penduduk (Penduduk/km ²) ¹	Sex Ratio (Laki-laki per 100 Perempuan) ¹	Rasio Ketergantungan ¹	Tingkat Pengangguran (%) ²	PDB Per Kapita (US\$) ³	Peringkat HDI 2019 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tiongkok	1.439,3	153,3	105,3	42,2	5,0	10.500,4	85
India	1.380,0	464,1	108,2	48,7	7,1	1.900,7	131
Amerika Serikat	331,0	36,2	97,9	53,9	8,3	64.543,6	17
Indonesia	270,3 ⁵	141,3 ⁵	102,4 ⁵	44,4 ⁵	7,1	3.869,6	107
Brazil	212,6	25,4	96,6	43,5	13,7	6.796,8	84
Pakistan	220,9	286,5	106,0	64,4	4,7	1.193,7	154
Nigeria	206,1	226,3	102,8	86,0	9,0	2.097,1	161
Bangladesh	164,7	1.265,5	102,2	47,0	5,3	1.968,8	133
Federasi Rusia	145,9	8,9	86,4	51,2	5,7	10.126,7	52
Meksiko	128,9	66,3	95,8	50,3	4,7	8.346,7	74
Jepang	126,5	346,9	95,4	69,0	3,0	40.146,0	19

Sumber: ¹) United Nations (2020); ²) World Bank (2020a); ³) World Bank (2020b); ⁴) UNDP (2020); ⁵) BPS (2021a)

Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memunculkan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya karena memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Di antara sepuluh negara dengan jumlah penduduk terbesar, kepadatan penduduk tertinggi dialami oleh Bangladesh (1.265,5 orang/km²). Negara lain yang juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi adalah Singapura dan Hongkong. Kepadatan penduduk di kedua negara tersebut masing-masing 8,4 ribu dan 7,1 ribu penduduk per km² (BPS, 2021a). Kondisi tersebut menempatkan Singapura dan Hongkong sebagai negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di Asia.

Peningkatan kepadatan penduduk terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, sementara luas daratan bersifat tetap. Jumlah penduduk yang banyak di satu sisi menjadi modal pembangunan, tapi di sisi yang lain akan menjadi beban apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik.

Kualitas penduduk berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik fisik maupun nonfisik (kecerdasan, mental, dan spiritual). Kualitas penduduk sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan, sebab pembangunan akan optimal jika pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan produktivitas (Barthos, 1990).

Data empiris menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan output perekonomian yang rendah. Hal tersebut seperti terlihat pada Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria. Keempat negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi, dan capaian pembangunan manusia yang rendah.

Berdasarkan laporan UNDP 2020, *Human Development Index*-HDI 2019 India dan Bangladesh tergolong sedang dengan capaian 64,5 (peringkat ke-131) dan 63,2 (peringkat ke-133), sedangkan HDI Pakistan dan Nigeria masih tergolong rendah, baru mencapai 55,7 (peringkat ke-154) dan 53,9 (peringkat ke-161). Negara tersebut semuanya memiliki PDB per kapita yang rendah (Tabel 1) dan bahkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Data terkini menunjukkan bahwa kemiskinan di India, Bangladesh, dan Pakistan mencapai lebih dari 20 persen, bahkan angka kemiskinan Nigeria mencapai 40 persen di tahun 2018 (World Bank, 2021a).

Posisi Indonesia dalam pencapaian HDI berada pada urutan ke-107. Peringkat HDI Indonesia dibandingkan 10 negara berpenduduk banyak lainnya masih lebih baik dibandingkan dengan India, Bangladesh, Pakistan, dan Nigeria. Indonesia juga memiliki PDB per kapita lebih tinggi dari negara-negara tersebut.

Sementara Jepang dan Amerika Serikat adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, memiliki capaian HDI yang tinggi (ranking HDI Jepang dan Amerika Serikat termasuk 20 besar) dan PDB per kapita yang sangat tinggi, yaitu mencapai lebih dari 40 ribu US\$ pada tahun 2020.

Hubungan antara kualitas penduduk dan PDB per kapita bersifat timbal balik dan dinamis. Kualitas penduduk yang tinggi memiliki produktivitas yang juga tinggi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Di sisi lain, penciptaan nilai tambah yang tinggi memungkinkan negara mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan, sehingga dengan kemampuan pembiayaan tersebut memungkinkan akselerasi pembangunan manusia.

Salah satu indikator penduduk yang perlu mendapat perhatian adalah komposisi penduduk, sebab indikator ini memiliki implikasi yang luas dalam pembangunan, seperti pasar tenaga kerja, pelayanan kesehatan, penyediaan jaminan pensiun, dan pelayanan pendidikan. Komposisi penduduk yang terlalu didominasi oleh penduduk usia tua atau terlalu muda dapat berimplikasi pada tingginya beban pengeluaran negara. Sebagai contoh, apabila komposisi penduduk lebih banyak pada kelompok usia anak, maka anggaran negara akan lebih banyak dialokasikan pada pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, apabila komposisi penduduk lebih banyak yang berusia tua, maka anggaran akan lebih banyak dialokasikan untuk biaya kesehatan dan jaminan pensiun.

Keseimbangan komposisi penduduk dapat dilihat dari indikator rasio beban ketergantungan yang menggambarkan seberapa banyak penduduk usia nonproduktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Menurut Samosir (2020), rasio beban ketergantungan memengaruhi kondisi ekonomi dan kualitas manusia suatu bangsa. Keterkaitan antara rasio beban ketergantungan dengan berbagai indikator pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia telah dikaji dalam beberapa penelitian. Ongar & Salvini (2016) menunjukkan bahwa di



Hasil SP2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia produktif dan lanjut usia Indonesia meningkat dibandingkan tahun 2010, sedangkan persentase penduduk usia anak turun.

Sub Sahara Afrika, rasio ketergantungan memiliki korelasi negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Minh (2012) menunjukkan bahwa rasio ketergantungan usia muda dan lansia berkorelasi kuat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di 43 negara berkembang. Kogel (2005) menunjukkan rasio ketergantungan usia muda mengurangi pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan produktivitas total. Sementara itu, hasil kajian BPS (2021b) berdasarkan data 34 provinsi mengemukakan bahwa jika rasio beban ketergantungan meningkat satu satuan, maka akan menurunkan IPM sebesar 0,6131.

Selain komposisi penduduk yang digambarkan dengan rasio ketergantungan, terdapat beberapa faktor demografi yang juga berimplikasi luas dalam pembangunan. Faktor tersebut di antaranya adalah jumlah dan kualitas penduduk, sebaran penduduk menurut wilayah, dan akses penduduk untuk peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lainnya.

B. Sebaran Penduduk dan Pembangunan Antarwilayah

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan diiringi dengan peningkatan aktivitas pembangunan yang pesat menyebabkan peningkatan permintaan berbagai kebutuhan seperti perumahan, infrastruktur, lahan, dan kebutuhan lain. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Data empiris menunjukkan bahwa populasi penduduk yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan upaya yang tepat dan mencukupi dalam menjaga lingkungan telah berkontribusi terjadinya kerusakan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga memengaruhi ketersediaan dan kualitas lahan. Hal inilah yang kemudian menjadikan daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi menghadapi permasalahan berkembangnya pemukiman kumuh, peningkatan jumlah sampah, serta pencemaran air, udara, tanah.

Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di perkotaan sebagai dampak dari arus urbanisasi. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 40,39 persen rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak di Indonesia, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal (Pemerintah RI, 2020).

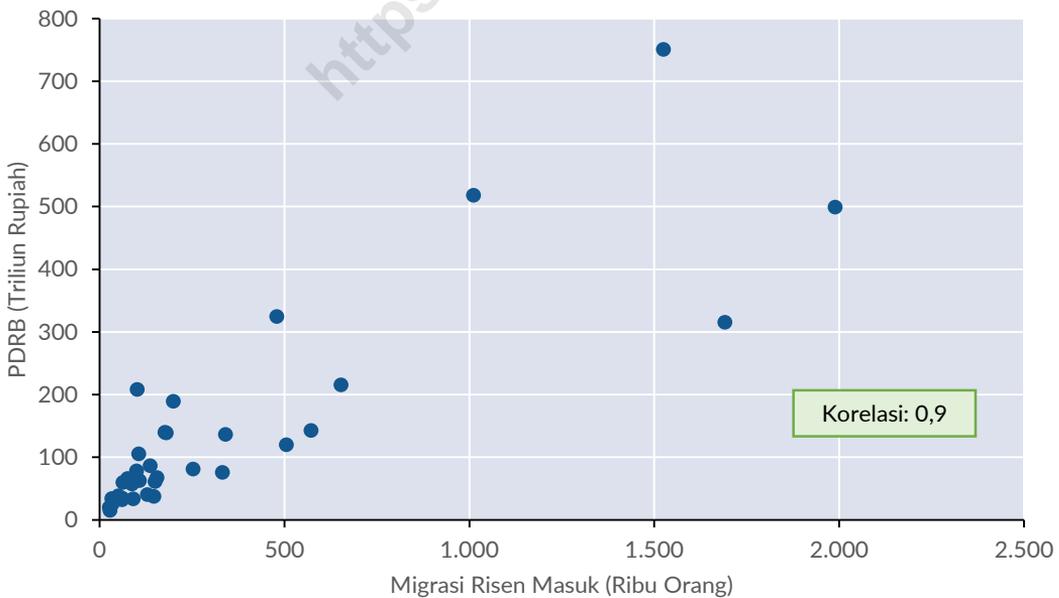
Data lain menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi memiliki kualitas udara dan air yang rendah. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Ketiga provinsi tersebut memiliki indeks kualitas udara dan air yang rendah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020 nilai indeks kualitas udara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masing-masing bernilai 66,69 poin, 78,46 poin, dan 72,83 poin, sedangkan secara rata-rata indeks kualitas udara di Indonesia mencapai 87,21 poin. Demikian halnya dengan indeks kualitas air, ketiga provinsi memiliki nilai indeks di bawah rata-rata. Masing-masing provinsi memiliki indeks kualitas air sebesar 41,50 poin (DKI Jakarta), 42,73 poin (Jawa Barat), dan 50,56 poin (Banten), sedangkan secara rata-rata indeks kualitas air di Indonesia mencapai 53,53 poin (BPS, 2021c).

Daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi memiliki tantangan pembangunan yang lebih kompleks. Penyediaan sarana kebutuhan masyarakat untuk berbagai

keperluan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lain menjadi lebih banyak, sementara ruang yang tersedia terbatas. Kepadatan penduduk yang tinggi juga memerlukan kegiatan ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja yang mencukupi. Jika kegiatan ekonomi yang tercipta kurang memiliki daya serap tenaga kerja, dapat menimbulkan masalah pengangguran dan bila tidak tertangani akan memunculkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerenggangan sosial.

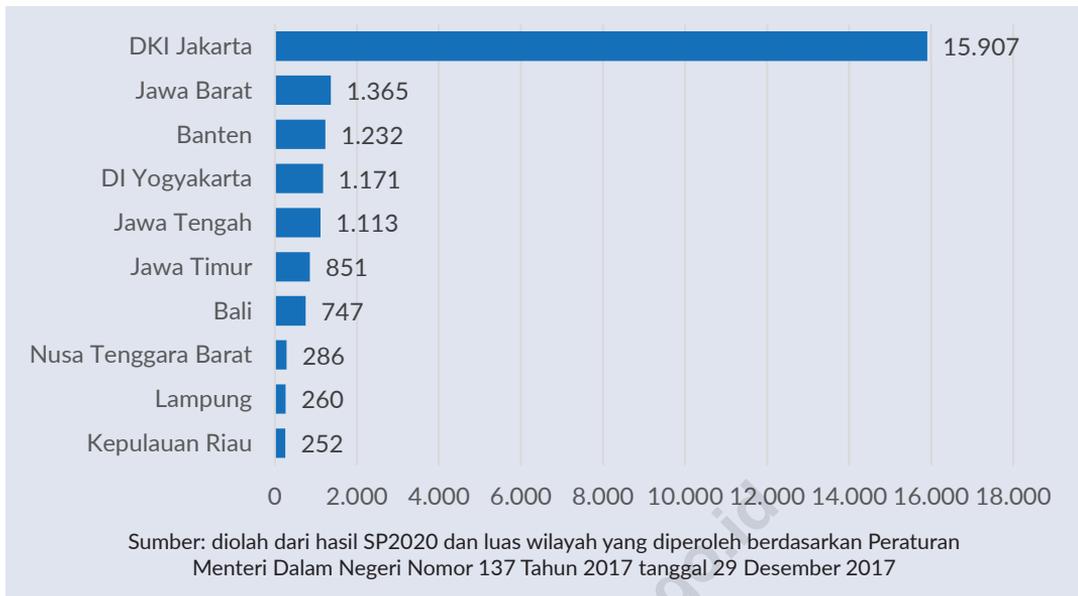
Salah satu faktor yang memengaruhi sebaran penduduk adalah disparitas pembangunan wilayah. Disparitas pembangunan yang semakin besar akan memperlebar ketidakmerataan sebaran penduduk. Daerah dengan kemajuan pembangunan yang pesat memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk daerah lain untuk bermigrasi masuk ke daerah tersebut. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan kepadatan penduduk di daerah tersebut terus meningkat. Seperti halnya terlihat pada Gambar 3, terdapat korelasi positif yang cukup tinggi (0,9) antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dengan migrasi risen masuk. Demikian halnya dengan korelasi PDRB per kapita dan kepadatan penduduk. Hasil pengolahan data menunjukkan korelasi keduanya mencapai 0,7.

Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi sehingga memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk luar wilayah untuk bermigrasi. Pada tahun 2020 kontribusi Pulau Jawa terhadap ekonomi Indonesia mencapai 59 persen. Disparitas pembangunan Jawa dan Luar Jawa sebetulnya sudah terjadi sejak zaman kolonial. Disparitas pembangunan utamanya disebabkan oleh faktor sejarah, kesuburan tanah dan ketersediaan sumber daya alam (SDA), kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana.



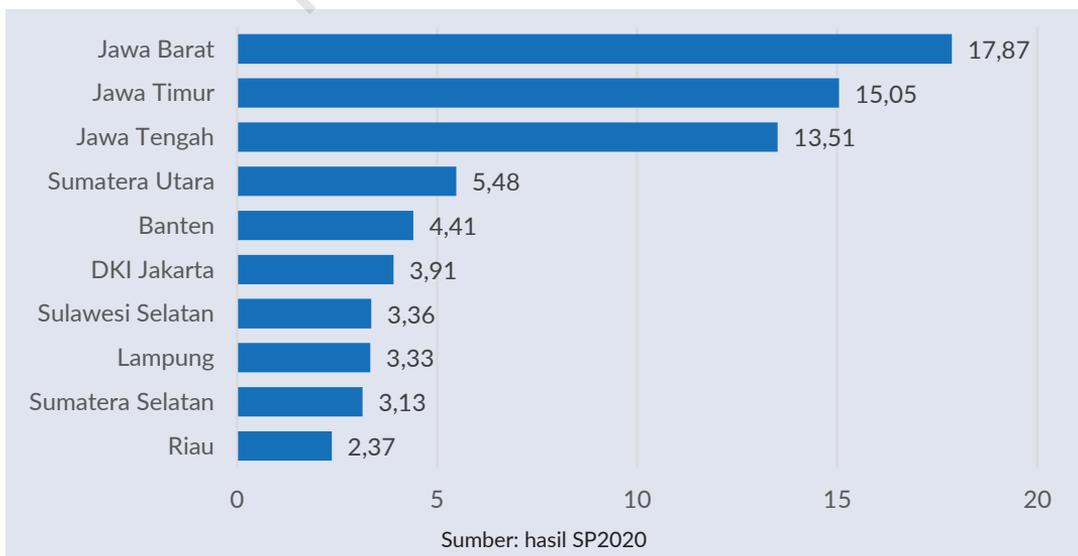
Sumber: diolah dari BPS (2021a)

Gambar 3. Hubungan Antara PDRB (Triliun Rupiah) dan Migrasi Risen Masuk (Ribuan Orang), 2015

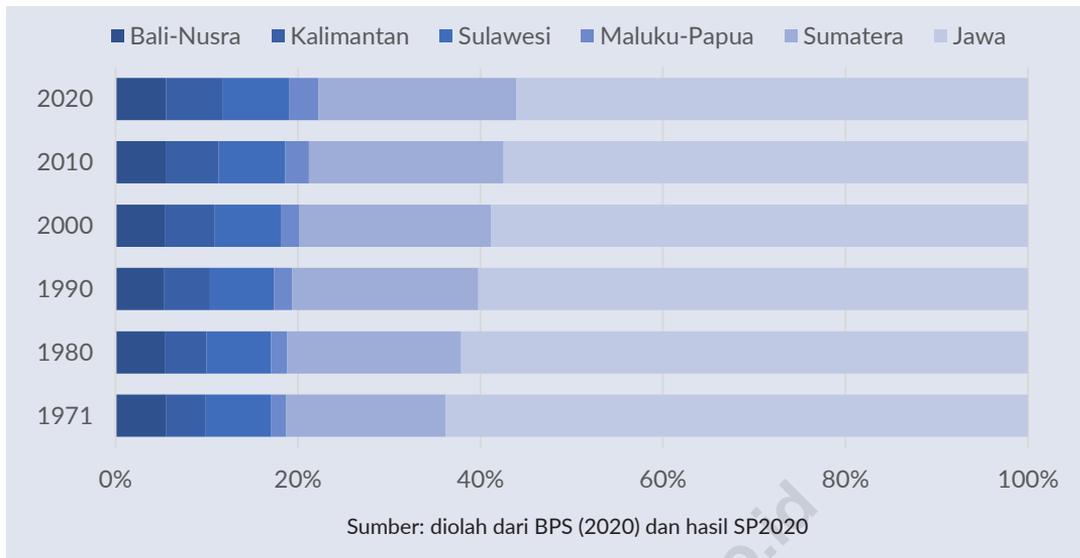


Gambar 4. Sepuluh Provinsi dengan Kepadatan Penduduk Tertinggi menurut Tingkat Kepadatan (Penduduk/km²), 2020

Provinsi yang paling padat penduduknya adalah DKI Jakarta. Dengan luas wilayah 664,01 km², DKI Jakarta dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk (Gambar 4). Meski demikian, kontribusi penduduk DKI Jakarta hanya 4 persen (Gambar 5). Sementara itu, jumlah penduduk terbesar ada di Jawa Barat, yaitu sebesar 18 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Di luar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Lampung dan Kepulauan Riau.

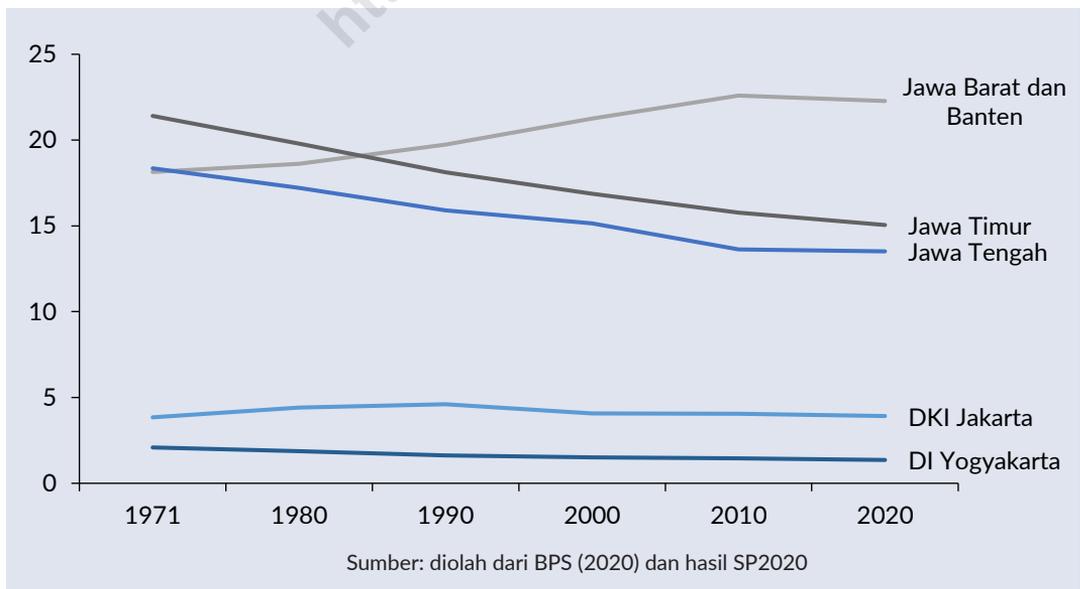


Gambar 5. Sepuluh Provinsi dengan Persentase Jumlah Penduduk Terbesar (Persen), 2020



Gambar 6. Perkembangan Kontribusi Penduduk menurut Pulau (Persen), 1971-2020

Apabila dilihat lebih dalam, persentase jumlah penduduk di Pulau Jawa secara berangsur telah berkurang (Gambar 6). Hal ini ditandai dengan bergesernya distribusi penduduk Pulau Jawa sebesar 1,39 persen poin ke luar Pulau Jawa selama periode 2010-2020. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1971, persentase penduduk Jawa terhadap keseluruhan penduduk Indonesia telah berkurang 7,72 persen poin. Pergeseran ini menjadi salah satu indikasi berkurangnya migrasi ke Pulau Jawa.



Gambar 7. Perkembangan Jumlah Penduduk Di Pulau Jawa (Persen), 1971-2020

Penurunan persentase jumlah penduduk yang paling besar terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah (Gambar 7). Sementara itu, penurunan persentase penduduk di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta baru terlihat pada tahun 2000, sedangkan Jawa Barat dan Banten justru mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2010, dan baru sedikit turun selama periode 2010-2020. Peningkatan penduduk di Jawa Barat dan Banten sampai dengan tahun 2010 diduga disebabkan oleh migrasi masuk yang tinggi seiring dengan perkembangan industri manufaktur di daerah tersebut yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Pergeseran sebaran penduduk antarpulau sesungguhnya telah terjadi secara berangsur. Hal ini ditandai dengan bergesernya distribusi penduduk Pulau Jawa sebesar 1,39 persen poin ke luar Pulau Jawa selama periode 2010-2020. Bahkan jika dibandingkan dengan perubahan dari tahun 1971, kontribusi penduduk Jawa terhadap keseluruhan penduduk Indonesia telah berkurang 7,72 persen poin. Pergeseran ini menjadi salah satu indikasi berkurangnya migrasi ke Pulau Jawa.



Pulau Jawa masih mendominasi kegiatan ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang mencapai 59 persen dari PDB Indonesia.

Di luar Pulau Jawa, perubahan kontribusi penduduk yang cukup besar terjadi di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Perubahan besar ini terjadi sepanjang periode 1971-2020. Sementara itu, pulau Sumatera mengalami peningkatan pesat persentase penduduk pada periode 1971-1990. Pada periode selanjutnya, peningkatan tersebut berlangsung secara perlahan (Gambar 6). Namun demikian, penurunan persentase penduduk Pulau Jawa tidak dibarengi dengan pergeseran

kontribusi ekonomi. Kontribusi PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional justru meningkat. Persentase penduduk Pulau Jawa tahun 2010 mencapai 57,49 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 56,10 persen, sedangkan kontribusi PDRB Pulau Jawa meningkat dari 57,28 persen di tahun 2010 menjadi 58,75 persen pada sepuluh tahun kemudian.

Tabel 2. Distribusi Penduduk dan Kontribusi PDRB Indonesia menurut Pulau, 2010, 2015, dan 2020

Pulau	Distribusi Penduduk (%)			Kontribusi PDRB ⁴ (%)		
	2010 ¹	2015 ²	2020 ³	2010	2015	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	21,31	21,66	21,67	22,39	22,18	21,36
Jawa	57,49	56,78	56,10	57,28	58,33	58,75
Bali-Nusra	5,50	5,52	5,54	3,03	3,07	2,94
Kalimantan	5,80	6,01	6,15	9,41	8,16	7,94
Sulawesi	7,31	7,33	7,36	5,19	5,91	6,66
Maluku dan Papua	2,59	2,69	3,17	2,70	2,35	2,35

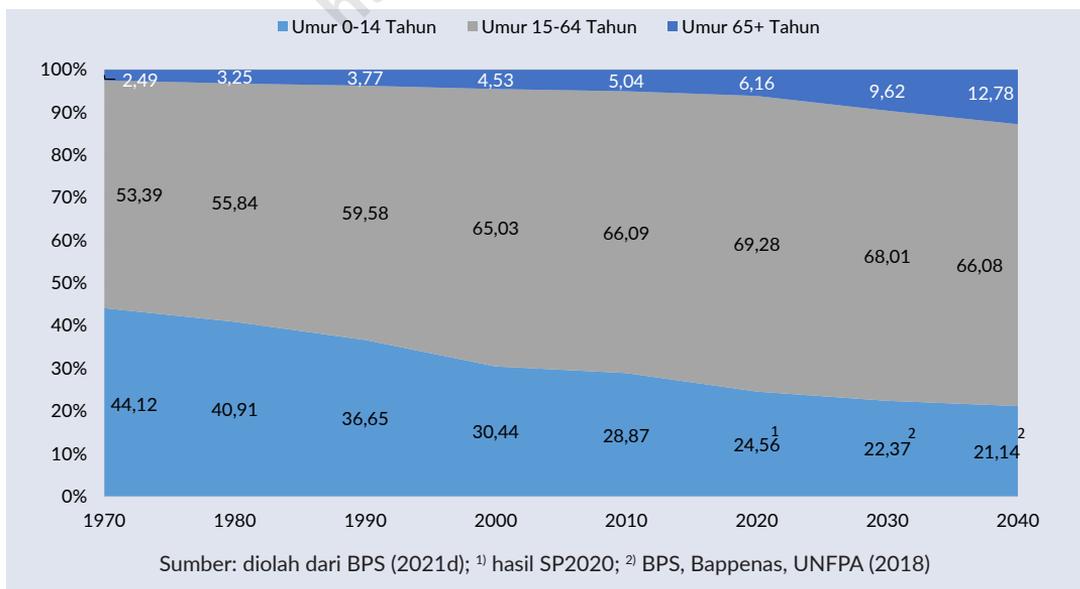
Sumber: ¹⁾ BPS (2020); ²⁾ BPS, Bappenas, UNFPA (2018); ³⁾ hasil SP2020; ⁴⁾ BPS (2021e), data diolah

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarpulau agar distribusi penduduk dan kontribusi PDRB menjadi lebih merata. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi provinsi di luar Jawa dan Sumatera diarahkan dapat tumbuh lebih cepat, sehingga membuat distribusi penduduk menjadi lebih merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengupayakan lima (5) program prioritas, yaitu: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah (Pemerintah RI, 2020). Dengan strategi tersebut diharapkan ketimpangan ekonomi antarwilayah Jawa dan Luar Jawa menjadi berkurang.

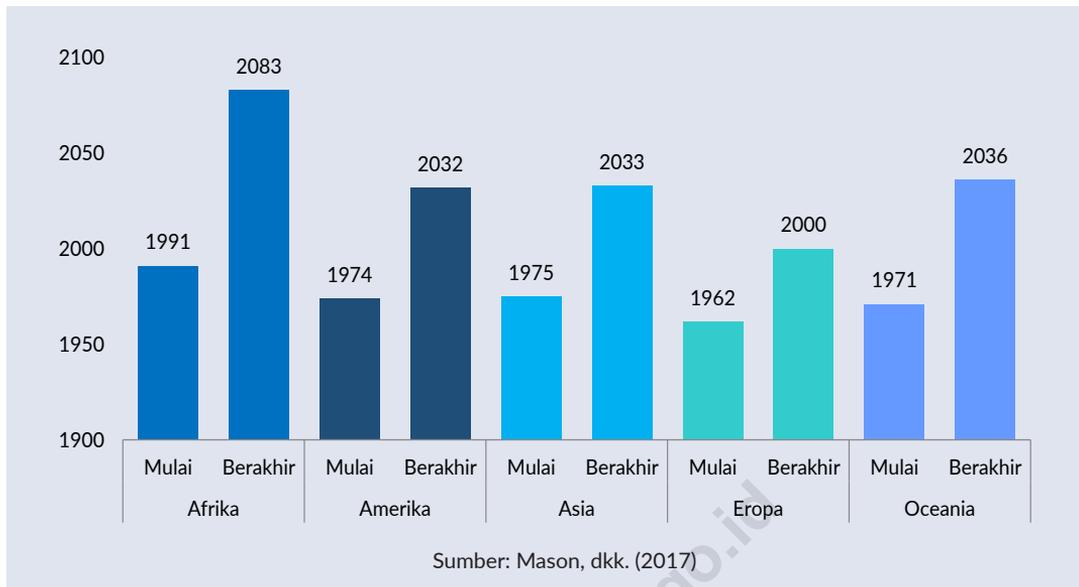
C. Perubahan Struktur Penduduk Indonesia

Bonus demografi diartikan sebagai kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia kerja) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi menjadi mudah tercukupi. Selain itu, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, potensi permintaan konsumsi juga menjadi besar, sebab penduduk usia produktif secara umum memiliki konsumsi yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya.

Bonus demografi juga ditandai dengan kecenderungan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sehingga menyebabkan komposisi penduduk kategori anak-anak menjadi turun dan penduduk lanjut usia (lansia) cenderung meningkat. Pada tahun 1970 persentase penduduk anak adalah sebesar 44,12 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 24,56 persen, sedangkan persentase penduduk usia produktif pada tahun 1971 adalah sebesar 53,39 persen dari total populasi dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar 70 persen (Gambar 8).



Gambar 8. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur (Persen) 1970 -2040



Gambar 9. Periode Bonus Demografi menurut Benua

Penurunan komposisi anak menandakan bahwa jumlah anak dalam keluarga menjadi lebih sedikit sehingga secara tidak langsung dapat mendukung produktivitas anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan ekonomi, karena mereka jadi dapat lebih fokus bekerja atau menjalankan usaha, dibandingkan apabila jumlah anak dalam keluarga lebih banyak.

Bonus demografi terjadi dengan durasi dan waktu yang berbeda-beda di setiap negara. Di Asia, beberapa negara mengalaminya sejak tahun 1975 dan rata-rata berakhir di tahun 2033 (Mason, dkk, 2017). Durasi waktu tersebut hampir sama dengan yang terjadi di Amerika. Sementara itu, bonus demografi dengan durasi panjang banyak dialami oleh negara-negara Afrika (Gambar 9). Bonus demografi akan menciptakan jendela peluang (*window of opportunity*) ketika angka beban ketergantungan berada pada titik terendah. Indonesia diperkirakan akan mengalaminya pada periode tahun 2020-2030 (Adioetomo, 2020). Sementara itu, bonus demografi yang dimiliki Indonesia diperkirakan akan berakhir pada tahun 2035 (Adioetomo & Mujahid, 2014).

Selain bonus demografi, data komposisi penduduk menurut umur juga menginformasikan tentang rasio ketergantungan, yaitu perbandingan komposisi usia nonproduktif dengan usia produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antargenerasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Indikator ini juga dapat dirinci menurut kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak dan usia lanjut.

Rasio ketergantungan di Indonesia masih didominasi ketergantungan penduduk umur anak-anak (0-14 tahun) sebagaimana terlihat di Tabel 3. Rasio ketergantungan yang tinggi pada kelompok umur anak-anak berimplikasi munculnya kebutuhan investasi yang lebih tinggi pada pembangunan sekolah dan perawatan anak. Secara perlahan, rasio ketergantungan penduduk usia anak-anak mulai turun dari waktu ke waktu, tetapi rasio ketergantungan penduduk lansia (65 tahun ke

Tabel 3. Angka Rasio Ketergantungan Indonesia, 1971 - 2020

Rasio Ketergantungan	1971	1980	1990	2000	2010	2015 ¹	2020 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Usia 0-14 tahun	82,6	73,3	61,5	46,8	43,7	38,0	35,4
Usia 65 + tahun	4,7	5,8	6,3	7,0	7,6	8,3	8,9
Total	87,3	79,1	67,8	53,8	51,3	46,3	44,3

Sumber: diolah dari BPS (2021d); ¹ BPS, Bappenas, UNFPA (2018); ² hasil SP2020

atas) meningkat sebagai dampak dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama penurunan angka kematian bayi dan peningkatan umur harapan hidup.

Perubahan struktur penduduk yang mengarah pada peningkatan jumlah usia kerja diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian. Namun demikian, hal ini sepenuhnya dapat terwujud secara optimal. Kajian BPS (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi akibat transisi demografi dan mobilitas penduduk ternyata belum menunjukkan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh penambahan kapital, bukan teknologi (*Total Factor Productivity/TFP*). Hasil kajian juga menunjukkan bahwa lamanya *window opportunity* untuk setiap provinsi berbeda-beda.

Meskipun bonus demografi secara nasional diprediksi terjadi sejak tahun 2012 hingga 2035, gambaran antarprovinsi menyajikan hal yang bervariasi. Pada tahun 2020, sebagian besar Wilayah Indonesia Timur masih memiliki rasio ketergantungan yang lebih tinggi dari angka nasional. Rasio ketergantungan di tingkat nasional adalah sebesar 44,3, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat mencapai 55,18, dan 50,78.

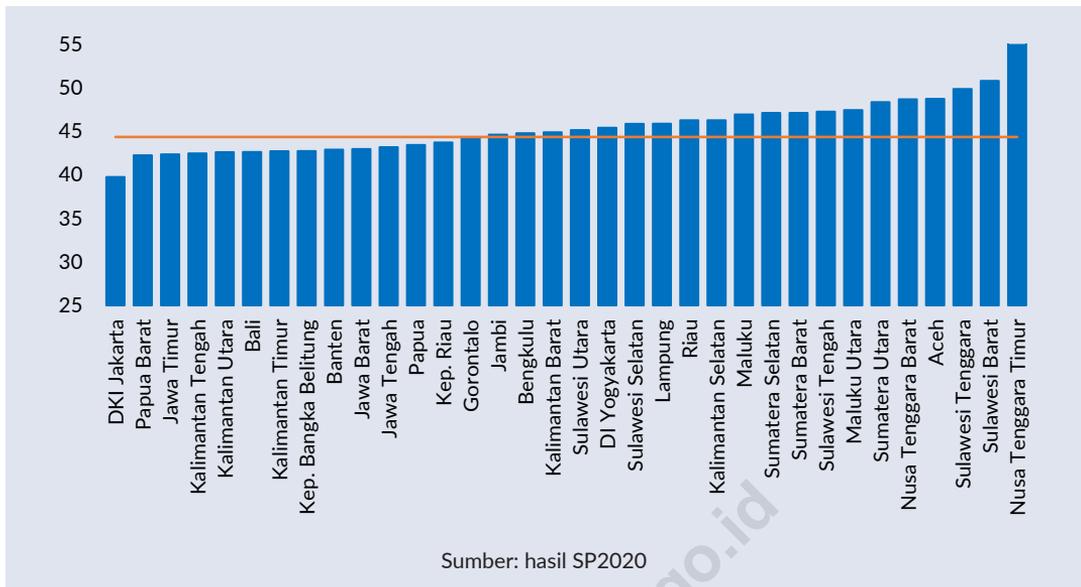
Sementara itu, DKI Jakarta memiliki total rasio beban ketergantungan yang rendah, yaitu 39,73 (Gambar 11). Menurut Ritonga (2014), kondisi bonus demografi pada level nasional hanya menggambarkan rangkuman, karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. DKI Jakarta sudah menikmati bonus demografi sejak tahun 1980-an karena migrasi usia produktif dari luar provinsi masuk ke Jakarta. Di sisi lain, daerah-daerah pengirim migran kehilangan usia produktif.

Berbanding terbalik dengan DKI Jakarta, NTT memiliki rasio ketergantungan tertinggi. Hal ini salah satunya disebabkan karena tingkat kelahiran (TFR) yang masih tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS 2015, TFR NTT mencapai 2,77 (BPS, 2018) dan merupakan angka tertinggi di Indonesia. Provinsi-provinsi yang memiliki TFR tinggi akan sulit mengalami bonus demografi (Samosir, 2020). Seperti disebutkan sebelumnya, bonus demografi

umumnya diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran (TFR) sebagai pengaruh dari program KB yang masih berjalan hingga saat ini dan menurunnya kematian pada kelompok umur lansia yang disebabkan perbaikan kondisi kesehatan. Selain NTT, 10 provinsi dengan TFR yang tinggi antara lain adalah Sulawesi Barat, Papua Barat,



Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki rasio ketergantungan tertinggi. Hal ini salah satunya disebabkan karena tingkat kelahiran (TFR) yang masih tinggi.



Gambar 10. Total Rasio Beban Ketergantungan Usia 0-14 Tahun dan 65+ Tahun menurut Provinsi, 2020

Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, provinsi-provinsi tersebut juga memiliki rasio beban ketergantungan di atas nasional (Gambar 10).

Hasil SP2020 juga menunjukkan masuknya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan rasio ketergantungan di atas rata-rata nasional. Hal ini diduga karena provinsi tersebut mengalami migrasi negatif, yaitu jumlah penduduk yang berpindah keluar provinsi lebih banyak dibandingkan yang masuk, karena penduduk di provinsi tersebut banyak yang merantau. Gambaran tentang kondisi ini terlihat dari hasil Sensus Penduduk Tahun 1971 dan 2010 (Samosir, 2020).

D. Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi

Penduduk usia produktif adalah kontributor utama dalam kegiatan ekonomi. Meskipun kelompok usia anak dan lanjut usia juga dapat berkontribusi, tapi peran keduanya tidak besar dan sering kali tidak ditujukan untuk memperoleh pendapatan utama. Peran penduduk usia produktif dalam perekonomian berbanding lurus dengan nilai tambah kegiatan ekonomi yang diciptakan. Hasil kajian terhadap data persentase banyaknya penduduk usia produktif dan PDRB per kapita menunjukkan bahwa provinsi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar cenderung memiliki nilai PDRB per kapita yang besar juga. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan yang positif dan kuat di antara penduduk usia produktif di setiap provinsi dengan PDRB yang dihasilkan di masing-masing provinsi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,54.

Kontribusi aktif penduduk usia produktif dalam perekonomian akan semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan jika memiliki kualitas yang baik. Kualitas tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan

produktivitas. Namun demikian, untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas diperlukan upaya bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan masing-masing individu. Upaya pemerintah dalam penyiapan lapangan pekerjaan tidak akan memberikan pengaruh yang optimal bagi penyerapan tenaga kerja jika penduduk usia produktif tidak memiliki kualitas yang sesuai. Penduduk usia produktif yang terjun ke dunia kerja diharapkan dapat memenuhi standar kemampuan atau kompetensi, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif (Utomo, 2010).

Peningkatan kemampuan (skill) dan kompetensi berkaitan dengan peningkatan potensi diri melalui peningkatan ilmu pengetahuan (Emilia dkk, 2020). Idealnya, hal ini bersesuaian dengan permintaan pasar tenaga kerja yang dinamis. Kemampuan dan kompetensi perlu ditingkatkan pada dua sisi secara seimbang, yaitu antara hard skill dan soft skill. Dari sisi hard skill, penduduk usia produktif bisa meningkatkan skill-nya dengan mengikuti pelatihan, menempuh pendidikan yang berkualitas, hingga mengambil sertifikasi. Sementara dari soft skill dapat diperoleh atau ditingkatkan melalui kegiatan yang meningkatkan kreativitas, inovasi, optimisme, dan pemikiran positif.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu agenda pembangunan adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui agenda pembangunan ini, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. SDM yang berkualitas dan berdaya saing sangat dibutuhkan dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Peran sertanya dalam perekonomian diharapkan dapat mendukung Indonesia mencapai salah satu target RPJPN 2005-2025, yaitu memiliki pendapatan per kapita yang setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*).

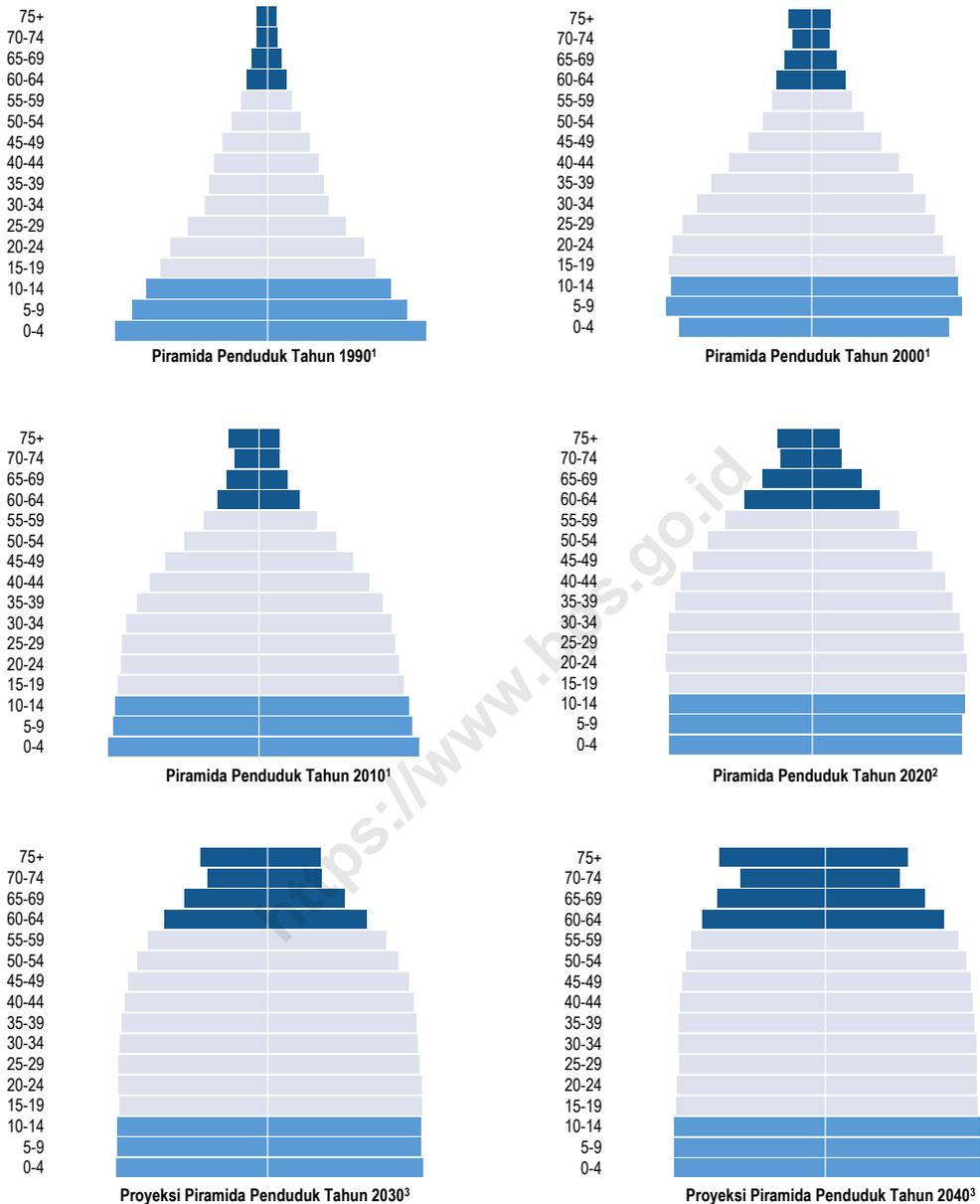
Keberhasilan target pembangunan ini diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2045, khususnya visi poin pertama, yaitu tersedianya sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Pemenuhan visi ini menjadi kunci yang akan menghantarkan Indonesia kepada Indonesia emas di tahun 2045.

E. Implikasi Perubahan Struktur Umur Penduduk pada Masa yang Akan Datang

Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan selanjutnya populasi mengalami fase penuaan penduduk (*ageing population*). Pada tahun 2040, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 57 juta penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) atau lebih dari 18 persen jumlah populasi (BPS, Bappenas, UNFPA, 2018).

Perubahan struktur penduduk Indonesia dari waktu ke waktu dapat dilihat dari perkembangan grafik piramida penduduk yang terdapat di Gambar 11. Pada gambar tersebut terlihat bahwa area biru tua yang menunjukkan jumlah penduduk lansia semakin melebar, terutama setelah tahun 2030.

Perubahan struktur umur yang mengarah pada penuaan penduduk juga memiliki dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, dampak tersebut bervariasi antarnegara. Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya



Sumber: ¹⁾ diolah dari BPS (2020); ²⁾ hasil SP2020; ³⁾ BPS, Bappenas, UNFPA (2018)

Gambar 11. Piramida Penduduk Indonesia 1990 - 2040

yang dimiliki, kondisi domestik dan global, respons kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara.

Penuaan penduduk mengakibatkan penurunan kapasitas fisik dan perubahan preferensi dan kebutuhan individu. Penuaan penduduk yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan stagnasi ekonomi. Secara umum terdapat hubungan negatif antara penuaan penduduk dan

pertumbuhan ekonomi (Lisenkova, dkk, 2012). Proporsi yang lebih tinggi pada kelompok lansia diyakini dapat menurunkan tingkat produktivitas suatu negara, terutama bila tidak diimbangi dengan peningkatan investasi dan teknologi.

Meski begitu, para ahli tidak sepenuhnya sependapat dengan pemikiran tersebut dan berargumen bahwa ada interaksi positif antara penuaan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Prettnner (2012), individu yang lebih tua cenderung menabung lebih banyak. Akibatnya, mereka menyediakan lebih banyak sumber daya untuk investasi, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Bahkan, rentang hidup yang lebih lama akan mengarah pada investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Dengan demikian, peningkatan umur panjang akan secara positif memengaruhi investasi, khususnya di R&D, yang umumnya diakui sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Aghion dan Howitt, 1992 dalam Nagarajan (2014)).



Perubahan struktur umur yang mengarah pada penuaan penduduk memiliki dampak terhadap berbagai hal, namun bergantung pada respons kebijakan, sumber daya yang dimiliki, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing negara.

F. Kesimpulan

Hasil SP2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta jiwa dan menempati urutan keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia. Hasil SP2020 juga menggambarkan adanya dinamika penduduk baik dalam persebaran dan struktur. Dalam hal sebaran, hasil SP2020 memperjelas adanya pergeseran sebaran penduduk Pulau Jawa ke Luar Pulau Jawa yang telah terjadi dalam beberapa dekade. Dalam hal struktur penduduk, penurunan tingkat kelahiran dan kematian mengakibatkan persentase penduduk usia anak menjadi turun dan persentase penduduk lanjut usia menjadi meningkat. Pada tahun 2020, komposisi penduduk usia produktif mencapai 70 persen, meningkat dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya. Dengan peningkatan tersebut, rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk usia produktif berada pada angka yang relatif rendah.

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012 dan puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035. Namun demikian, tidak semua wilayah mengalaminya secara bersamaan. Provinsi DKI Jakarta mengalami bonus demografi yang lebih awal dibandingkan provinsi lain dan diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2030. Provinsi lain yang juga mengalami bonus demografi lebih awal adalah Provinsi Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, dan Bali.

Selama masa puncak bonus demografi, Indonesia perlu memanfaatkan potensi yang tersedia dan mengoptimalkan peran penduduk secara tepat dalam pembangunan. Penurunan persentase penduduk usia anak menjadi momentum untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas anak, terutama dari sisi kesehatan dan pendidikan dalam rangka penyiapan generasi penerus yang tangguh. Peningkatan penduduk usia produktif menjadi peluang yang besar untuk mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara peningkatan persentase penduduk lanjut usia memberikan energi tambahan dalam pembangunan, mengingat sebagian di antaranya adalah lansia yang aktif dan produktif.

Pembahasan berikutnya di publikasi ini menguraikan profil penduduk anak, usia produktif, dan lansia. Pembahasan dalam setiap bab mendeskripsikan peran penduduk dalam pembangunan. Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing kelompok umur dari berbagai sisi. Ketersediaan informasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan, referensi pengetahuan, atau temuan awal untuk studi yang lebih mendalam.

G. Referensi

- Adioetomo, S. M. & Mujahid, G. (2014). *UNFPA Indonesia Monograph Series: No 1 Indonesia on the Threshold of Population Ageing*, Jakarta: UNFPA Indonesia.
- Adioetomo, S. M. (2020). *Bonus Demografi dan Jendela Peluang Meletakkan Dasar Pembangunan Manusia*. In: S. M. Adioetomo & E. L. Pardede, eds. *Memetik Bonus Demografi*. Depok: Rajawali Pers, pp. 23-36.
- Barthos, B. (1990). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bloom, E. D. a. W. G. J. (1998). *Demographic transition and economics*. *The World Bank Economic Review*, 12, 419-455.
- BPS. (2012). *ANALISIS STATISTIK SOSIAL Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: BPS.
- BPS. (2014). *Badan Pusat Statistik*. [Online] Dikutip pada: <https://www.bps.go.id/news/2014/03/26/85/proyeksi-penduduk-mercusuar-pembangunan-negara.html> [Diakses pada 6 September 2021].
- BPS, Bappenas, UNFPA. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). *Badan Pusat Statistik*. [Online] Dikutip pada: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/jumlah-penduduk-hasil-sensus-penduduk-sp-dan-survei-penduduk-antar-sensus-supas-menurut-provinsi-1971---2015.html> [Diakses pada 30 Agustus 2021].
- BPS. (2021a). *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021b). *Analisis Isu Terkini 2021*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021c). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021d). *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*. 1 ed. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021e). *Badan Pusat Statistik*. [Online] Dikutip pada: <https://www.bps.go.id/indicator/52/286/2/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-.html> [Diakses pada 9 Agustus 2021].

- BPS. (2021f). Badan Pusat Statistik. [Online] Dikutip pada: <https://www.bps.go.id/statictable/2011/01/07/1273/migrasi-risen-recent-migration-tahun-1980-1985-1990-1995-2000-2005-2010-dan-2015.html> [Diakses pada 6 Juni 2022].
- Emilia, dkk. (2020). Transformasi Sumber Daya Manusia Menghadapi Pasar Tenaga Kerja Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal kreatif*, Vol. 8, (8), (97).
- Fitch Ratings. (2020). *Fitch Ratings*. [Online] Dikutip pada: <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/china-unemployment-eases-from-coronavirus-hit-08-11-2020> [Diakses pada 31 Agustus 2021].
- Kogel, T. (2005). Youth dependency and total factor productivity. *Journal of Development Economics*, 76(1), 147-173.
- Lee, S. M. A. (2007). Who gains from the demographic dividend? *International Journal Forecast*, 23, 603-619.
- Lisenkova, K., M. M. & Wright, R. (2012). "Population ageing and the labor. *Economic Modeling*, 35, 981-989.
- Mason, A., Lee, R., Abrigo, M. & Lee, S.-H. (2017). *Support Ratios and Demographic Dividends: Estimates for the World*, New York: United Nations.
- Minh, Q. D. (2012). Population and Economic Growth in Developing Countries. *International Journal of Academic Research In Business and Social Sciences*, II(1).
- Nagarajan, N. R. (2014). *Essays on Population Ageing in Least Developed Countries* PhD Dissertation in Economics. s.l.: Universidade Do Porto.
- Notoatmodjo. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ongar, F. & Salvini, S. (2016). Demographic Pressure and Development in A Gender Perspective: A Focus on sub-Saharan Africa. *African Population Studies*, 30 (2),2805-2820.
- Pemerintah RI. (2020). *LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024*, Jakarta: Pemerintah RI.
- Prettner, K. (2012). Population ageing and endogenous economic growth. *Journal of Population Economics*, 26, 811-834.
- Samosir, O. B. (2020). *Gambaran Penduduk Indonesia: Kini, Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. In: S. M. Adioetomo, ed. *Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers, pp. 37-62.
- UNDP. (2020). *HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2020* The next frontier Human development and the Anthropocene, New York: UNDP.
- UNDP. (2020). *UNDP*. [Online] Dikutip pada: <http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking>[Diakses pada 20 Agustus 2021].
- United Nations. (2020). *United Nations*. [Online] Dikutip pada: <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>[Diakses pada 19 Agustus 2021].

- Utomo, H. (2010). Kontribusi Soft Skill Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan. *Among Makarti*, 3(5), 95-104.
- World Bank. (2020a). *World Bank*. [Online] Dikutip pada: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS> [Diakses pada 19 Agustus 2021].
- World Bank. (2020b). *World Bank*. [Online] Dikutip pada: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>[Diakses pada 20 Agustus 2021].
- World Bank. (2021a). *World Bank*. [Online] Dikutip pada: <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart> [Diakses pada 30 Agustus 2021].
- World Bank. (2021b). *World Bank*. [Online] Dikutip pada: <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital> [Diakses pada 30 Agustus 2021].

<https://www.bps.go.id>





2

Anak Investasi Masa Depan Bangsa

- A. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pondasi Daya Saing Bangsa
- B. Struktur Penduduk dan Persebaran Anak Indonesia
- C. Membangun Generasi Berpengetahuan
- D. Menyiapkan Generasi Berumur Panjang dan Hidup Sehat
- E. Pekerja Anak dan Ekonomi Keluarga
- F. Perkawinan Anak
- G. Kesimpulan
- H. Referensi



Pemenuhan hak anak merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia

Anak Investasi Masa Depan Bangsa

A. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pondasi Daya Saing Bangsa

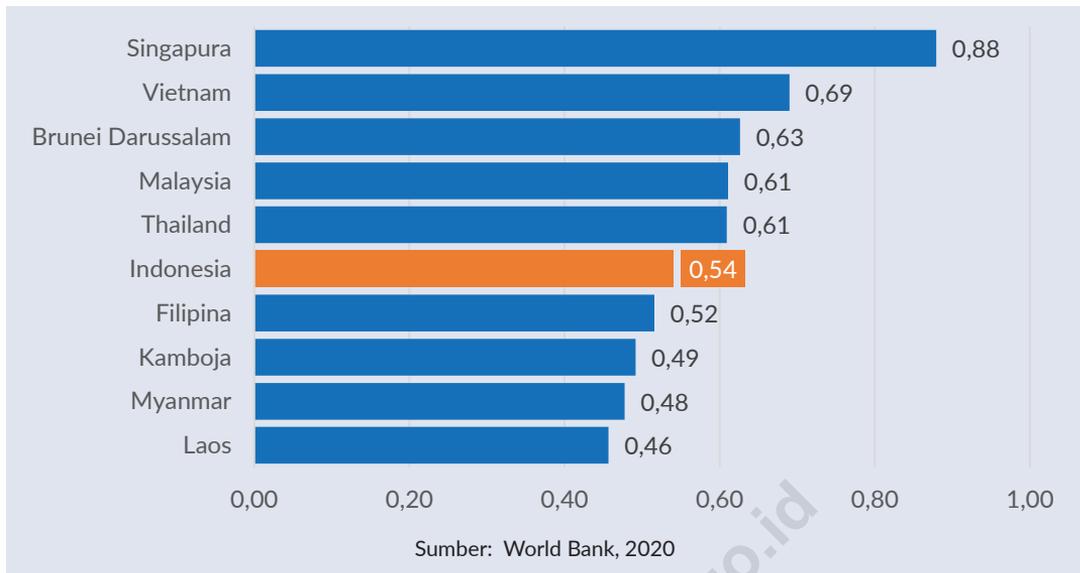
Penurunan fertilitas selama kurun waktu tertentu dapat berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika fertilitas turun, proporsi anak-anak dalam populasi turun dan proporsi populasi usia kerja meningkat, atau jumlah penduduk usia non produktif kelompok umur anak turun dan penduduk usia produktif meningkat. Kondisi ini mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi. Namun demikian, dalam jangka panjang kondisi ini dapat berdampak negatif, terutama jika fertilitas terus turun, persentase penduduk usia kerja turun, sedangkan penduduk lanjut usia meningkat sehingga menciptakan penuaan populasi (*ageing population*) dan peningkatan rasio ketergantungan dari lansia (United Nation, 2021).

Sejak tahun 2012 Indonesia menikmati bonus demografi dan diperkirakan berlangsung sampai dengan tahun 2035. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah berhasil mengoptimalkan peluang bonus demografi seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil, antara lain adalah pentingnya meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, memperluas partisipasi kerja, mengantisipasi sejak dini penuaan populasi, dan mengupayakan pemerataan persebaran penduduk (Kominfo, 2014).

Keempat hal tersebut terkait erat dengan penyiapan anak sebagai investasi bangsa di masa depan. Pendidikan dan kesehatan anak berpengaruh besar terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) pada masa yang akan datang. Kualitas SDM menentukan kapabilitas dan daya saing dalam perluasan partisipasi kerja. Sementara persebaran anak memberikan indikasi tentang potensi migrasi penduduk pada masa yang akan datang, yaitu ketika penduduk usia anak saat ini menjadi penduduk usia produktif yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

Anak¹ merupakan generasi masa depan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Sebagai bagian dari upaya penyiapan anak menjadi generasi yang tangguh, pemenuhan hak anak memiliki peran yang sangat penting dan menjadi bentuk investasi sumber daya manusia. *Human capital investment* yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, pengembangan sosial, perlindungan, nilai-nilai keluarga, dan nilai-nilai masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan yang berimbang langsung pada produktivitas anak saat dewasa (Maliki, 2017).

1 Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun karena anak yang masih dalam kandungan tidak dicatat dalam Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020), maka dalam pembahasan ini anak adalah kelompok penduduk berusia 0-17 tahun.



Gambar 1. Capaian Human Capital Index (HCI) Negara-Negara ASEAN, 2020

Pendidikan berkualitas yang diindikasikan dengan rata-rata lama sekolah dan standar kualitas pendidikan yang tinggi memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan dengan berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat. Ketika hal tersebut dikombinasikan dengan kesehatan yang baik, akan membuat mereka lebih produktif dan berpotensi memiliki umur yang lebih panjang. Manfaat ini semakin memperkuat alasan untuk menempatkan investasi sumber daya manusia sebagai prioritas yang perlu ditingkatkan (Collin dan Weil, 2020).

Berdasarkan *Human Capital Index* (HCI) yang disusun oleh Bank Dunia, pada tahun 2020 Indonesia menempati posisi 96 dari 174 negara yang tercakup dalam penghitungan dan menempati posisi keenam diantara 10 negara ASEAN (World Bank, 2020). Capaian Indonesia ini berada di atas Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos (Gambar 1). HCI menyoroti bagaimana kondisi kesehatan dan pendidikan saat ini dapat mendukung produktivitas generasi anak saat ini pada masa yang akan datang. Capaian HCI akan berpengaruh besar terhadap produktivitas anak saat dewasa. Pemenuhan hak anak, seperti kesehatan dan pendidikan, menjadi pondasi pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas.

Peningkatan kualitas anak melalui pemenuhan hak anak telah menjadi kebijakan pemerintah guna mendukung salah satu misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”. Upaya memastikan tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak sejak dini merupakan investasi utama untuk menciptakan modal sumber daya manusia yang berkualitas.

Orang tua memegang peran utama dalam tumbuh kembang dan membentuk karakter seorang anak (Adioetomo, S. M., Kusumaryani, M. S. W., dan Kiting A. S, 2020). Dengan adanya orang tua, peluang anak untuk mendapatkan haknya secara penuh semakin tinggi. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat berperan penting dalam memastikan hak-hak dasar setiap anak dapat terpenuhi, utamanya untuk yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Berdasarkan Indeks Perlindungan

Anak yang disusun oleh Kementerian PPPA, pada tahun 2018 terdapat 4,82 persen anak Indonesia yang tidak tinggal dengan orang tua mereka (KPPPA, 2021a).

Tantangan lain dalam pemenuhan hak anak adalah dalam hal menghapuskan pelanggaran hak anak dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pelanggaran hak anak dari tahun 2019 hingga 2021 masih berfluktuasi (KPAI, 2022). Pada tahun 2019 kasus pelanggaran hak anak berjumlah 4.369 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.519 kasus, dan pada tahun 2021 turun menjadi 5.953 kasus.

Dari total kasus pelanggaran hak anak tahun 2021, 2.971 di antaranya adalah laporan kasus bagian Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2.982 lainnya adalah pengaduan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang kompleks dan berefek domino yang berpengaruh pada peningkatan kasus pelanggaran hak anak, seperti penurunan ekonomi keluarga, menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, dan mempengaruhi kondisi psikologis orang tua yang menimbulkan kerentanan terjadinya pelanggaran hak anak.

Disparitas pembangunan antarwilayah menjadi tantangan utama dalam mewujudkan hak-hak anak di Indonesia, termasuk diantaranya dalam pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Indonesia, dimana penduduk tersebar di lebih dari 17.000 pulau dalam rentang lebih dari 5.000 km dari barat ke timur dan sekitar 53 persen diantaranya tinggal di daerah perkotaan (UNICEF, 2022).

Kondisi di atas menjadi penyebab layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah pedesaan. Dalam bidang pendidikan, hal ini diindikasikan dengan tingkat penyelesaian pendidikan di kota yang lebih tinggi dibandingkan di desa dan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar juga perbedaan tingkat penyelesaian pendidikan di kota dan di desa. Sementara dalam bidang kesehatan, *unmet need* pelayanan kesehatan di perkotaan lebih rendah dibandingkan pedesaan.

Tabel 1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia, 2020

Wilayah	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah			<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan Menurut Wilayah
	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SMA / Sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota	96,89	90,82	72,43	4,87
Desa	94,95	84,04	51,76	6,16
Kota+Desa	96,00	87,89	63,95	5,44

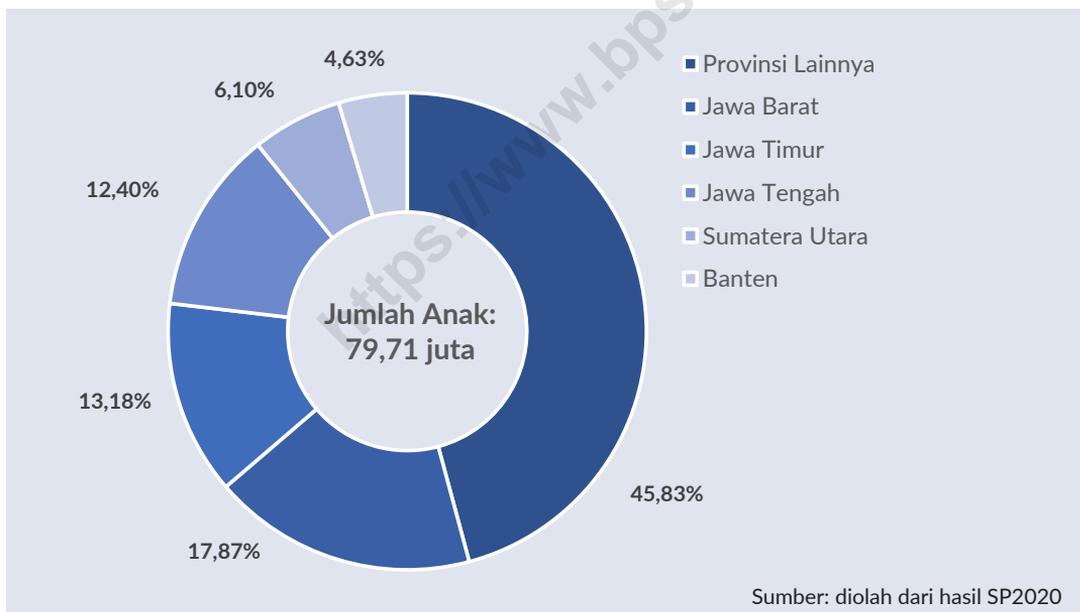
Sumber: BPS, 2020

Keadaan tersebut menguatkan urgensi untuk mendorong upaya peningkatan kualitas anak, terutama dalam penyediaan layanan, kemudahan akses, dan kualitas layanan untuk pemenuhan hak anak secara merata. Anak merupakan generasi masa depan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita

bangsa, sehingga sangat penting untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi yang tangguh. Apalagi generasi anak mengalami tantangan yang lebih dinamis dan kompleks dibandingkan generasi sebelumnya karena banyaknya disrupsi yang menyertai perjalanan hidup mereka saat ini.

B. Struktur Penduduk dan Persebaran Anak Indonesia

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) menunjukkan bahwa sebesar 29,50 persen atau 79,71 juta jiwa penduduk Indonesia adalah anak-anak berusia 0-17 tahun. Dengan kata lain, sekitar satu dari tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Namun demikian, penyebaran penduduk usia anak di Indonesia belum merata. Lebih dari separuh anak Indonesia terdapat di 5 provinsi, dimana 4 diantaranya adalah provinsi yang ada di Pulau Jawa (Gambar 2). Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Belum meratanya penyebaran anak menjadi indikasi belum meratanya penyebaran penduduk antarprovinsi di Indonesia. Penyebaran penduduk memberikan informasi tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang memiliki capaian pembangunan yang tinggi, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan akan cenderung dipadati penduduk.



Gambar 2. Persebaran Anak Usia 0-17 Tahun di Indonesia (Persen), 2020

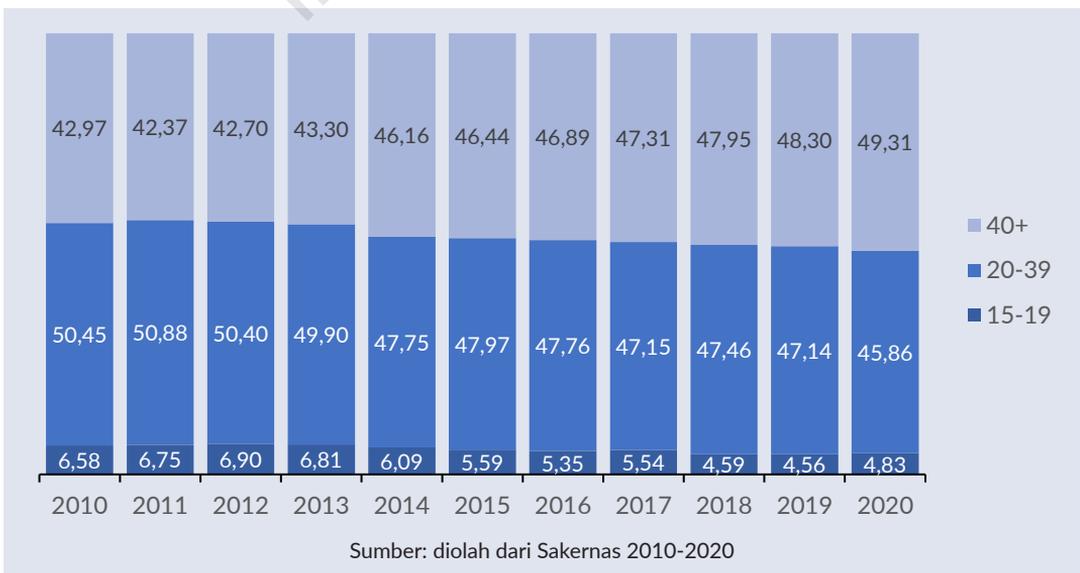
Selama tahun 2010 hingga 2020 jumlah anak Indonesia usia 0-17 tahun turun sebesar 2,08 persen, dari 81,40 juta pada tahun 2010 menjadi 79,71 juta pada tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, komposisi penduduk anak usia 0-17 tahun juga turun dari 34,25 persen pada tahun 2010 menjadi 29,50 persen pada tahun 2020. Suksesnya program pemerintah dalam mengendalikan kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah anak. TFR (*Total Fertility Rate*) Indonesia turun dari 2,45 pada tahun 2019 menjadi 2,24 pada tahun 2021 (BKKBN, 2022).



Gambar 3. Persentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Terhadap Total Penduduk Indonesia, 1990 – 2020

TFR merupakan salah satu target yang ingin dicapai dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan (BAPPENAS, 2021). Penurunan TFR salah satunya disebabkan oleh meningkatnya partisipasi sekolah perempuan dan semakin banyaknya perempuan yang berkiprah di pasar tenaga kerja. Perkembangan komposisi anak dalam struktur penduduk Indonesia sejak 1990 hingga 2020 ditunjukkan pada Gambar 3.

Penurunan TFR yang terjadi dalam jangka panjang akan berdampak pada perubahan struktur penduduk yang menuju penuaan populasi. Meskipun bonus demografi Indonesia diperkirakan masih lama, tetapi indikasi penuaan populasi sudah mulai terlihat, yaitu semakin meningkatnya persentase angkatan kerja dengan usia di atas 40 tahun (Gambar 4). Selama satu dekade persentase angkatan kerja dengan usia di atas 40 tahun meningkat sebesar 6,34 persen poin. Perubahan yang cepat dari bonus demografi menuju penuaan populasi berdampak pada belum



Gambar 4. Distribusi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Usia (Persen), 2010-2020

siapnya suatu negara untuk beradaptasi (Mirkin dan Weinberger, 2021). Upaya pengendalian fertilitas yang berkelanjutan sangat diperlukan agar jumlah penduduk menjadi terkendali, sehingga fase penuaan populasi dapat diperlambat dan adaptasi dengan kondisi demografi yang baru dapat dipersiapkan dengan baik.

Produktivitas dan daya saing bangsa pada masa yang akan datang sangat bergantung pada anak-anak Indonesia saat ini. Mereka berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya dalam hal penyediaan dukungan ekonomi dan sosial bagi penduduk di luar usia produktif, terutama lansia. Menurut Nugroho (2019), anak muda Indonesia saat ini mendukung sepenuhnya berbagai aktivitas yang dilakukan lansia, tetapi kurang memahami akan adanya hak yang dimiliki para lansia sehingga perlu edukasi anak sedini mungkin tentang hal ini.



Pengendalian jumlah penduduk yang seimbang sangat diperlukan untuk memperlambat penuaan populasi dan adaptasi dengan kondisi pasca bonus demografi.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2020 jumlah anak laki-laki lebih banyak dibanding anak perempuan. Hal ini tercermin dari rasio jenis kelamin anak sebesar 105, atau untuk setiap 100 anak perempuan, terdapat sekitar 105 anak laki-laki. Secara persentase, anak laki-laki mencapai 51,34 persen dan perempuan 48,66 persen. Meskipun jumlah anak perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, kualitas kesehatan dan pendidikan anak perempuan lebih baik dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh capaian lima indikator HCI anak perempuan yang lebih unggul pada Tabel 2 (World Bank, 2020). Capaian HCI anak perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki memberikan peluang pemberdayaan perempuan menjadi lebih besar dan memungkinkan proses pembangunan berjalan lebih optimal.

Tabel 2. Capaian Human Capital Index (HCI) Indonesia Menurut Lima Indikator Pembentuknya dan Jenis Kelamin, 2020

Komponen (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
HCI	0,52	0,56	0,54
Peluang selamat hingga usia 5 tahun	0,97	0,98	0,98
Harapan lama sekolah	12,3	12,5	12,4
Skor tes harmonisasi	388	402	395
Pendidikan – Lama sekolah yang disesuaikan	7,6	8,0	7,8
Fraksi anak di bawah 5 tahun tidak stunting	0,72	0,73	0,72
Tingkat kemampuan bertahan saat dewasa	0,82	0,88	0,85

Sumber: World Bank (2020)

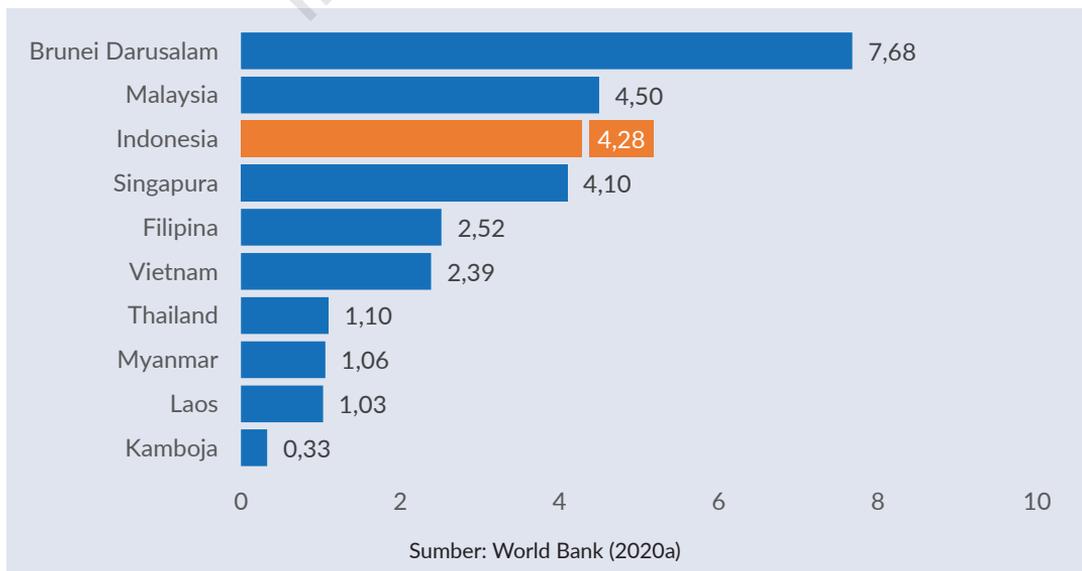
C. Membangun Generasi Berpengetahuan



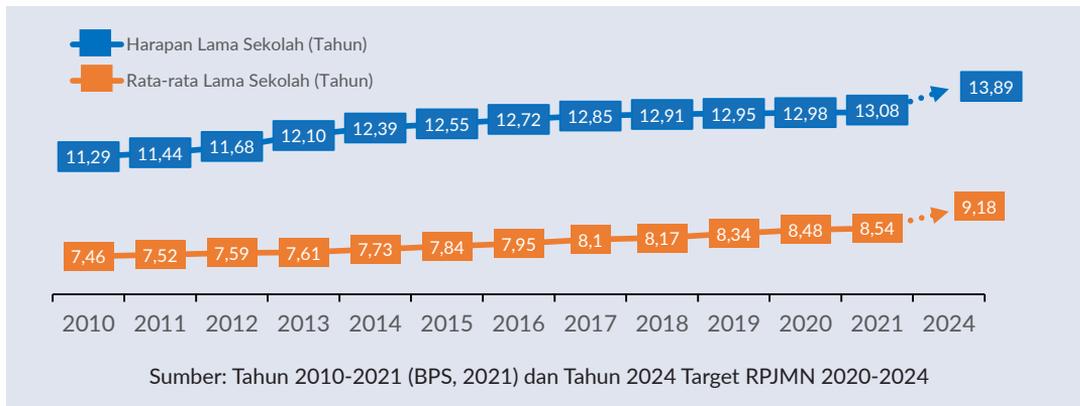
Jumlah anak perempuan Indonesia lebih sedikit dibandingkan laki-laki, tapi memiliki capaian *Human Capital Index* (HCI) yang lebih tinggi.

Bonus demografi yang tengah terjadi saat ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif yang melimpah pada era bonus demografi dapat menjadi modal manusia untuk memicu pertumbuhan ekonomi apabila dibekali dengan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, keterampilan, kompetensi, serta daya saing di era globalisasi (Adioetomo dan Pardede, 2020). Sementara itu, bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi bumerang bagi pembangunan dan daya saing bangsa tersebut.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan pemanfaatan peluang bonus demografi. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia (World Bank, 2022b), Indonesia memiliki modal besar dalam pemanfaatan peluang bonus demografi dari sisi jumlah SDM. Namun, pemberdayaan potensi SDM Indonesia saat ini masih dihadapkan pada tantangan dalam peningkatan kualitas dan daya saing. SDM yang berkualitas dan berdaya saing akan mampu terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja, pengusaha, atau pemilik modal. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dalam jumlah yang banyak akan menekan tingkat pengangguran menjadi rendah. Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi setelah Brunei Darussalam dan Malaysia (Gambar 5). Keselarasan antara pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu kunci pengentasan pengangguran di Indonesia



Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka di Negara-Negara Anggota ASEAN (Persen), 2020



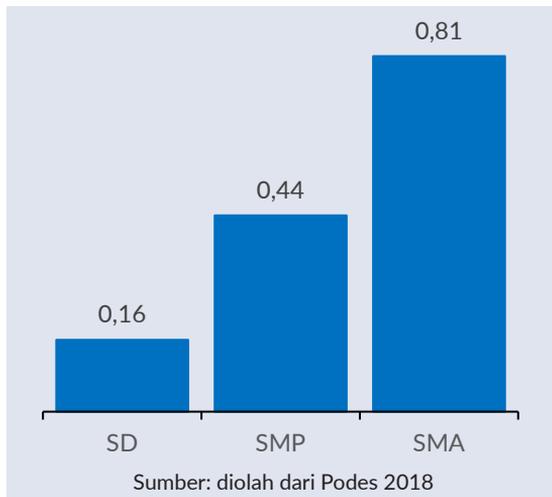
Gambar 6. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia (Tahun), 2010-2021

Mendapatkan pendidikan dan mencerdaskan diri merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Pengetahuan sendiri merupakan salah satu dimensi pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam IPM, pengetahuan direpresentasikan dengan dua indikator pembentuk, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Pemerintah menargetkan capaian RLS dan HLS pada tahun 2024 masing-masing 9,18 dan 13,89 tahun. Sejak tahun 2010 hingga 2021, RLS dan HLS memiliki rata-rata peningkatan setiap tahunnya 0,10 dan 0,16 tahun, sementara capaian RLS dan HLS Indonesia pada tahun 2021 adalah 8,54 dan 13,08 (Gambar 6). Berdasarkan data tersebut, pencapaian target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 menjadi tantangan yang membutuhkan upaya yang sangat keras, karena target tersebut sulit terwujud apabila perkembangan ke depan adalah seperti capaian selama dua belas tahun terakhir.

Selain berperan besar dalam pembangunan manusia, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih menghadapi permasalahan pengentasan kemiskinan karena rendahnya pendidikan. Rata-rata lama sekolah dan persentase penduduk miskin provinsi di Indonesia memiliki korelasi negatif. Selaras dengan hal tersebut, menurut Sumargo dan Simanjuntak (2019), penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin multidimensi paling banyak mengalami deprivasi pada indikator lama sekolah. Kondisi ini kembali memperkuat pentingnya peningkatan penyediaan layanan, kemudahan akses, dan kualitas layanan di bidang pendidikan secara merata, utamanya untuk jenjang menengah pertama dan atas. Disparitas ketersediaan sarana pendidikan antarprovinsi untuk jenjang menengah pertama dan atas masih tinggi (Gambar 7).

Dari Gambar 7 terlihat bahwa ketersediaan sekolah untuk pendidikan menengah pertama dan atas masih kurang merata, tetapi untuk pendidikan dasar cukup merata. Selaras dengan rendahnya disparitas ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar antarprovinsi, pada tahun 2019 Indonesia mencapai kesetaraan gender dalam hal partisipasi sekolah dasar. Capaian ini ditunjukkan dengan *Gender Parity Index* (GPI) 1,00 untuk angka partisipasi sekolah pada anak-anak usia 7-12 tahun (Yarrow dan Afkar, 2020).



Gambar 7. Gini Ratio Ketersediaan Fasilitas Sekolah Antarprovinsi di Indonesia, 2018

Pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan tekanan berat terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Perubahan metode pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran secara daring menjadi tantangan baru yang belum terbayangkan sebelumnya. Akses terhadap teknologi informasi menjadi kebutuhan pokok dalam metode pembelajaran daring. Tingginya disparitas digital antarwilayah di Indonesia berdampak pada hilangnya kesempatan belajar sebagaimana mestinya, utamanya untuk anak-anak yang mengalami kesulitan akses internet. OECD menempatkan Indonesia pada posisi terbawah dari 77 negara tercakup, terkait dengan akses internet dan komputer untuk pembelajaran daring pada tahun 2020 (OECD, 2020).

Pandemi COVID-19 telah menurunkan kualitas pendidikan dan meningkatkan angka putus sekolah. Kemiskinan, menikah, dan bekerja menjadi tiga alasan utama anak putus sekolah pada masa pandemi COVID-19 (Kemdikbud, 2021). Berbagai program dan terobosan telah dilakukan pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, sebab untuk dapat memetik keuntungan dari bonus demografi, diperlukan kualitas pendidikan masyarakat yang memadai, terlebih pada era revolusi industri 4.0 dan persiapan menghadapi *society 5.0*.

Dunia pendidikan di Indonesia harus mampu menjawab tantangan teknologi informasi digital dari revolusi industri 4.0 dan kolaborasi manusia dengan mesin dari *society 5.0*. Sisi positif dari pandemi COVID-19 adalah terdapat akselerasi upaya untuk merespon tantangan tersebut. Diperkirakan dalam lima tahun mendatang 85 juta lapangan pekerjaan lama akan hilang dan disertai oleh munculnya 97 juta pekerjaan baru di tingkat global. Sekitar 50 persen tenaga kerja akan membutuhkan *reskilling* (WEF, 2020). Sementara itu, menurut McKinsey (2019) sebanyak 23 juta pekerjaan akan hilang atau dapat tergantikan oleh mesin pada tahun 2030 di Indonesia, sedangkan antara 27 juta dan 46 juta pekerjaan baru dapat tercipta pada periode yang sama. Sekitar 10 juta pekerjaan baru membutuhkan keahlian yang berbeda/baru. Perubahan struktur ini akan berimbas pada berubahnya kebutuhan tenaga kerja, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Apabila pendidikan di Indonesia mampu menjawab tantangan ini sedini mungkin, anak Indonesia saat ini akan mampu bersaing meraih kesempatan tersebut.

D. Menyiapkan Generasi Berumur Panjang dan Hidup Sehat

Orang tua memiliki peran pertama dan terpenting dalam menjaga tumbuh kembang anak agar menjadi generasi yang berdaya saing pada masa yang akan datang. Peran tersebut dimulai sejak terkonsepsinya anak, yaitu sejak dimulainya pembentukan kemampuan kognitif anak dalam kandungan (Adioetomo, S. M., 2020). Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, pemenuhan asupan gizi dan nutrisi, serta pemantauan perkembangan anak sejak dalam kandungan sangat dibutuhkan.

Pemberian air susu ibu (ASI) merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi pada anak hingga usia dua tahun. Selain untuk pemenuhan gizi anak, pemberian ASI sejak dini dapat menurunkan risiko kematian ibu setelah melahirkan.

Penurunan angka kematian ibu (AKI)² dan angka kematian bayi (AKB)³ masih menjadi tantangan dalam pembangunan manusia di Indonesia. AKI di Indonesia masih tergolong tinggi, pada tahun 2015 AKI berkisar 305 per 100 ribu kelahiran (BPS, 2019; Kemenkes, 2021a). Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, AKI Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan (PKBI, 2019). Untuk itu, upaya penurunan AKI perlu terus dilaksanakan, utamanya dengan menjaga kesehatan ibu selama masa rentan, yaitu pada masa kehamilan dan melahirkan.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah memiliki target menurunkan AKI menjadi 183 per 100 ribu kelahiran pada tahun 2024 (Pemerintah RI, 2020). Dengan memperhatikan perkembangan penurunan AKI selama periode 2015-2019 yang belum optimal, diperlukan berbagai upaya yang lebih kuat untuk dapat mengakselerasi penurunan AKI agar mencapai target yang telah ditetapkan.

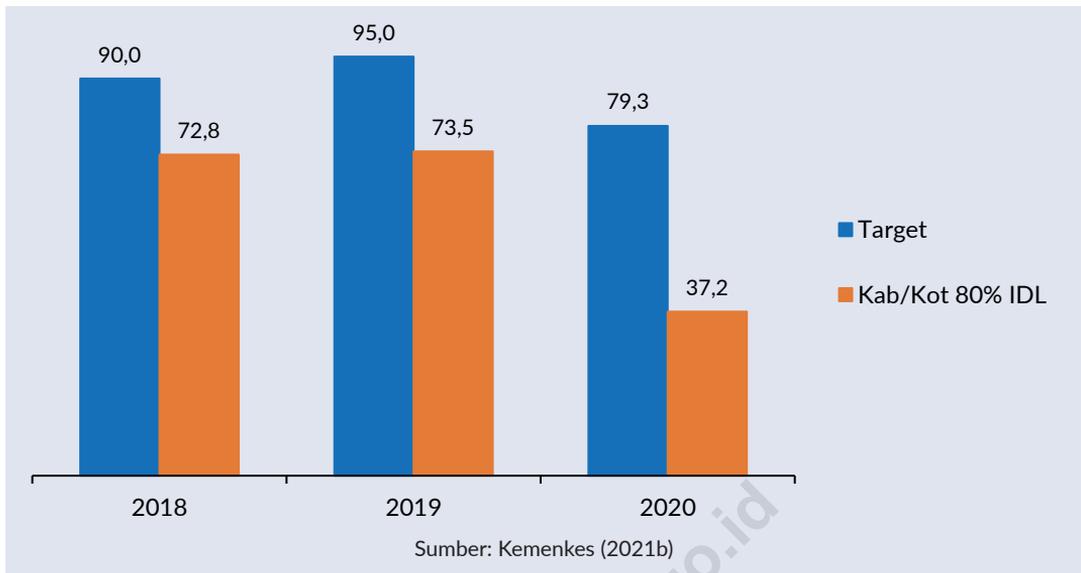
Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), AKB di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 32 per seribu kelahiran hidup. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 24 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2017, atau rata-rata turun sebesar 1,6 per tahun (BPS, 2021d). Apabila penurunan ini dapat dipertahankan, kemungkinan besar target AKB menjadi 16 pada tahun 2024 dapat tercapai.

Kesehatan seorang anak selama dalam kandungan sangat bergantung pada kesehatan sang ibu. Daya tahan tubuh seorang anak selama dalam kandungan ditentukan oleh sistem imun sang ibu. Setelah lahir, anak harus membangun sistem imunnya sendiri untuk melawan berbagai penyakit. Pemberian imunisasi dasar sangat penting untuk membangun daya tahan tubuh anak. Imunisasi dasar memberikan kekebalan kepada anak terhadap berbagai penyakit berbahaya.

Pemerintah menargetkan persentase imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan mencapai 90 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2018 persentase IDL anak usia tersebut mencapai 57,9 persen (Risikesdas, 2018). Pada tahun 2020 capaian pemenuhan target IDL Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama penurunan capaian imunisasi ini karena adanya kekhawatiran orang tua untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan (Kemenkes, 2021b).

2 Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2021a).

3 Angka kematian bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup (BPS, 2021a).



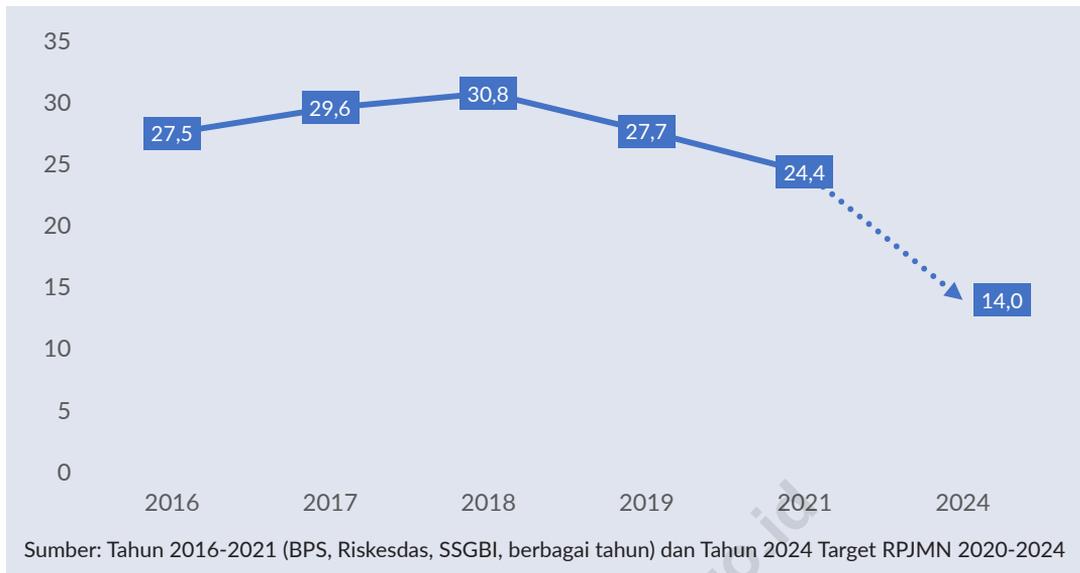
Gambar 8. Target dan Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80 Persen IDL Anak Usia 0-11 Bulan, 2018-2020

Capaian pemenuhan IDL pada anak usia bayi (0-11 bulan) pada tahun 2020 juga lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Realisasi cakupan pemberian imunisasi melalui program imunisasi nasional dan yang dilakukan secara mandiri turun pada tahun 2020. Jumlah kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan IDL kepada 80 persen bayi ditargetkan sebanyak 79,3 persen dan yang berhasil mencapai target adalah 37,2 persen (Gambar 8), sedangkan pada tahun 2019 jumlah kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan ditargetkan sebanyak 95,0 persen dan yang berhasil mencapai target adalah 73,5 persen. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, mengingat penurunan cakupan imunisasi pada beberapa penyakit tertentu dapat menimbulkan *outbreak* atau kejadian luar biasa (Kemenkes, 2021b).

Selain imunisasi, hal lain yang juga penting untuk menjaga tumbuh kembang anak adalah pemenuhan kebutuhan gizi. Berdasarkan laporan indeks nutrisi anak dunia yang dirilis WHO, UNICEF, dan Lancet pada bulan Februari tahun 2020 menunjukkan pemenuhan nutrisi anak Indonesia berada di peringkat 117 dari 180 negara tercakup (Clark, dkk. 2020). Pada tingkat ASEAN, Indonesia berada di urutan ketujuh dari sembilan negara tercakup. Posisi Indonesia berada di atas Myanmar dan Laos. Sementara itu, Brunei Darussalam adalah negara ASEAN yang belum tercakup dalam penghitungan indeks tersebut.

*Stunting*⁴ merupakan salah satu indikator kecukupan nutrisi pada anak. Program pengentasan *stunting* pada balita menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas anak Indonesia dari sisi kecukupan gizi. Penurunan *stunting* pada balita menjadi agenda prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 dan pemerintah menargetkan prevalensi *stunting* balita pada tahun 2024 sebesar 14 persen (Pemerintah RI, 2020). Sementara itu, prevalensi *stunting* balita pada

⁴ *Stunting* adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai (Kemenkes, 2019).

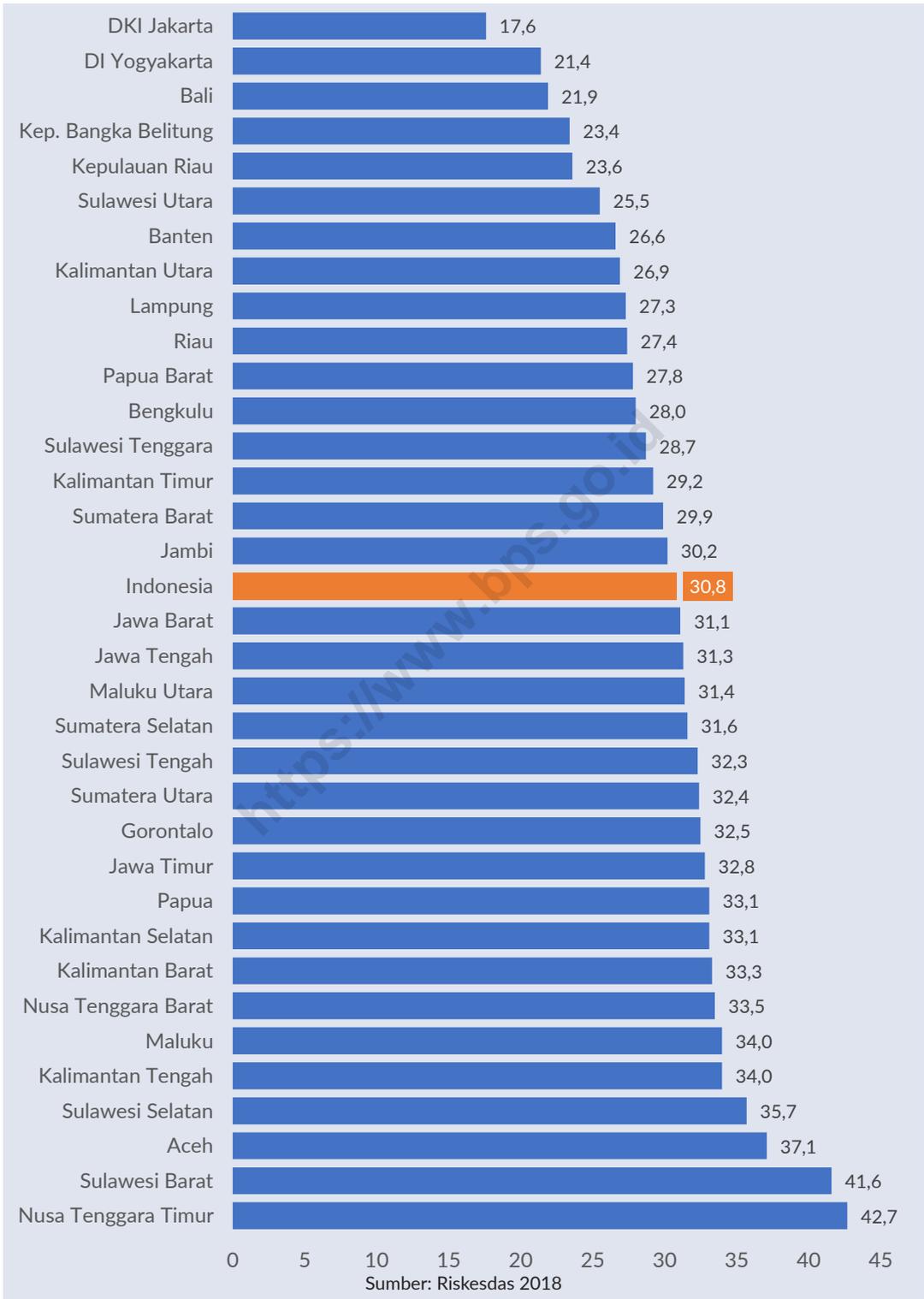


Gambar 9. Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek, 2016-2019 dan 2021 Serta Target RPJMN 2024

tahun 2021 adalah sebesar 24,4 persen (Gambar 9). Dengan rata-rata penurunan prevalensi per tahun 0,8 persen (2016-2021) dan prevalensi *stunting* balita tahun 2021 yang masih tinggi, menjadikan pencapaian target *stunting* 2024 memerlukan upaya yang lebih keras dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Belum meratanya capaian kualitas kesehatan anak antarwilayah dan antartingkatan sosial-ekonomi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya capaian kesehatan anak di tingkat nasional. Menurut laporan kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2020, disparitas status kesehatan anak masih banyak dijumpai di Indonesia (Kemenkes, 2021b). Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, prevalensi *stunting* di tingkat provinsi masih belum merata (Gambar 2.10). Prevalensi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai provinsi dengan prevalensi tertinggi (42,7 persen) mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan prevalensi *stunting* di provinsi terendah (DKI Jakarta, 17,6 persen).

Penyebab tidak tercapainya berbagai target pemerintah di bidang kesehatan anak tidak dapat dipisahkan dari pandemi COVID-19 (Kemenkes, 2021b). Menurunnya tingkat imunisasi dasar anak, kegiatan posyandu, dan pelayanan puskesmas adalah beberapa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kualitas kesehatan anak. Memastikan layanan kesehatan berkualitas tetap tersedia dan memberikan penguatan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan anak sejak dini, termasuk menjaga protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 menjadi poin utama agar pencapaian target kesehatan dapat kembali terkelola dengan optimal.



Gambar 10. Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek Menurut Provinsi, 2018

E. Pekerja Anak dan Ekonomi Keluarga

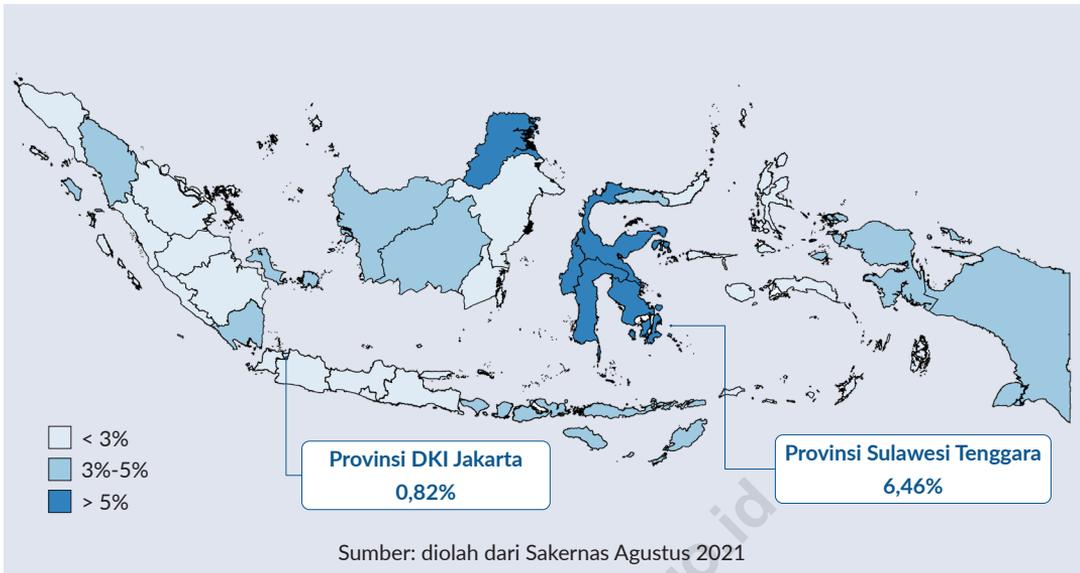
Pekerja anak menjadi salah satu penyebab terjadinya putus sekolah dan gangguan kesehatan pada anak. Tidak seluruh lapangan kerja memiliki pekerjaan yang ramah anak, beberapa di antaranya memiliki risiko mengganggu tumbuh kembang anak. Di tingkat global, diperkirakan sekitar 32 persen anak-anak yang menjadi pekerja anak mengalami putus sekolah atau tidak merasakan bangku pendidikan. Sementara 68 persen lainnya dapat bersekolah, tetapi cenderung memiliki prestasi yang lebih rendah dibanding teman-teman mereka yang tidak bekerja (ILO, 2017). Pada awal tahun 2020 diperkirakan 160 juta anak di seluruh dunia menjadi pekerja anak, atau hampir satu dari 10 anak di seluruh dunia menjadi pekerja anak (ILO dan UNICEF, 2021). Sementara di Indonesia sekitar 3,25 persen anak usia 10–17 tahun menjadi pekerja anak pada tahun 2020. Persentase tersebut meningkat sebesar 0,9 persen poin dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase anak usia 10–17 tahun menjadi pekerja anak menurun menjadi 2,63 persen (Gambar 11).

Pekerja anak di Indonesia cenderung menjadi pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar. Sebagian besar bekerja di lapangan usaha jasa-jasa, diikuti oleh kategori pertanian dan manufaktur. Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada tahun 2021 persentase anak laki-laki yang menjadi pekerja anak lebih tinggi dibandingkan perempuan. Persentase anak laki-laki dan anak perempuan yang menjadi pekerja anak masing-masing sebesar 2,67 dan 2,60 persen. Sementara itu, persentase pekerja anak di tingkat provinsi yang tertinggi terdapat di Sulawesi Tenggara, yaitu mencapai 6,46 persen, sedangkan terendah di DKI Jakarta, yaitu 0,82 persen (Gambar 12).

Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan anak menjadi pekerja. Pandemi COVID-19 tahun 2020 turut berpengaruh pada penambahan pekerja anak di Indonesia, utamanya untuk rumah tangga yang rentan secara ekonomi. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi berimbas pada



Gambar 11. Persentase Pekerja Anak Usia 10-17 Tahun, 2010-2021



Gambar 12. Persentase Anak Bekerja Usia 10-17 Tahun Menurut Provinsi, 2021

meningkatnya angka pengangguran (Gambar 13). Jumlah pengangguran Agustus 2020 sebesar 9,77 juta orang, meningkat 2,84 juta orang dibandingkan Februari 2020 dan meningkat 2,67 juta orang terhadap Agustus 2019 (BPS, 2021c). Selain pengangguran yang meningkat, menurunnya kualitas pekerjaan dan kompensasi tenaga kerja Indonesia akibat pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada meningkatnya kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (BPS, 2021b).



Gambar 13. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2018 - Agustus 2020

Tidak semua orang tua dan anak memiliki pandangan bahwa setiap anak yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa pekerjaan yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk pengembangan diri anak dan bentuk kewajiban moral kepada keluarga (Nurhadi, 2015).

Anak dari keluarga miskin bekerja untuk menopang ekonomi dan terkadang mengorbankan pendidikannya. Kehilangan akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan ketidaksiapan anak menghadapi persaingan pada masa mendatang. Rendahnya daya saing akan berdampak pada penurunan kualitas pekerjaan dan rendahnya penghasilan. Penghasilan yang rendah atau bahkan pengangguran ketika dewasa memaksa mereka untuk tetap berada di lingkaran



Gambar 14. Siklus Kemiskinan dan Pekerja Anak

kemiskinan dan mempekerjakan anak untuk menopang ekonomi keluarga dan membentuk siklus kemiskinan dan pekerja anak (Gambar 14). Keluarga yang mempekerjakan anak dalam jangka pendek akan mendapatkan tambahan pendapatan, tetapi mereka mengorbankan pendapatan jangka panjang (ILO, 2009).

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia belum siap menghadapi perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikasi tingkat kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Siswa berpendidikan tinggi di Indonesia memiliki kompetensi digital yang relatif masih rendah (Mantovani, dkk. 2020).

Pada tahun 2020, sekitar 38,89 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Pekerja anak sedikit banyak berpengaruh pada daya saing dan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan karena pekerja anak menghasilkan inefisiensi produktivitas tenaga kerja karena secara umum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang belum memenuhi standar.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menurunkan dan menghapuskan praktik pekerja anak secara bertahap. Salah satu upaya tersebut tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak yang telah berusia 13-15 tahun dengan syarat bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh anak tersebut merupakan pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Undang-undang tersebut juga menentukan beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi antara lain: pekerja anak mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali, terdapat perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas; dan pekerja anak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan sejumlah strategi untuk pencegahan dan penanggulangan pekerja anak (KPPPA, 2021c). Adapun strategi tersebut antara lain dengan mengembangkan basis data pekerja anak, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait pekerja anak, dan *mainstreaming* isu pekerja anak dalam kebijakan dan program perlindungan khusus anak di kabupaten/kota. Strategi selanjutnya adalah mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak, mengembangkan pemantauan dan remediasi pekerja anak, serta mengkoordinasikan untuk penanggulangan pekerja anak pada 4 sektor prioritas, yakni pertanian, perikanan, jasa, dan pariwisata.

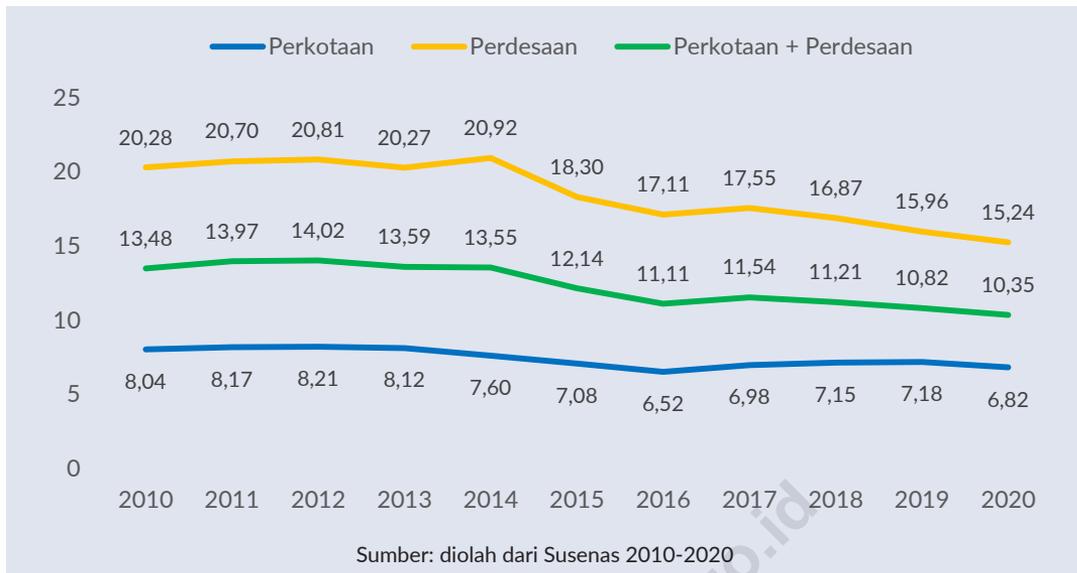
Meskipun memiliki produktivitas yang lebih rendah dari tenaga kerja dewasa, adanya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan akan tenaga kerja murah menyebabkan pekerja anak tetap ada, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan (ILO, 2007). Praktek pekerja anak tetap terjadi meskipun pemerintah telah berupaya melindungi anak melalui penetapan peraturan undang-undang, kebijakan, program, dan penerapan berbagai strategi. Peningkatan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak terkait, seperti dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasi berbagai regulasi pekerja anak. Lingkungan keluarga, khususnya orang tua, memainkan peran utama dalam pencegahan pekerja anak. Peningkatan pemahaman orang tua dan masyarakat akan pentingnya pencegahan pekerja anak menjadi kunci keberhasilan berbagai program pengentasan pekerja anak.

F. Perkawinan Anak

Bangsa Indonesia menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak (KPPPA, 2020). Putus sekolah, terganggunya kesehatan reproduksi dan mental, kekerasan dalam rumah tangga, dan pekerja anak merupakan beberapa contoh pelanggaran hak anak yang mungkin terjadi akibat perkawinan anak (KPPPA, 2021a). Perkawinan anak merupakan kegagalan dalam perlindungan anak (Fadlyana dan Larasaty, 2009).

Pada tahun 2020, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang usia saat perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun mencapai 10,35 persen (Gambar 15). Meskipun cenderung landai, prevalensi perkawinan anak di Indonesia tahun 2010 hingga 2020 telah mengalami penurunan sebesar 3,13 persen poin.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan angka perkawinan anak 8,74 persen pada tahun 2024 (Pemerintah RI, 2020). Pada tahun 2020 angka perkawinan anak adalah 10,35 persen. Dengan rata-rata penurunan prevalensi per tahun sekitar 0,3 persen poin (2010-2020), menjadikan pencapaian angka perkawinan anak 2024 memerlukan upaya yang lebih keras dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama di daerah perdesaan, mengingat tingginya angka perkawinan anak di daerah tersebut. Angka perkawinan anak di daerah perdesaan pada tahun 2020 adalah 15,24 persen, terpaut jauh dengan daerah perkotaan yang sebesar 6,82 persen.



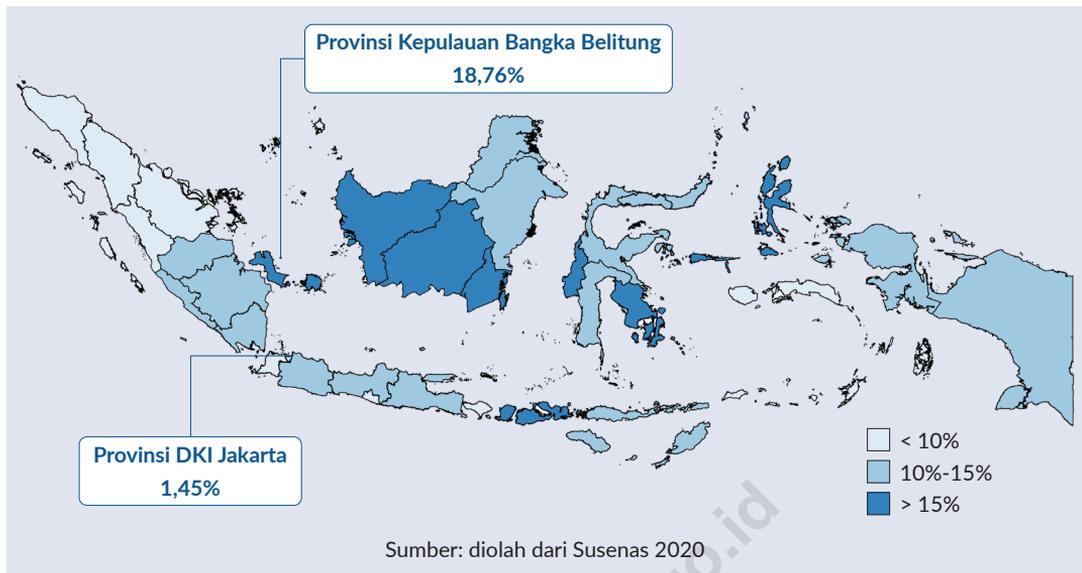
Gambar 15. Perkembangan Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Saat Menjalani Perkawinan Pertama Berusia Kurang Dari 18 Tahun, 2010-2020

Pemerintah telah merumuskan beberapa langkah untuk menekan angka perkawinan anak di daerah pedesaan, antara lain dengan penguatan implementasi hukum tentang perkawinan anak, memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, merubah pola pikir mengenai kesetaraan gender dan budaya perkawinan anak (BAPPENAS, BPS, UNICEF, PUSKAPA, 2020).

Sementara itu jika dilihat menurut provinsi, persentase perkawinan usia anak tertinggi terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 18,76 persen. Provinsi dengan persentase perkawinan anak terendah adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,45 persen. Gambar 16 menunjukkan persentase perempuan usia 20-24 tahun menurut provinsi yang saat menjalani perkawinan pertama usianya di bawah 18 tahun.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 menambah tantangan baru dalam menurunkan angka perkawinan anak. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat terdapat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Jumlah tersebut meningkat sekitar 43,36 persen jika dibandingkan Januari-Desember 2019 yang mencapai 23,7 ribu permohonan. Dari 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020, 60 persen yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun (KPPPA, 2021b).

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak di masa pandemi COVID-19 antara lain guncangan pada perekonomian, penutupan sekolah, dan menurunnya berbagai fasilitas layanan seperti pelayanan kesehatan (UNICEF, 2021a). Peningkatan perhatian dan peran orang tua kepada anak selama masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Peran dan perhatian orang tua menjadi benteng pertama dan efektif dalam mencegah meningkatnya perkawinan anak di masa pandemi (Rahiem, 2021).



Gambar 16. Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Pertama Sebelum Usia 18 Tahun menurut Provinsi, 2020

Masih tingginya perkawinan anak di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Kemiskinan bukan satu-satunya pendorong perkawinan anak (BAPPENAS, BPS, UNICEF, PUSKAPA, 2020). Perkawinan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat (Fadlyana dan Larasaty, 2009). Perkawinan anak lebih sering dijumpai pada keluarga miskin. Adanya harapan tercapainya keamanan secara sosial dan finansial setelah menikah, mendorong terjadinya perkawinan anak.

Selain itu, adanya budaya dan tradisi pada kalangan masyarakat tertentu juga menjadi faktor lain yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Pergaulan bebas dan adanya stigma negatif ketika seorang anak belum menikah setelah masa pubertas pada kalangan masyarakat tertentu, merupakan contoh faktor pendorong terjadinya perkawinan anak dari sisi budaya dan tradisi. Kondisi sosial ekonomi, masih rendahnya pendidikan dan pemahaman akan dampak dari perkawinan anak, serta adanya budaya dan tradisi perkawinan anak pada kelompok masyarakat tertentu merupakan beberapa faktor pendorong terjadinya perkawinan usia anak.

Perkawinan anak berpengaruh pada kesehatan dan pendidikan anak. Tidak hanya pada anak yang melakukan perkawinan, tetapi juga pada anak-anak mereka nantinya. Perkawinan anak seringkali merupakan akibat dari adanya ketidaksetaraan gender (UNICEF, 2021b). Anak perempuan rentan menjadi korban perkawinan anak. Sebagian keluarga pada masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya dapat menjadi solusi permasalahan finansial keluarga. Selain itu, masih adanya pandangan perempuan tidak memiliki pilihan dalam berpasangan, menyebabkan perempuan harus menerima ketika orang tuanya akan menikahkan atau ada yang menawarkan untuk menikah (GLA, 2020).

Dampak dari perkawinan anak cenderung lebih merugikan perempuan dibanding laki-laki. Perempuan yang melakukan perkawinan anak cenderung mengalami

kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki kapasitas yang terbatas dalam pengambilan keputusan (UNICEF, 2005). Perkawinan anak juga lebih berdampak pada perempuan dari sisi kesehatan dan pendidikan, seperti terjadinya kehamilan remaja, tingginya risiko kematian ibu dan bayi yang baru lahir, dan putus sekolah (UNICEF, 2021b). Pola asuh anak yang kurang baik, seperti pola permisif dan otoriter, merupakan dampak yang mungkin terjadi pada anak-anak yang terlahir dari perkawinan anak (Lubis dan Nurwati, 2020).

Perkawinan anak memiliki korelasi negatif dengan pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah terus berupaya menurunkan jumlah perkawinan anak. Pengesahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penetapan target penurunan perkawinan anak sampai 8,74 persen pada tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 merupakan implementasi dari upaya tersebut. Pemerintah juga berupaya melakukan percepatan Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang dilakukan secara sistemik dan terpadu dari berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (BAPPENAS dan KPPPA, 2020).

Selain itu, beberapa kementerian juga berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan. Sinergi dan komitmen tersebut direalisasikan dalam bentuk Gerakan Pendewasaan Perkawinan (KPPPA, 2021b). Peningkatan pengawasan terpadu dan evaluasi secara berkala sangat dibutuhkan untuk menjamin penerapan dan efektivitas dari berbagai regulasi yang telah dibangun untuk mencegah perkawinan anak.

G. Kesimpulan

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan aset utama bangsa di masa depan. Pemenuhan hak anak menjadi kunci utama untuk membangun anak Indonesia agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh. Kesenjangan pembangunan antarwilayah menjadi tantangan utama dalam mewujudkan hak-hak anak di Indonesia. Tantangan ini dipersulit oleh kondisi geografi dan belum meratanya penyebaran penduduk.

Belum meratanya penyebaran penduduk usia anak menjadi cerminan dari penyebaran penduduk secara keseluruhan. Penduduk cenderung berkumpul pada wilayah-wilayah yang maju dari sisi pembangunan. Pemerataan pembangunan dan mempermudah akses akan mendorong pemerataan sebaran penduduk serta meningkatkan kesiapan wilayah dalam membangun anak Indonesia yang berdaya saing. Membangun dan mempersiapkan anak Indonesia menjadi generasi tangguh memiliki peran penting untuk menghadapi peluang dan tantangan di masa depan.

Bonus demografi menjadi salah satu peluang dan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Meskipun belum mencapai puncaknya, bonus demografi Indonesia mulai dibayangi penuaan populasi. Mitigasi dan persiapan untuk menghadapi penuaan populasi di masa depan harus dilakukan sedini mungkin. Menjaga keseimbangan struktur penduduk melalui pengelolaan fertilitas secara berkelanjutan merupakan salah satu bentuk mitigasi penuaan populasi. Pengendalian fertilitas akan memperlambat penuaan populasi Indonesia dan memberikan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan struktur penduduk. Persiapan menghadapi penuaan populasi dapat dilakukan melalui

peningkatan pemberdayaan perempuan dan lansia, penyiapan lapangan kerja dan fasilitas umum ramah lansia, penyiapan jaminan hari tua, serta meningkatkan kualitas anak dan generasi muda terkait pemahaman hak lansia.

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas anak Indonesia. Dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia masih belum selaras. Kondisi ini berdampak pada masih tingginya pengangguran. Revolusi industri 4.0 yang diakselerasi oleh pandemi COVID-19 dan mempersiapkan *society 5.0* menjadi tantangan pendidikan di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menurunkan kualitas pendidikan dan meningkatkan angka putus sekolah. Pendidikan di Indonesia harus mampu menjawab tantangan dari perubahan yang terjadi sedini mungkin. Jika tidak, anak Indonesia saat ini tidak akan mampu bersaing di masa mendatang. Meningkatkan kesetaraan akses dalam pendidikan dan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja menjadi kunci peningkatan daya saing anak.

Selain pendidikan, pandemi yang terjadi juga berdampak pada rendahnya capaian program kesehatan anak Indonesia. Menurunnya tingkat imunisasi dasar anak, kegiatan posyandu, dan pelayanan puskesmas merupakan contoh dampak pandemi COVID-19 terhadap kualitas kesehatan anak. Memastikan layanan kesehatan berkualitas tetap tersedia dan memberikan penguatan pemahaman pentingnya menjaga kesehatan anak sejak dini, menjadi poin utama agar target di bidang kesehatan dapat kembali terkendali.

Pekerja anak dan perkawinan anak juga mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Kedua fenomena tersebut berdampak negatif terhadap perkembangan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, serta meningkatnya ketimpangan gender, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan manusia Indonesia. Melalui implementasi berbagai kebijakan, pemerintah terus berupaya melindungi dan memenuhi hak anak, serta menghapus pekerja anak dan mencegah perkawinan usia anak. Namun pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, orang tua, masyarakat, dan seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan dalam membangun anak Indonesia.

H. Referensi

- Adioetomo, S. M. (2020). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini – Pembangunan Manusia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adioetomo, S. M., Kusumaryani, M. S. W., dan Kiting A. S. (2020). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini – Perkembangan Anak Usia Dini. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adioetomo, S. M., Pardede, L. P. (2020). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini – Pembangunan Manusia: Pendekatan Daur Hidup Dalam Konteks Bonus Demografi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- BAPPENAS. (2021). Roadmap SDGs Indonesia Menuju 2030. Dikutip dari Roadmap SDGs Indonesia Menuju 2030. http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf, diupload pada Februari 2021.

- BAPPENAS, BPS, UNICEF, PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Dikutip dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>, diakses online 16 Juni 2021.
- BAPPENAS dan KPPPA. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>, diakses online 22 Maret 2022.
- BKKBN. (2022). Merenungkan Hari Kartini: Angka Kematian Ibu dan TFR di masa Pandemi. Dikutip dari <https://www.bkkbn.go.id/berita-merenungkan-hari-kartini-angka-kematian-ibu-dan-tfr-di-masa-pandemi>. diakses online tanggal 12 Juni 2022.
- BPS. (2019). INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) INDONESIA 2019. Jakarta: BPS
- BPS. (2020). Pendidikan dan Kesehatan. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/28/1981/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html> <https://www.bps.go.id/indicator/30/1403/1/unmet-need-pelayanan-kesehatan-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>. diakses online tanggal 02 Juni 2021
- BPS. (2021). Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia-ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>. diakses online tanggal 12 Juni 2022
- BPS. (2021a). Sistem Informasi Rujukan Statistik. Dikutip dari <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1458>; <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/80>; dan <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/79>. diakses online tanggal 02 Juni 2021.
- BPS. (2021b). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. diakses online tanggal 02 Juni 2021
- BPS. (2021c). Sosial dan Kependudukan. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>. diakses online tanggal 02 Juni 2021.
- BPS. (2021d). Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi 2012-2017. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/30/1584/1/angka-kematian-bayi-akb-per-1000-kelahiran-hidup-menurut-provinsi.html>. diakses online tanggal 02 Agustus 2021

- BPS. (2022). Sosial dan Kependudukan. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>. diakses online tanggal 04 Juni 2022.
- Clark, Helen, dkk. (2020). A future for the world's children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission. *The Lancet Commissions*, 395, ISSUE 10224, 605-658, Published Online February 2020, DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32540-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32540-1), diakses 23 Agustus 2021.
- Collin, Matthew dan Weil, David N. 2019. The Effect of Increasing Human Capital Investment on Economic Growth and Poverty: A Simulation Exercise. *Bravo Working Paper # 2020-003*, BROWN – Orlando Bravo Center For Economic Research. dikutip dari <https://economics.brown.edu/sites/g/files/dprerj726/files/papers/Bravo%20Working%20Paper%202020-003.pdf>, diakses pada 17 Mei 2021
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, Shinta. (2009). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-140. Dikutip dari <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607/542>, diakses 25 Mei 2021.
- GLA. (2020). 8 Faktor Yang Mendasari Perkawinan Anak di Indonesia. Dikutip dari <https://glaindonesia.org/8-faktor-yang-mendasari-perkawinan-anak-di-indonesia/>, diakses 15 Juni 2022.
- ILO. (2007). Child labour wages and productivity: Results from demand-side surveys. Dikutip dari https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_092604/lang--en/index.htm, diakses pada 02 Juni 2021.
- ILO. (2009). Menghapuskan Pekerja Anak – Panduan Untuk Pengusaha: Panduan Satu, Pengenalan terhadap Permasalahan Pekerja Anak. Jakarta: ILO, dikutip dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_747329.pdf, diakses pada 02 Juni 2021.
- ILO. (2017). Global Estimates of Child Labour: Results and trends 2012-2016. New York: ILO, dikutip dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf, diakses online tanggal 02 Juni 2021.
- ILO dan UNICEF. (2021). Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward. ILO dan UNICEF: New York, dikutip dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf, diakses 13 September 2021.
- Kemdikbud. (2021). Pandemi Memicu Pernikahan Dini. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. dikutip dari <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/pandemi-memicu-pernikahan-dini>, diunggah 06 Mar 2021, diakses 14 September 2021.

- Kemenkes. (2019). Pencegahan Stunting Pada Anak. dikutip dari <https://promkes.kemkes.go.id/pencegahan-stunting>, diakses 14 Juni 2022.
- Kemenkes. (2021a). Dikutip dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/21112600001/tekan-angka-kematian-ibu-4-180-usg-portable-siap-tahun-depan.html>, diakses 28 Maret 2022.
- Kemenkes. (2021b). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020. Jakarta: Kemenkes.
- Kemenkes. (2021c). Dikutip dari <https://www.kemkes.go.id/index.php?txtKeyword=balita&act=search-by-map&pgnumber=0&charindex=W&strucid=1280&fullcontent=1&C-ALL=1>, diakses 17 Juni 2021.
- Kominfo. (2014). Siapa Mau Bonus Demografi? – Peluang Demografi Indonesia. Jakarta: Kominfo, dikutip dari https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/FA_Buku_Siapa_Mau_Bonus_Final_Web.pdf, diakses pada 14 Juni 2021 .
- KPAI. (2022). Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, dikutip dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada 04 April 2022.
- KPPPA. (2020). Pelanggaran Hak Anak, Perkawinan Anak Bukan Pilihan. Dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2685/pelanggaran-hak-anak-perkawinan-anak-bukan-pilihan>, dipublikasikan 20 Mei 2020, diakses 14 September 2021
- KPPPA. (2021a). Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta: KPPPA.
- KPPPA. (2021b). MUI dan Pemerintah Sepakat Deklarasikan Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia>, dipublikasikan 18 Maret 2021, diakses 14 September 2021
- KPPPA. (2021c). Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. Dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3248/indonesia-hadapi-tantangan-pekerja-anak-di-sektor-pertanian-lebih-dari-800-ribu-anak-terjebak-dalam-bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak>, dipublikasikan 24 Juni 2021, diakses 22 Maret 2022
- Lubis, Zulham H. dan Nurwati, Nunung. (2020). Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua. Prosiding Penelitian &

Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, Hal: 68 - 79, April 2020. dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/343144552_PENGARUH_PERNIKAHAN_USIA_DINI_TERHADAP_POLA_ASUH_ORANG_TUA, diakses 22 Maret 2022.

Maliki. (2017). Bonus Demografi Indonesia dan Kualitas Hidup Anak-Ending Childhood Violence. dikutip dari <https://www.ui.ac.id/bonus-demografi-indonesia-dan-kualitas-hidup-anak/>, diakses pada 17 Mei 2021

Mantovani, dkk. (2020). Higher Education 4.0 and the Readiness of Indonesia's Future Workforce. Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. https://www.researchgate.net/publication/351614576_Higher_Education_40_and_the_Readiness_of_Indonesia's_Future_Workforce, diakses pada 21 Maret 2022.

McKinsey & Company. (2019). Automation and the future of work in Indonesia: Jobs lost, jobs gained, jobs changed. McKinsey & Company. Dikutip dari <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/automation%20and%20the%20future%20of%20work%20in%20indonesia/automation-and-the-future-of-work-in-indonesia-vf.pdf>, diakses 17 Juni 2021.

Mirkin, Barry dan Weinberger, Mary Beth. (2021). The Demography Of Population Ageing. Dikutip dari https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd_egm_200002_weinbergermirkin.pdf, diakses 13 September 2021

Nugroho, Adityo. (2019). Persepsi Anak Muda Terhadap Keberadaan Lansia di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 2(2), dikutip dari www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi, diakses 18 Mei 2021.

Nurhadi. (2015). Child Labour In Rural Indonesia: Children And Parents' Perspectives. PhD thesis: University of York, dikutip dari <https://etheses.whiterose.ac.uk/9691/>, diakses 18 Mei 2021.

OECD. (2020). Learning remotely when schools close: How well are students and schools prepared? Insights from PISA. OECD Publishing, dikutip dari https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127063-iiwm328658&title=Learning-remotely-when-schools-close&ga=2.2778864.1965441380.1629959924-855691975.1624956337, diakses 23 Agustus 2021.

Pemerintah RI. (2020). LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024, Jakarta: Pemerintah RI.

PKBI. (2019). The First International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health kicks off in Yogyakarta. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. <https://pkbi.or.id/>

the-first-international-conference-on-indonesia-family-planning-and-reproductive-health-kicks-off-in-yogyakarta/, diakses pada 24 Agustus 2021.

- Rahiem, Maila D.H. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *The International Journal: Child Abuse & Neglect*, Volume 118, August 2021, 105168, dikutip dari <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>, diakses 22 Maret 2022.
- Riskesdas. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf, diakses 24 Agustus 2021.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antaprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160-172, dikutip dari <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.793>, diakses 23 Agustus 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dikutip dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/196.pdf>, diakses 22 Maret 2022.
- UNICEF. (2005). Early Marriage a Harmful Traditional Practice - A Statistical Exploration. New York, April 2005, dikutip dari <https://data.unicef.org/resources/early-marriage-a-traditional-harmful-practice-a-statistical-exploration/>, dikases pada 22 Maret 2022.
- UNICEF. (2021a). COVID-19: A threat to progress against child marriage. New York: UNICEF, dikutip dari <https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/>, diakses pada 24 Agustus 2021.
- UNICEF. (2021b). Child marriage - Child marriage threatens the lives, well-being and futures of girls around the world. UNICEF June 2021, dikutip dari <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>, dikases pada 22 Maret 2022.
- UNICEF. (2022). Children in Indonesia - The situation of children in Indonesia has improved, but disparities remain, dikutip dari <https://www.unicef.org/indonesia/children-indonesia>, dikases pada 22 Maret 2022.
- United Nation. (2021). Total Fertility Rate - Demographics & Population Change. Dikutip dari https://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/demographics/total_fertility_rate.pdf, diakses 13 September 2021
- World Bank. (2020). Human Capital Index 2020. Dikutip dari <https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Index>, diakses 17 Juni 2021

- World Bank. (2022a). Unemployment, total (% of total labor force); sumber data dari ILOSTAT database. Dikutip dari <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2020&locations=ID&start=1991>, diakses 15 Juni 2022
- World Bank. (2022b). Bank Dunia di Indonesia. Dikutip dari <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>, diakses 12 Juni 2022
- World Economic Forum. (2020). Future of Jobs 2020. Geneva: World Economic Forum. Dikutip dari https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf, dikases 17 Juni 2021.
- Yarrow, Noah dan Afkar, Rythia. (2020). Gender and Education In Indonesia: Progress With More Work To Be Done. Dikutip dari <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/gender-and-education-indonesia-progress-more-work-be-done>, diunggah 14 December 2020, dikases 17 Juni 2021.

<https://www.bps.go.id>





3

Penduduk Usia Produktif sebagai Aktor Utama Pembangunan Nasional

- A. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif di Indonesia
- B. Sebaran Penduduk Usia Produktif di Indonesia
- C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Indonesia
- D. Penduduk Usia Produktif dalam Pasar Tenaga Kerja
- E. Penduduk Usia Produktif menurut Generasi
- F. Kesimpulan
- G. Referensi



Persentase penduduk usia produktif terus meningkat. Hal ini menjadi potensi untuk mengoptimalkan bonus demografi apabila disertai dengan peningkatan kualitasnya.



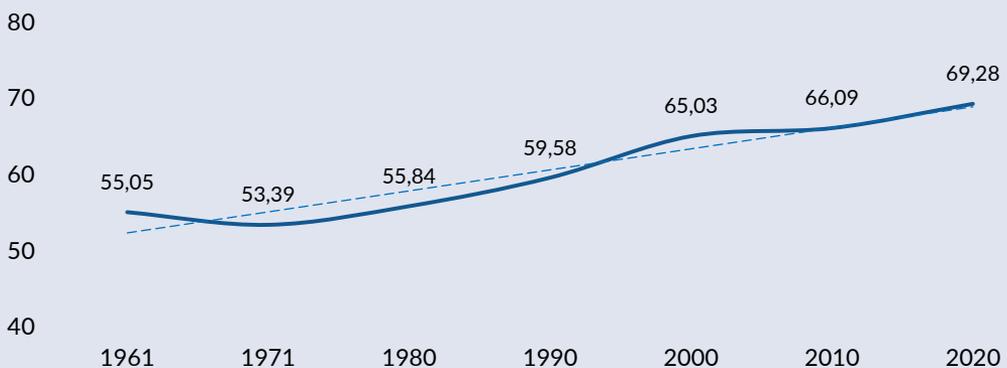
Penduduk Usia Produktif sebagai Aktor Utama Pembangunan Nasional

A. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif di Indonesia

Penduduk usia produktif memiliki kontribusi besar dalam perekonomian bangsa dengan berperan sebagai pekerja, pelaku usaha, atau pemilik modal. Jumlah penduduk usia produktif cenderung meningkat seiring waktu. Berdasarkan hasil sensus penduduk 1961 jumlah penduduk usia produktif adalah 53,4 juta jiwa dan pada tahun 2020 mencapai 187,2 juta jiwa, meningkat lebih dari 3 lipat.

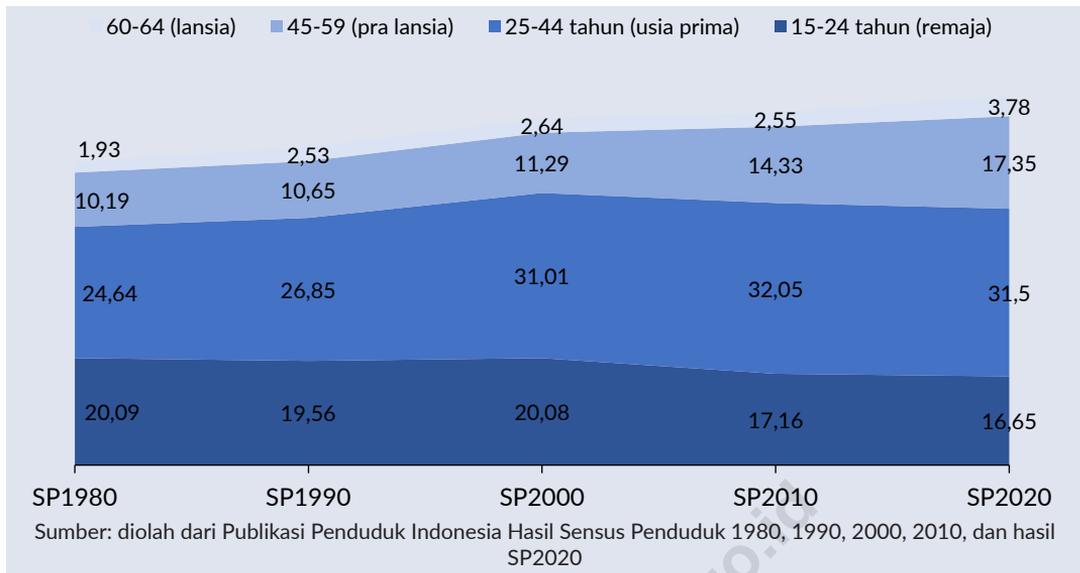
Seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif, persentase penduduk usia produktif juga meningkat. Pada tahun 1961 persentase penduduk usia produktif adalah 55,05 persen dan pada tahun 2020 mencapai 69,28 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia (Gambar 1). Sejak tahun 2012 hingga 2035 diperkirakan persentase penduduk usia produktif mencapai dua kali lebih besar dibandingkan usia non-produktif.

Dibandingkan 10 tahun yang lalu, peningkatan persentase penduduk usia produktif terjadi pada kelompok umur lansia (60-64 tahun) dan pra lansia (45-59 tahun), sedangkan kelompok umur remaja (15-24 tahun) dan prima (25-44 tahun) turun. Hasil SP 1980 hingga SP 2020 menunjukkan bahwa penurunan persentase kelompok remaja terjadi terus dari waktu ke waktu (Gambar 2). Hal ini merupakan hasil dari program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak beberapa tahun sebelumnya.



Sumber: diolah dari Bappenas (2019); BPS (2021a); dan hasil SP2020

Gambar 1. Persentase Penduduk Usia Produktif (persen), 1961-2020



Gambar 2. Komposisi Penduduk Usia Produktif menurut Kelompok Umur, 1980-2020 (persen)

Meskipun persentase penduduk usia produktif terus meningkat, namun Meskipun persentase penduduk usia produktif terus meningkat, tetapi pertumbuhannya melambat. Proyeksi penduduk berdasarkan hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa peningkatan persentase penduduk usia produktif diperkirakan berlangsung sampai tahun 2022. Penurunan persentase penduduk usia produktif sejak tahun 2023 diikuti oleh peningkatan persentase penduduk usia nonproduktif sehingga meningkatkan angka ketergantungan. Beban ketergantungan Indonesia diprediksi meningkat dari 45,42 persen pada tahun 2022 menjadi 45,47 persen pada tahun 2023. Apabila tidak ada perubahan yang berarti, peningkatan angka beban ketergantungan ini menjadi terus berlangsung dan Indonesia akan mengakhiri era bonus demografi sekaligus memasuki penuaan penduduk pada kondisi angka ketergantungan sudah melebihi 50.

Menjelang usia kemerdekaan Indonesia yang ke-100, yang jatuh pada tahun 2045 jumlah usia produktif di Indonesia berdasarkan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015 diprediksi akan mencapai 207,9 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN (Kemendikbud, 2017). Dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar di tingkat ASEAN, Indonesia berpotensi mengisi kebutuhan tenaga kerja untuk negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya turun, seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia.

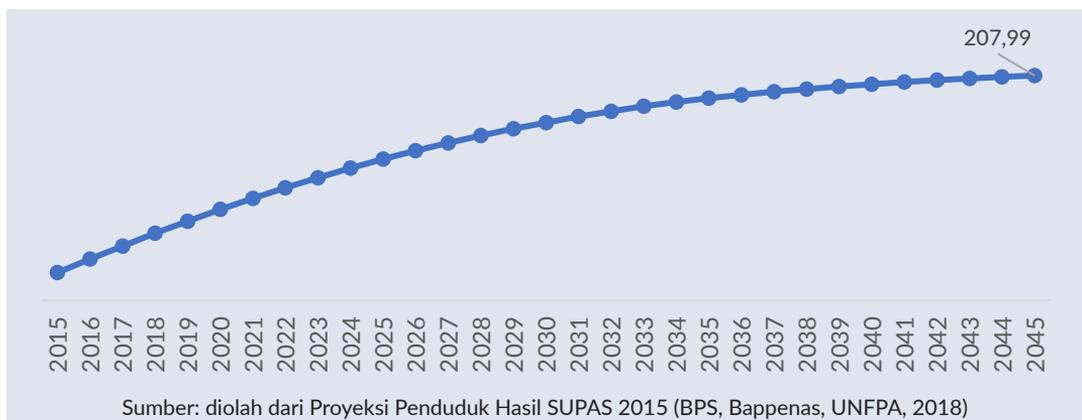
Di tingkat global, Indonesia diprediksi berpeluang menjadi salah satu dari 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Laporan PBB memprediksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 sebanyak 318 juta orang dengan capaian PDB per kapita sebesar 29 ribu dolar AS per tahun (Kemendikbud, 2017). Akumulasi dari bonus demografi selama beberapa tahun sebelumnya diperkirakan akan mengangkat perekonomian Indonesia melalui peningkatan produksi, konsumsi, tabungan, dan investasi, serta kapasitas SDM dan teknologi, sehingga PDB Indonesia diprediksi bisa berada pada peringkat ke-4 dunia pada tahun 2045.

Besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia bersumber dari jumlah penduduk yang besar yang sebagian besar diantaranya tergolong *consuming class*, yaitu sebanyak 258 juta jiwa atau 80 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Kemendikbud, 2017). Kondisi ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan melalui penguasaan pasar domestik oleh produk dalam negeri, agar aliran ekonomi dari transaksi produksi, konsumsi, dan investasi dapat dinikmati dan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia.

Potensi penduduk usia produktif harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diupayakan solusinya agar tidak menghambat pemanfaatan potensi tersebut. Pada tahun 2045 diprediksi sebanyak 14,08 persen penduduk Indonesia adalah lansia. Kualitas dan kesejahteraan lansia pada masa yang akan datang perlu menjadi perhatian yang serius saat ini, sehingga dapat hidup sejahtera dan tetap bisa berkontribusi dalam pembangunan.

Selain isu penuaan penduduk, peningkatan penduduk perkotaan juga bisa menjadi masalah. Tingginya urbanisasi yang tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang sesuai berpeluang menimbulkan berbagai permasalahan sosial maupun ekonomi di tengah masyarakat perkotaan. Salah satu masalah ekonomi yang akan muncul adalah pengangguran. Selain karena urbanisasi, pengangguran dapat muncul karena perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti oleh tenaga kerja. Masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di satu sisi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja, khususnya untuk pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin. Namun demikian, di sisi yang lain juga akan menimbulkan perubahan kebutuhan masyarakat sehingga berbagai pekerjaan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi akan bermunculan menggantikan jenis pekerjaan lama yang sudah tidak relevan.

Untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti sebaran penduduk usia produktif antarwilayah yang belum merata, kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, serta kondisi pasar tenaga kerja yang masih memerlukan perhatian pada penyediaan lapangan kerja dan usaha yang akan diulas lebih lanjut pada bab ini.



Gambar 3. Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif di Indonesia 2015-2045 (Juta Jiwa)

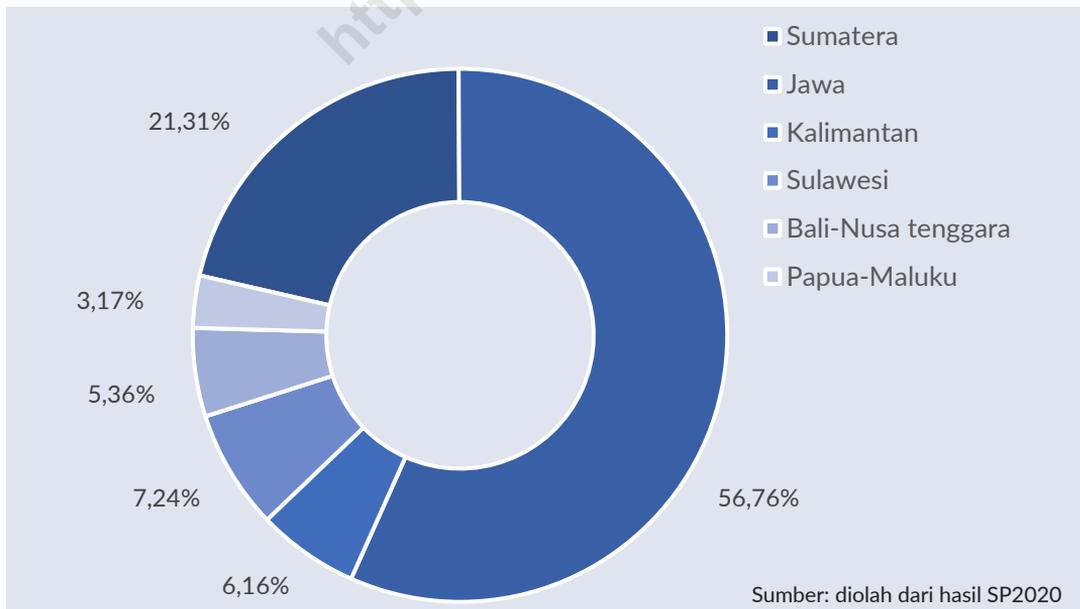
B. Sebaran Penduduk Usia Produktif di Indonesia

Keseimbangan demografis berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Penduduk usia produktif sebagai agen pembangunan diharapkan terdistribusi secara merata dan proporsional, sehingga aktivitas ekonomi juga dapat terdistribusi di seluruh wilayah. Dengan demikian, pembangunan menjadi tidak akan terpusat di wilayah tertentu saja, melainkan merata di seluruh wilayah. Dengan adanya sebaran yang merata, maka manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.

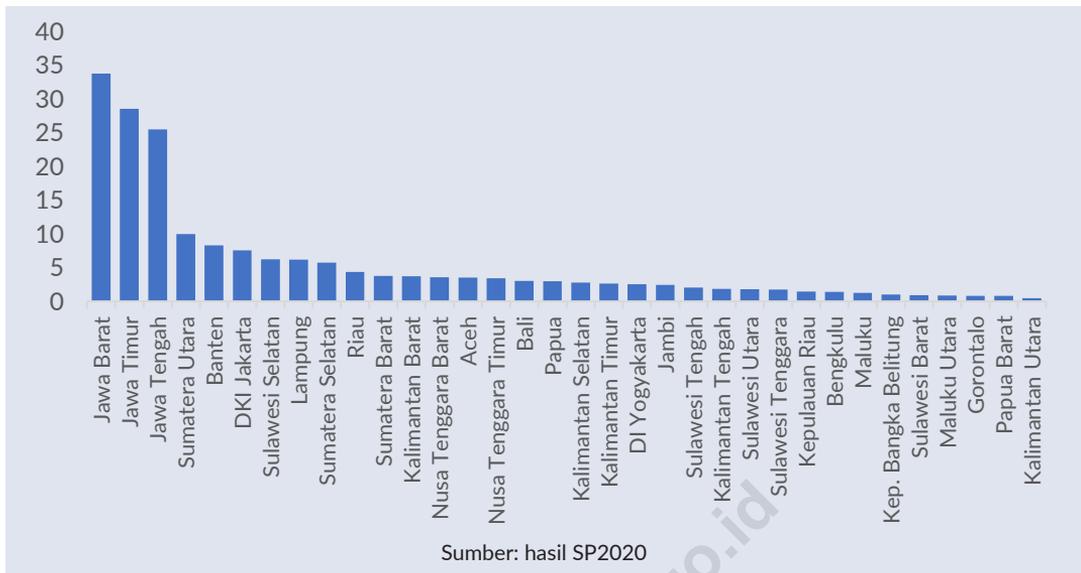
Pada tahun 2020 sebagian besar penduduk usia produktif menghuni Pulau Jawa. Jumlah penduduk usia produktif yang menghuni Pulau Jawa mencapai lebih dari separuh total penduduk usia produktif Indonesia, yaitu sebanyak 56,76 persen (Gambar 4). Sebaran ini terlihat kurang merata mengingat luas wilayah Pulau Jawa yang hanya 6,72 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sementara pulau lain dengan wilayah yang lebih luas justru dihuni oleh penduduk usia produktif yang lebih sedikit

Jumlah penduduk usia produktif terbesar di tingkat provinsi berada di Jawa Barat, yaitu sebanyak 18,04 persen (Gambar 5). Setelah Jawa Barat, provinsi lainnya di Pulau Jawa juga memiliki jumlah penduduk usia produktif yang banyak. Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-2 dan Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke-3. Adapun jumlah penduduk usia produktif yang paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebanyak 492.186 jiwa atau 0,26 persen total penduduk usia produktif di Indonesia.

Sebaran penduduk usia produktif menurut provinsi ini belum selaras dengan kontribusi luas wilayahnya. Sebanyak 18,04 persen penduduk usia produktif di Jawa Barat hanya menghuni 1,85 persen luas wilayah Indonesia. Sebaliknya, Papua



Gambar 4. Persentase Penduduk Usia Produktif menurut Pulau (persen), 2020



Gambar 5. Sebaran Penduduk Usia Produktif menurut Provinsi (Juta Jiwa), 2020

sebagai provinsi dengan wilayah terluas, yaitu mencapai 16,67 persen luas wilayah Indonesia hanya dihuni oleh 1,6 persen penduduk usia produktif

Dengan mengetahui komposisi dan sebaran penduduk usia produktif, pemerintah dapat memetakan potensi penduduk usia produktif di seluruh wilayah, sehingga masing-masing wilayah dapat memanfaatkan bonus demografi dengan lebih optimal.

C. Kualitas Penduduk Usia Produktif Indonesia

Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi membutuhkan kualitas yang baik dari penduduk usia produktif. Dari sisi pendidikan, kualitas penduduk usia produktif menunjukkan adanya peningkatan. Data susenas menunjukkan bahwa angka buta huruf penduduk usia produktif pada tahun 2020 jauh lebih rendah dari kondisi 2010. Peningkatan kemampuan baca tulis penduduk usia produktif ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, baik perkotaan maupun perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi sekolah penduduk usia produktif juga mengalami peningkatan dengan rata-rata lama sekolah yang lebih lama 1 tahun dibanding kondisi tahun 2010. Secara rata-rata penduduk usia produktif pada tahun 2020 setidaknya mengenyam bangku SMA/Sederajat.

Kondisi pendidikan yang membaik ini diikuti dengan tingkat melek teknologi yang baik. Data susenas 2020 menunjukkan terdapat sebanyak 76,07 persen penduduk usia produktif yang memiliki/menguasai *handphone*. Sementara pengguna komputer ada sebanyak 16,60 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi 10 tahun sebelumnya, pengguna internet mengalami peningkatan yang signifikan dari 13,06 persen menjadi 61,61 persen (Tabel 1).

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, Indonesia perlu memperhatikan posisinya di tingkat global, agar peningkatan kualitas sumber daya

Tabel 1. Perbandingan Indikator Kualitas Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) Tahun 2010 dan 2020

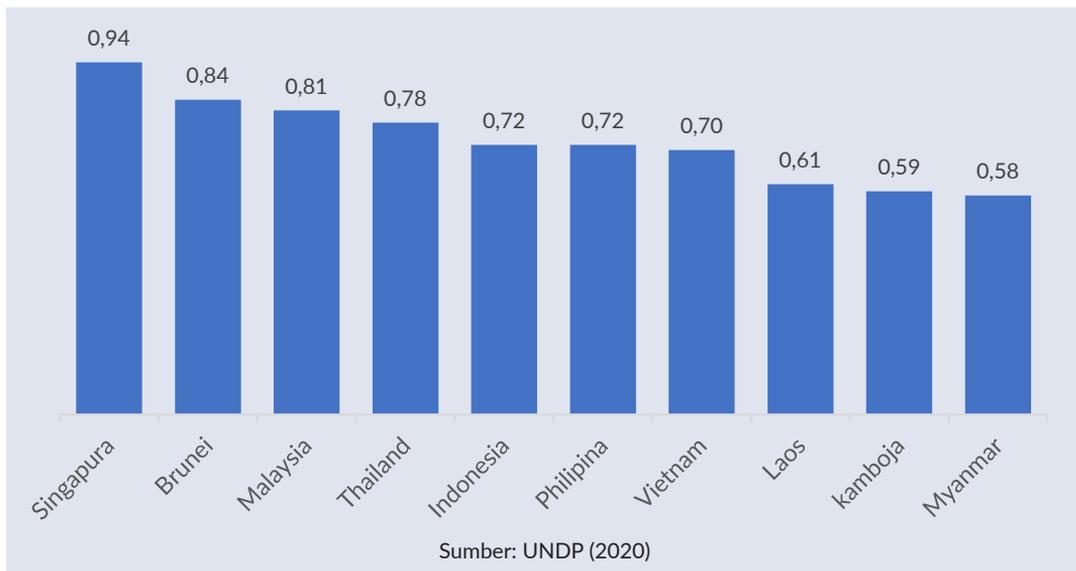
Indikator	Satuan	Tahun 2010	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka buta huruf	Persen	4,63	2,36
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,29	9,28
Persentase pengguna internet	Persen	13,06	61,61

Sumber: diolah dari Susenas 2010 dan 2020

manusia Indonesia mampu menopang peningkatan daya saing Indonesia di level internasional. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan posisi Indonesia di tingkat global, salah satunya adalah *Human Development Index* (HDI) untuk melihat posisi pembangunan manusia Indonesia di tataran global.

Berdasarkan HDI terakhir yang dihasilkan oleh UNDP, pembangunan manusia Indonesia diketahui masih termasuk kategori tinggi. HDI Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 107 dari 189 negara (UNDP, 2020). Capaian HDI Indonesia ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan 1,1 persen setiap tahun selama tahun 1990-2019. Keberhasilan peningkatan HDI Indonesia juga tercermin dari peringkat capaian HDI Indonesia di tahun 2019 yang meningkat sebanyak enam peringkat dibanding tahun 2010.

Di lingkup ASEAN, pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat 5 dari 10 negara ASEAN (Gambar 6). Dari semua komponen HDI, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapura. Sementara itu, dibandingkan negara lainnya di ASEAN, perbandingan capaian HDI berbeda untuk masing-masing indikator komponen penyusun HDI. Sebagai contoh, HDI Indonesia lebih rendah dari Thailand dengan selisih peringkat cukup jauh, tapi indikator rata-rata lama sekolah (RLS) Indonesia lebih baik dari Thailand. Sebaliknya, meskipun HDI Indonesia lebih tinggi dari

**Gambar 6. Capaian HDI Negara ASEAN Tahun 2019**

Vietnam, tapi Usia Harapan Hidup (UHH) dan RLS Vietnam lebih tinggi dari Indonesia. Begitu juga dengan Filipina, meskipun memiliki HDI yang lebih rendah dari Indonesia, tetapi memiliki RLS yang lebih tinggi dari Indonesia.



Berdasarkan GEI, posisi kemampuan berwirausaha Indonesia berada di urutan 75 dari 137 negara yang diamati

Kualitas manusia Indonesia juga dapat dilihat melalui indikator *Global Entrepreneurship Index* (GEI) dan *Global Innovation Index* (GII). Data GEI menunjukkan posisi kemampuan berwirausaha Indonesia berada di urutan 75 dari 137 negara dengan skor 26,0 (GEDI, 2019). Peringkat dan skor GEI Indonesia ini meningkat dibanding tahun 2018 (skor 21,0 peringkat 94). Sementara itu, data GII menunjukkan bahwa inovasi

Indonesia pada tahun 2020 menempati peringkat 85 dari 131 negara (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020). Peringkat ini tidak berubah dibanding tahun 2019. Pilar dengan capaian peringkat terendah pada GII Indonesia adalah pilar kemutakhiran bisnis, yang utamanya disebabkan oleh rendahnya capaian indikator tenaga kerja, yaitu peringkat 125 dari 131 negara.

Tolok ukur lain dari kualitas penduduk usia produktif antarnegara dapat dilihat dari tingkat daya saing. Peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2020 menurut *World Competitiveness Yearbook* (WCY), berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Institute Management Development* (IMD) mengalami penurunan. Hasil survey WCY 2020 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 40, turun 8 peringkat dari tahun sebelumnya (IMD, 2021). Semua faktor pembentuk *world competitiveness ranking* Indonesia turun, yang mana penurunan terdalam terjadi pada faktor efisiensi bisnis.

Saat ini, digitalisasi sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. IMD secara rutin menghitung daya saing digital negara. Daya saing digital Indonesia tahun 2020 tidak berubah dibanding tahun sebelumnya. Dari 3 komponen, hanya faktor kesiapan masa depan yang meningkat peringkatnya, sedangkan 2 faktor lain, yaitu pengetahuan dan teknologi mengalami penurunan peringkat (IMD, 2020).



Produktivitas tenaga kerja dan jam kerja Indonesia tahun 2019 menempati peringkat 13 dari 21 negara yang tergabung dalam APO (*Asian Productivity Organization*).

Gambaran daya saing tenaga kerja Indonesia juga dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja. Dalam APO *Productivity Databook 2021*, produktivitas tenaga kerja dan jam kerja Indonesia tahun 2019 menempati peringkat 13 dari 21 negara yang tergabung dalam APO (APO, 2021). Dalam lingkup ASEAN, produktivitas tenaga kerja dan jam kerja Indonesia menempati peringkat 4 dari 8 negara ASEAN yang tergabung dalam APO.

Peningkatan produktivitas bisa menjadi langkah awal peningkatan daya saing. Terkait dengan hal ini, Bank Dunia menghitung *Human Capital Index* (HCI) untuk melihat bagaimana peran pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitas ke depannya. Pada tahun 2020, HCI Indonesia sebesar 0,54, berada pada peringkat 96 dari 175 negara, atau peringkat 6 dari 10 negara ASEAN (World Bank, 2020).

D. Penduduk Usia Produktif dalam Pasar Tenaga Kerja

Kontribusi penduduk usia produktif dalam pembangunan terlihat melalui keterlibatannya dalam pasar kerja. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas), penduduk usia produktif pada kelompok usia remaja memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah. Hal ini terjadi karena mereka masih berada pada usia sekolah. Partisipasi kerja penduduk usia produktif semakin besar pada kelompok usia berikutnya hingga partisipasi tertinggi terjadi pada kelompok usia 35-54 tahun. Selanjutnya partisipasi kerja kembali menurun pada kelompok usia 55-64 tahun.

Tingkat partisipasi kerja penduduk usia produktif meningkat 0,09 persen poin pada tahun 2020. Apabila dirinci menurut kelompok umur, peningkatan partisipasi kerja penduduk usia produktif ini terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun (meningkat 0,22 persen poin) dan 55-64 tahun (meningkat 1,42 persen poin). Sementara partisipasi penduduk usia produktif yang berusia 35-54 tahun konstan di 79,71 persen. Adapun partisipasi penduduk usia produktif pada kelompok umur 25-34 mengalami penurunan 0,85 persen poin dibanding tahun 2019.

Penduduk usia produktif yang berpartisipasi dalam angkatan kerja tersebut cukup banyak yang terserap dalam pasar kerja. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, setiap 100 angkatan kerja penduduk usia produktif, 93 orang diantaranya berstatus tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja penduduk usia produktif pada tahun 2020 ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan



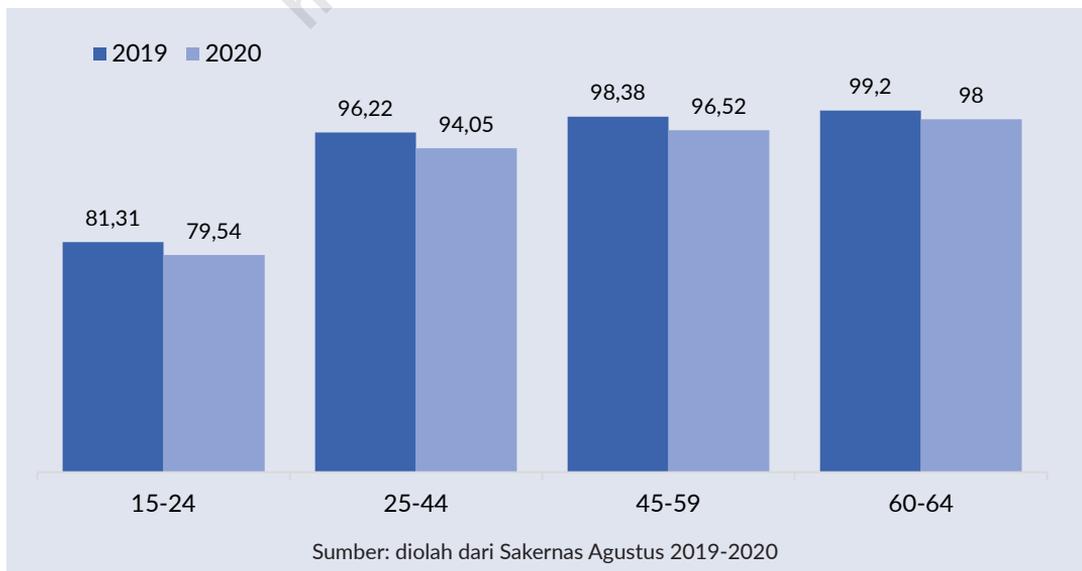
Gambar 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Usia Produktif (15-64), Tahun 2011-2020 (persen)

penyerapan tenaga kerja penduduk usia produktif pada tahun 2020 ini terjadi di semua kelompok umur. Penyebaran COVID-19 yang mulai meluas pada akhir Triwulan I 2020 menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa perusahaan bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja karena kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi. Akibatnya, tingkat kesempatan kerja usia produktif turun dari 94,51 persen pada tahun 2019 menjadi 92,58 persen di tahun 2020.

Tingkat partisipasi kerja (TKK) Indonesia di tingkat provinsi berada pada rentang 88,98 sampai 96,57 persen. Dari 34 provinsi, 6 provinsi diantaranya memiliki TKK yang lebih rendah dari capaian nasional. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, TKK penduduk usia produktif perempuan lebih tinggi dari laki-laki dengan selisih 1,08 persen poin pada level nasional.

TKK cenderung meningkat seiring dengan usia (Gambar 8). Tingkat kesempatan kerja terendah berada pada kelompok usia remaja (15-24 tahun) dan tingkat kesempatan kerja tertinggi berada pada kelompok usia lansia (60-64 tahun). Rendahnya TKK kelompok usia remaja dimungkinkan terjadi karena kelompok umur tersebut sebagian diantaranya masih menjalani sekolah. Secara umum kondisi TKK menurut kelompok umur tahun 2020 lebih rendah dibandingkan 2019, tetapi dengan pola yang hampir sama.

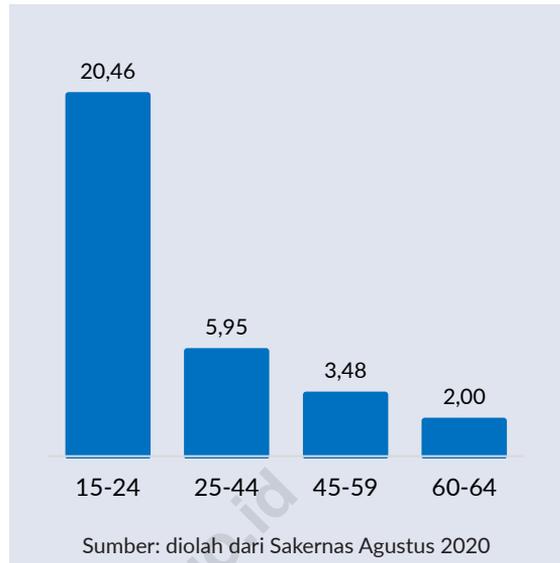
Menurunnya tingkat kesempatan kerja penduduk usia produktif di pasar kerja tahun 2020 menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif yang menganggur. Pengangguran terbuka (TPT) menggambarkan kondisi yang berkebalikan dengan TKK. Data sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa setiap 100 angkatan kerja usia produktif pada tahun 2020, 7 orang diantaranya adalah pengangguran. Tingkat pengangguran semakin sedikit seiring dengan bertambahnya umur (Gambar 9). Penduduk usia produktif yang menganggur paling banyak pada kelompok usia remaja (15-24 tahun), yaitu sebesar 20,46 persen dan paling sedikit pada kelompok usia lansia (60-64 tahun), yaitu sebesar 2 persen.



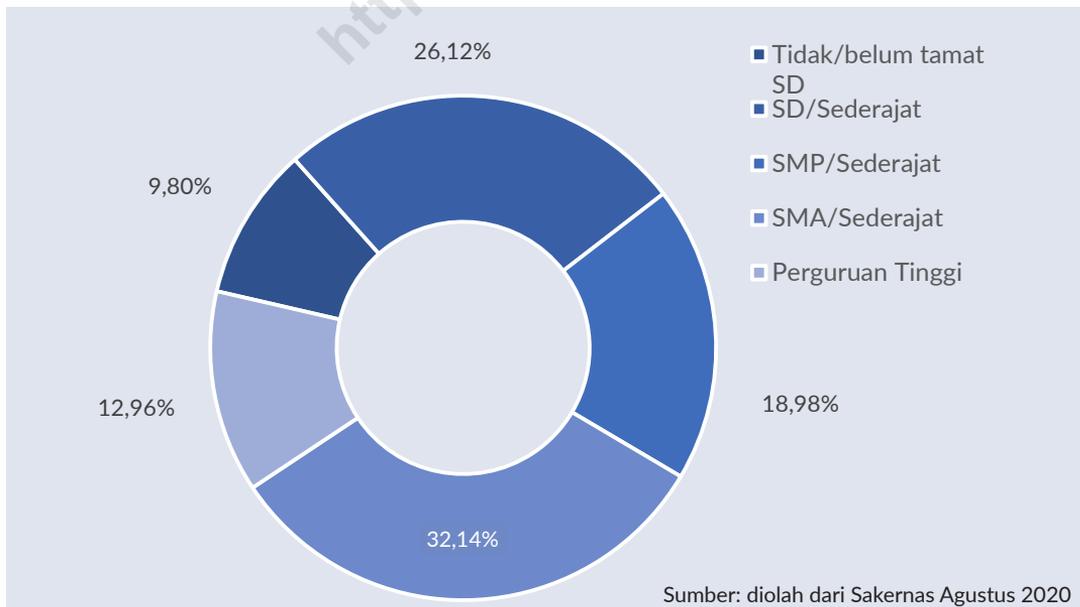
Gambar 8. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK, Persen) Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) menurut Kelompok Umur Tahun 2019 dan 2020

Peran penduduk usia produktif dalam ketenagakerjaan Indonesia masih terkendala masalah kualitas tenaga kerja penduduk usia produktif. Berdasarkan Sakernas Agustus 2020, diketahui masih terdapat tenaga kerja usia produktif yang belum pernah sekolah, yaitu sebanyak 1,15 persen. Bahkan, tenaga kerja usia produktif yang seyogyanya masih duduk di bangku sekolah, yaitu berumur 15-24 tahun, juga ada yang belum pernah sekolah (0,42 persen). Tenaga kerja usia produktif pada tahun 2020 didominasi oleh lulusan SMP/Sederajat ke bawah dengan lulusan SD/Sederajat sebanyak 26,12 persen (Gambar 10).

Masalah kualitas yang mencakup pendidikan dan keahlian ini kemudian berimbas kepada masalah pengangguran. Peningkatan pendidikan dan keahlian saja masih belum cukup jika tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 13,65 persen angkatan kerja usia produktif lulusan SMK yang menganggur. Sebagai lulusan sekolah yang memang diperuntukkan terjun langsung ke pasar kerja, daya serap tenaga kerja lulusan SMK diharapkan dapat semaksimal mungkin. Namun, fakta ini menunjukkan adanya *mismatch*



Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) menurut Kelompok Umur Tahun 2020 (persen)



Gambar 10. Persentase Tenaga Kerja Usia Produktif menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2020 (persen)



Gambar 11. TPT menurut Provinsi dan Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2020 (Persen)

antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, peningkatan kualitas layanan pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Begitu juga dengan penguasaan *soft skills* yang mendukung pekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim juga belum difasilitasi dalam pembelajaran (Pemerintah RI, 2020).

Apabila dikelompokkan berdasarkan wilayah, pengangguran terbuka terbanyak berada di wilayah perkotaan. Dominasi TPT di wilayah perkotaan ini terjadi di semua provinsi (Gambar 11). Pada level nasional, selisihnya cukup besar. Pada tahun 2020, TPT di wilayah perkotaan lebih tinggi 4,31 persen poin dibanding wilayah perdesaan. Kondisi ini bisa bertahan lama jika urbanisasi terus terjadi tanpa disertai kebijakan yang efektif, khususnya dalam mengatasi masalah kualitas pelaku urbanisasi.

Sebagai sumber daya manusia yang diharapkan di masa depan, kondisi pengangguran pada penduduk usia muda juga sangat membutuhkan perhatian. Indikator NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) menunjukkan pada tahun 2020 terdapat 24,28 persen penduduk usia muda yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan (BPS, 2021c). Penduduk usia muda dengan kondisi ini jika tidak teratasi dapat memunculkan berbagai masalah pembangunan.

E. Penduduk Usia Produktif menurut Generasi

Dengan cakupan rentang usia yang cukup besar, penduduk usia produktif memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut dipengaruhi oleh pengalaman dan perkembangan zaman. Dalam memudahkan pemahaman

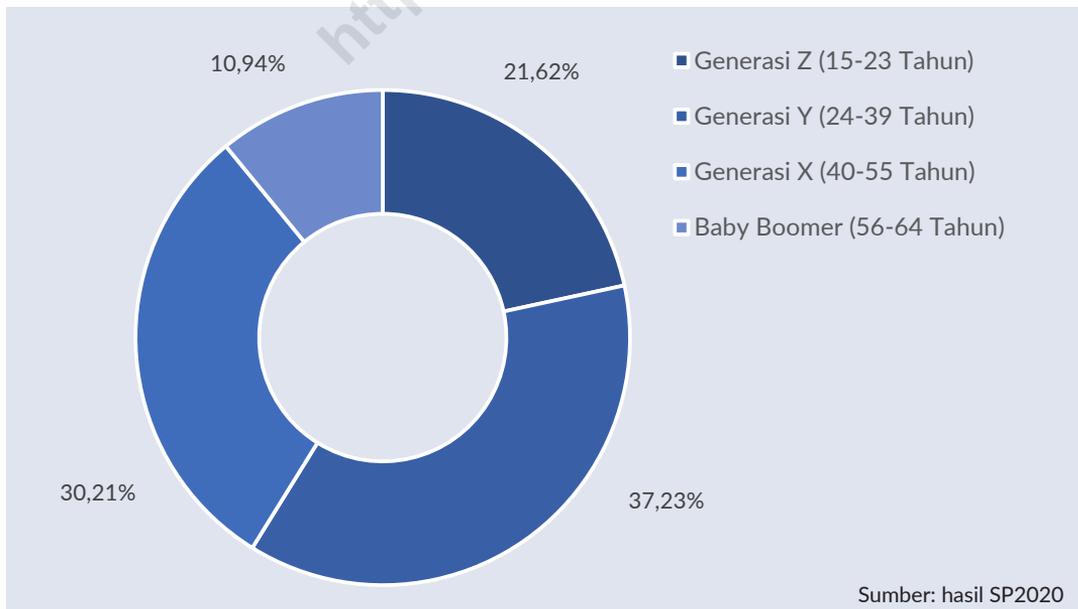
Tabel 2. Pengelompokan Generasi Penduduk menurut William H. Frey

No	Generasi	Tahun Lahir	Usia tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Post Generasi Z	2013-sekarang	0 – 7 Tahun
2	Generasi Z	1997-2012	8 – 23 Tahun
3	Generasi Y (Milenial)	1981-1996	24 – 39 Tahun
4	Generasi X	1965-1980	40 – 55 Tahun
5	Generasi Baby Boomer	1946-1964	56 – 74 Tahun
6	Generasi Pre-Boomer	Sebelum tahun 1945	75+ Tahun

Sumber: William H. Frey analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020) dikutip dari BPS (2021a)

terkait karakteristik penduduk, para ahli mengelompokkan penduduk berdasarkan beberapa generasi menurut periode tahun lahir. Penduduk yang lahir pada rentang tahun tertentu dianggap memiliki karakteristik yang sama. Sebaliknya, generasi yang lahir pada periode waktu yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula. Hal ini disebabkan pengalaman historis yang dialami oleh penduduk pada generasi tertentu memengaruhi fase pertumbuhan mereka (Kupperschmidt, 2000).

Salah satu teori pengelompokan generasi dikemukakan oleh William H. Frey yang membagi penduduk ke dalam enam generasi, seperti yang ditunjukkan Tabel 2. Dari enam generasi ini, penduduk usia produktif tersebar di empat generasi, yaitu generasi *Baby Boomer*, X, Y, dan Z. Jika diurutkan dari usia yang paling kecil, penduduk usia produktif termuda berada pada generasi Z. Generasi ini lahir pada rentang tahun 1997 sampai 2012 atau berusia 8 hingga 23 tahun pada tahun 2020. Namun, yang termasuk penduduk usia produktif berada pada berusia 15-23 tahun.



Gambar 12. Persentase Penduduk Usia Produktif Indonesia menurut Generasi Tahun 2020 (persen)

Selanjutnya adalah generasi Y atau milenial. Generasi ini lahir pada rentang tahun 1981 sampai 1996 atau berusia 24-39 tahun pada tahun 2020. Berikutnya adalah generasi X, yaitu yang lahir pada rentang tahun 1965 sampai 1980 atau berusia 40-55 tahun pada tahun 2020. Terakhir adalah generasi *Baby Boomer*. Generasi ini lahir pada rentang tahun 1946 sampai 1964 atau berusia 56-74 tahun pada tahun 2020. Sama halnya dengan generasi Z, tidak semua generasi ini termasuk penduduk usia produktif, yaitu hanya mereka yang berusia 56-64 tahun.

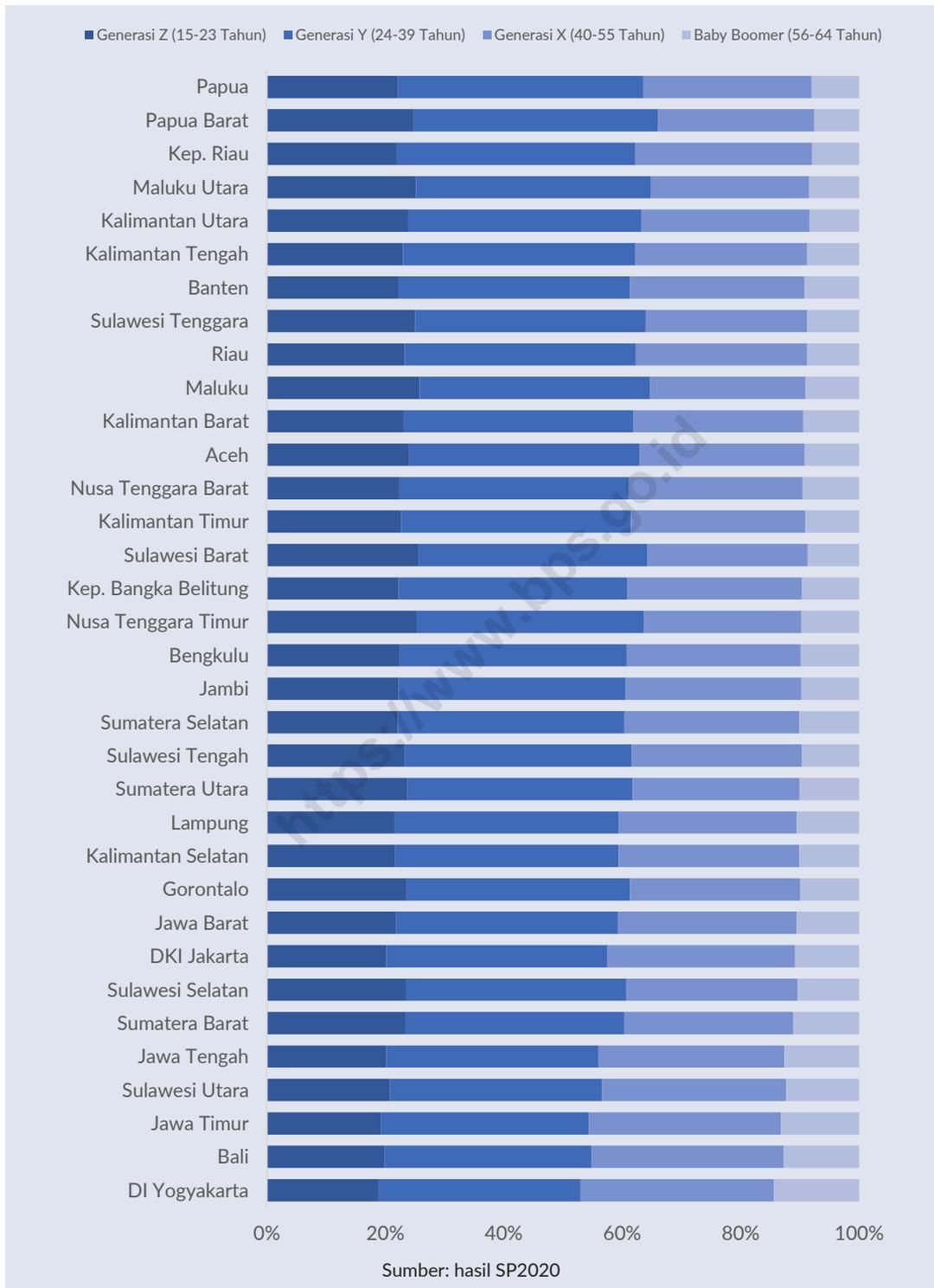
Mayoritas penduduk usia produktif Indonesia pada tahun 2020 tergolong dalam generasi Y, yaitu sebanyak 37,23 persen (Gambar 12). Selanjutnya, jumlah penduduk usia produktif terbanyak kedua tergolong ke dalam generasi X sebanyak 30,21 persen, kemudian generasi Z sebanyak 21,62 persen, dan yang paling sedikit tergolong ke dalam generasi *Baby Boomer*, yaitu sebanyak 10,94 persen. Urutan jumlah penduduk usia produktif menurut generasi dari yang terbanyak hingga terkecil ini juga terjadi di masing-masing Provinsi.

Sebaran penduduk usia produktif menurut provinsi di masing-masing generasi tidak berbeda jauh. Penduduk usia produktif di masing-masing generasi paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, sedangkan yang paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Utara, Gorontalo, Papua Barat, dan Maluku Utara. Namun, tidak demikian ketika persentase penduduk usia produktif suatu generasi direlatifkan terhadap total penduduk usia produktif di masing-masing provinsi. Jika direlatifkan terhadap total penduduk usia produktif di masing-masing provinsi ditemukan bahwa generasi Z paling banyak berada di Provinsi Maluku, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian generasi Y paling banyak berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Sementara generasi X dan *Baby Boomer* paling banyak berada di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Gambar 13 menunjukkan variasi persentase penduduk usia produktif relatif menurut generasi di setiap provinsi. Gambar tersebut diurutkan dari persentase generasi Y terbesar, sehingga dapat dilihat bahwa Provinsi DI Yogyakarta memiliki persentase penduduk usia produktif pada generasi Y yang paling sedikit dibanding provinsi lainnya. Selain itu, persentase generasi Z-nya juga paling sedikit. Sementara, proporsi generasi X dan *Baby Boomer*-nya paling besar dibanding provinsi lainnya. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Yogyakarta secara proporsi lebih tua dibanding provinsi lainnya.

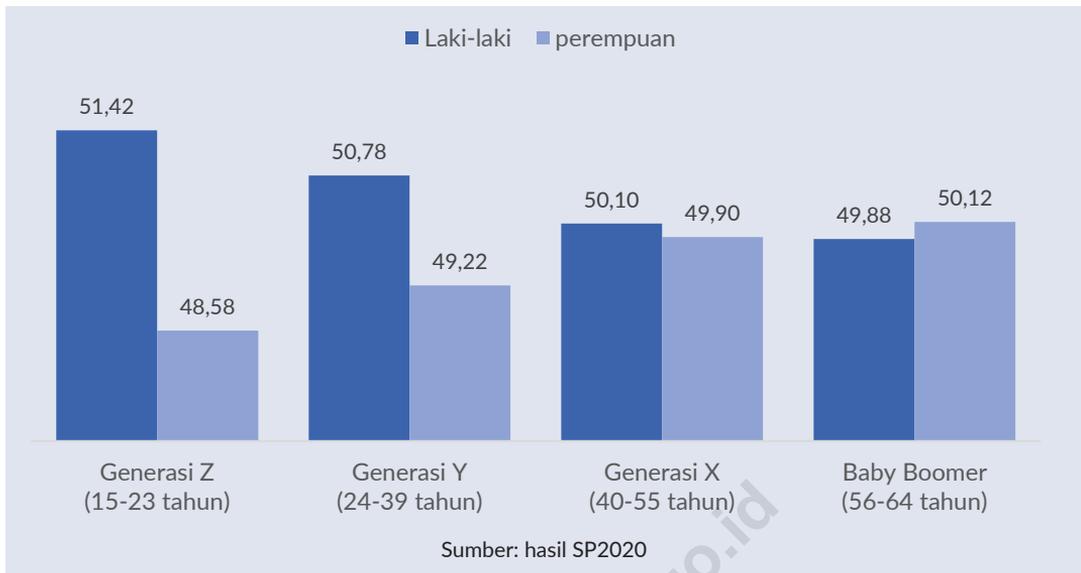


Semakin tua generasi, maka persentase penduduk usia produktif perempuan semakin tinggi.

Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, semakin tua generasi, maka persentase penduduk usia produktif perempuan semakin tinggi, dan sebaliknya untuk penduduk usia produktif laki-laki. Penduduk usia produktif laki-laki pada generasi X, Y, dan Z pada tahun 2020 lebih banyak daripada penduduk usia produktif perempuan. Sementara pada generasi *Baby Boomer*, penduduk usia produktif perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki.



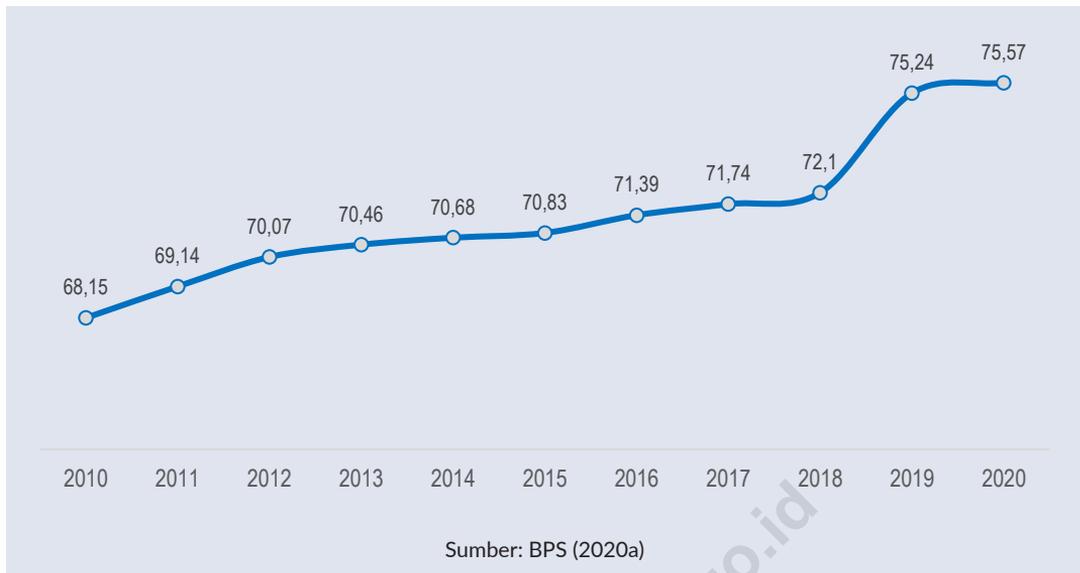
Gambar 13. Persentase Penduduk Usia Produktif Setiap Generasi terhadap Total Penduduk Usia Produktif di Masing-masing Provinsi di Indonesia (persen), 2020



Gambar 14. Proporsi Penduduk Usia Produktif menurut Jenis Kelamin di Masing-masing Generasi (persen), 2020

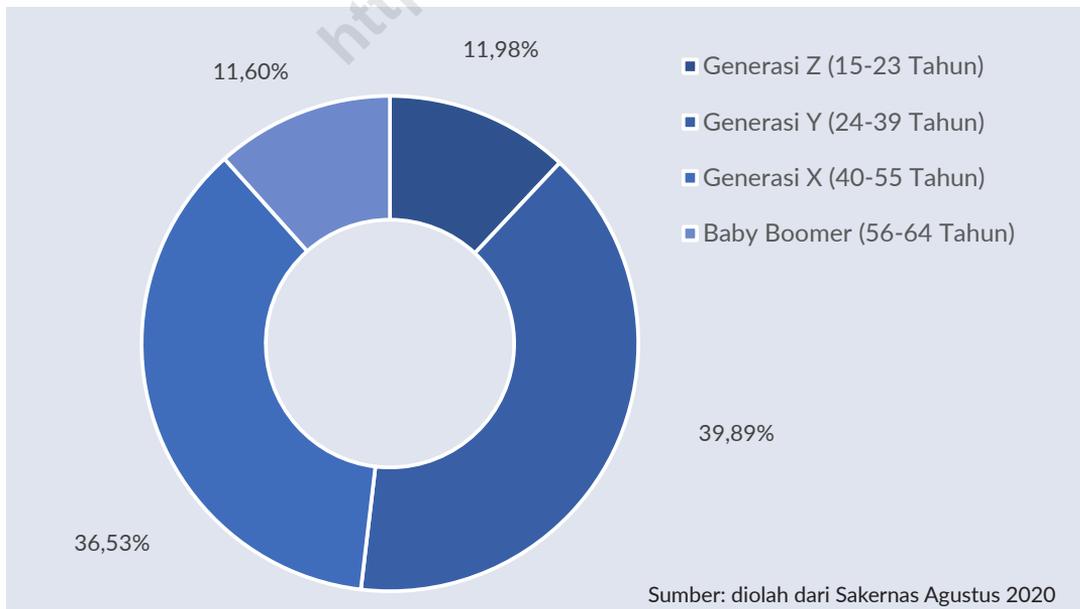
Dominasi penduduk usia produktif laki-laki di generasi X, Y, dan Z juga terjadi di beberapa provinsi. Pada generasi Z, dominasi penduduk usia produktif laki-laki terjadi di semua provinsi. Pada generasi Y, dominasi penduduk usia produktif laki-laki terjadi di 32 provinsi, sedangkan 2 provinsi lainnya, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah penduduk usia produktif perempuan yang sedikit lebih banyak, yaitu 50,47 persen di Nusa Tenggara Barat dan 50,28 persen di Nusa Tenggara Timur. Pada generasi X, hanya 23 dari 34 provinsi yang didominasi oleh penduduk usia produktif laki-laki. Sementara itu, 11 provinsi lainnya (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku) memiliki penduduk usia produktif perempuan yang sedikit lebih banyak. Pada generasi *Baby Boomer*, hanya 20 dari 34 provinsi yang didominasi oleh penduduk usia produktif laki-laki. Sementara 14 provinsi lainnya (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku) memiliki penduduk usia produktif perempuan yang sedikit lebih banyak.

Dominasi penduduk usia produktif perempuan pada generasi X dan *Baby Boomer* di beberapa provinsi menunjukkan bahwa perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang dibanding laki-laki. Pada tahun 2020, Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk perempuan Indonesia adalah 73,46 tahun, lebih tinggi dari AHH penduduk laki-laki sebesar 69,59 tahun (BPS, 2020c). Oleh karena itu, ketimpangan gender dalam segala bidang khususnya perekonomian seperti kesempatan untuk bekerja perlu terus diminimalisir. Saat ini upaya untuk menghilangkan ketimpangan gender di Indonesia patut diacungi jempol. Hal ini dapat dilihat dari indeks pemberdayaan gender yang terus meningkat dan mencapai angka 75,57 pada tahun 2020 (Gambar 15).

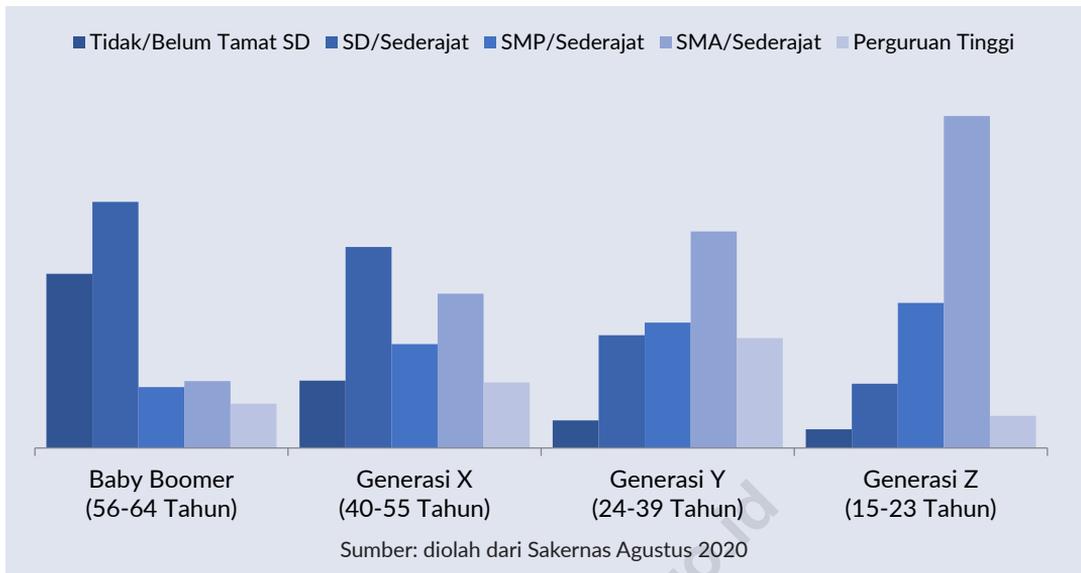


Gambar 15. Indeks Pemberdayaan Gender 2010-2020

Sebagian besar penduduk usia produktif yang terlibat aktif dalam perekonomian Indonesia adalah generasi Y, yaitu sebesar 39,89 persen dari keseluruhan penduduk usia produktif yang bekerja (Gambar 16). Selanjutnya sebanyak 36,53 persen berasal dari generasi X, lalu generasi Z sebanyak 11,98 persen, dan terakhir generasi *Baby Boomer* sebesar 11,60 persen. Urutan komposisi penduduk usia produktif menurut generasi ini juga berlaku di banyak provinsi. Hanya empat provinsi yang memiliki komposisi berbeda, yaitu DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, dan Jawa



Gambar 16. Persentase Penduduk Usia Produktif yang Bekerja di Indonesia menurut Generasi Tahun 2020 (persen)

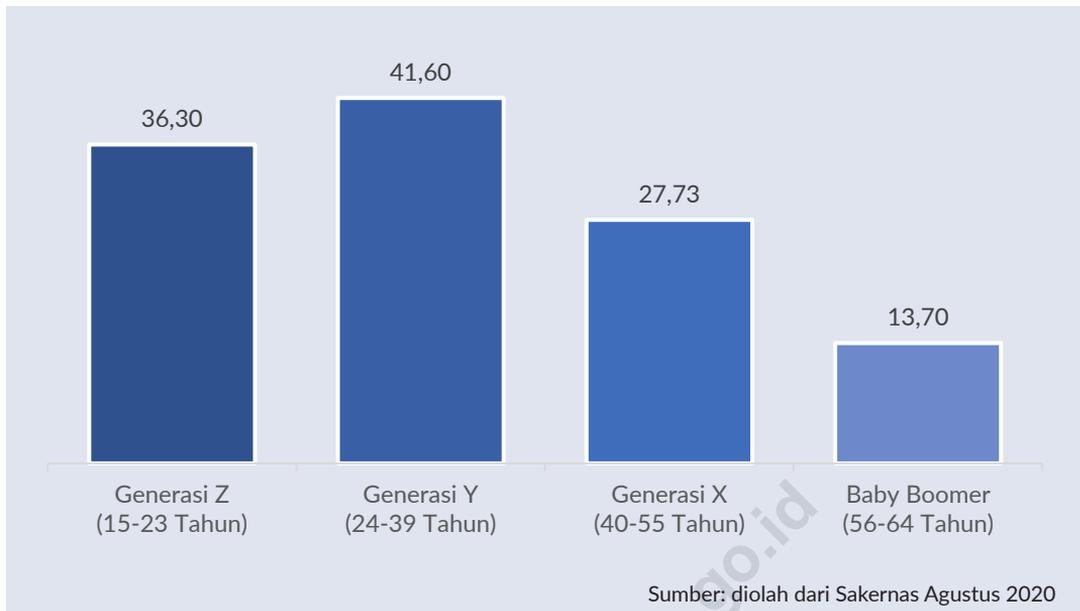


Gambar 17. Persentase Penduduk Usia Produktif yang Bekerja menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Masing-masing Generasi di Indonesia Tahun 2020 (persen)

Tengah. Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur memiliki tenaga kerja generasi X yang lebih banyak daripada generasi Y serta tenaga kerja generasi *Baby Boomer*-nya lebih banyak daripada generasi Z. Begitu juga dengan Provinsi Bengkulu dan Jawa Tengah, kedua provinsi ini memiliki tenaga kerja generasi *Baby Boomer* yang lebih banyak daripada generasi Z.

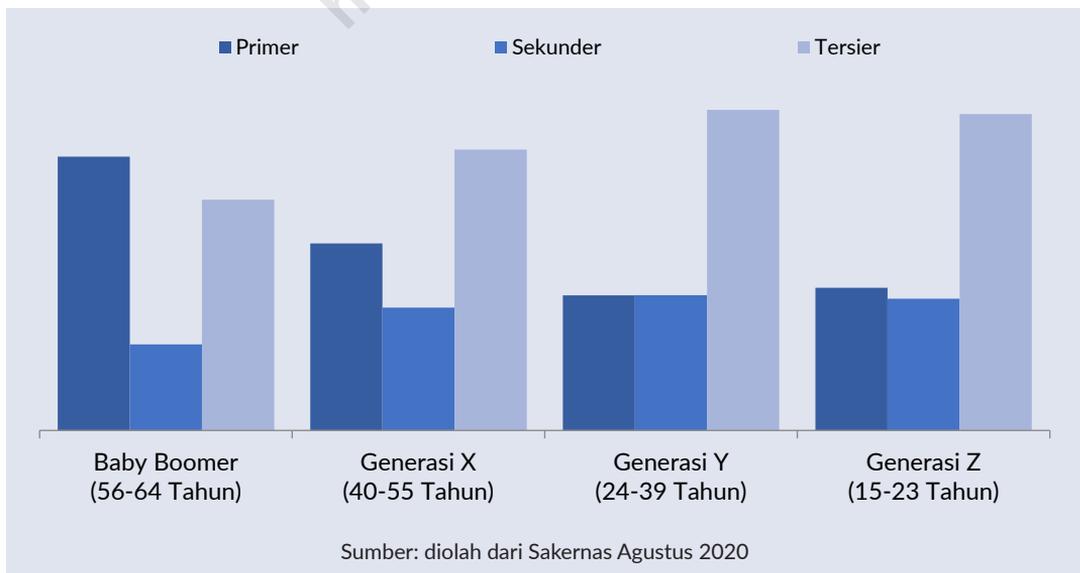
Dalam hal pendidikan, terdapat kecenderungan bahwa semakin muda generasi, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia produktif yang bekerja. Penduduk usia produktif yang bekerja pada generasi Z dan Y memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan generasi X dan *Baby Boomer* (Gambar 17). Penduduk usia produktif generasi Z dan Y yang bekerja mayoritas memiliki pendidikan terakhir SMA/Sederajat dengan persentase masing-masing sebesar 56,05 persen dan 36,58 persen, sedangkan tenaga kerja yang tidak sekolah atau belum tamat SD pada kedua generasi ini masing-masing kurang dari lima persen saja, yaitu 3,15 persen pada generasi Z dan 4,66 persen pada generasi Y. Sementara penduduk usia produktif yang bekerja pada generasi X dan *Baby Boomer* didominasi oleh tamatan SD/Sederajat dengan persentase masing-masing sebesar 33,96 persen dan 41,56 persen.

Perkembangan teknologi dan internet menuntut implementasi dan adaptasi yang masif dalam pekerjaan. Di antara empat generasi penduduk usia produktif, penggunaan internet dalam pekerjaan lebih banyak dilakukan oleh generasi Y, yaitu sebanyak 41,60 persen dari jumlah tenaga kerja pada generasi Y. Selanjutnya diikuti oleh generasi Z (36,30 persen), generasi X (27,73 persen), dan yang paling sedikit menggunakan internet dalam pekerjaan adalah generasi *Baby Boomer* (13,70 persen) (Gambar 18).



Gambar 18. Persentase Penggunaan Internet Tenaga Kerja Penduduk usia Produktif di masing-masing Generasi (persen), 2020

Penggunaan internet dalam pekerjaan tidak bisa dihindari. Berbagai layanan online mulai ditingkatkan terlebih setelah pandemi COVID-19 merebak. Perlahan-lahan, berbagai kebutuhan dapat diakses dan dipenuhi melalui layanan *online*. Pekerja yang tidak mampu beradaptasi menggunakan internet akan tertinggal dan akan kesulitan memasuki pasar tenaga kerja.



Gambar 19. Persentase Tenaga Kerja Penduduk Usia produktif menurut Klasifikasi Lapangan Usaha di Masing-masing Generasi, 2020

Sehubungan dengan perkembangan teknologi ini, jenis pekerjaan yang dilakukan juga mengalami pergeseran. Semakin muda generasi, persentase tenaga kerja di sektor primer cenderung menurun. Kondisi sebaliknya terjadi di sektor tersier (Gambar 19). Tenaga kerja pada generasi *Baby Boomer* masih dominan bekerja di sektor primer, yaitu 46,35 persen dari total tenaga kerjanya. Sementara generasi X dan yang lebih muda lebih banyak yang terjun di pekerjaan yang berhubungan dengan jasa.



Tantangan yang dihadapi Generasi Z dan Y diantaranya adalah tingkat pendidikan yang rendah, pernikahan usia muda, konsumsi rokok, dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan karakteristik penduduk usia produktif menurut generasi, generasi Y dan Z berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian saat ini maupun di masa mendatang. Hasil penelitian Lindh dan Malmberg (1999) menemukan bahwa kelompok penduduk usia produktif generasi ini memiliki dampak paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain dari sisi kualitas dan kompetensi, jumlah mereka saat ini juga mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah generasi Y dan Z, begitu pula diantara seluruh penduduk usia produktifnya.

Potensi pemuda, dalam hal ini mencakup generasi Z dan Y, perlu dioptimalkan untuk menjawab tantangan bonus demografi. Salah satu upaya optimalisasi tersebut adalah melalui peningkatan kualitas pemuda. Bersamaan dengan upaya tersebut, berbagai permasalahan generasi muda saat ini perlu segera dibenahi. Permasalahan generasi muda saat ini adalah tingkat pendidikan yang terbilang rendah (seperti pada pembahasan sebelumnya), pernikahan usia muda, konsumsi rokok, dan penyalahgunaan narkoba.

Pernikahan pada usia dini dapat menghambat upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekitar 2,16 persen pemuda di Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur 16 tahun (BPS, 2020b). Pernikahan dini ini akan berdampak terhadap pemanfaatan bonus demografi di Indonesia. Menurut penelitian Khairunnisa dan Nurwati (2020), pernikahan dini bisa berdampak pada kualitas pendidikan generasi muda. Pernikahan ini memiliki andil dalam tingginya angka putus sekolah, sehingga dapat memengaruhi kualitas tenaga kerja. Rendahnya pendidikan menyebabkan generasi muda minim akan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan menggunakan dan mengembangkan teknologi, sehingga mereka akan kesulitan dalam memasuki pasar kerja dan berpotensi menjadi pengangguran.

Konsumsi rokok juga turut mewarnai permasalahan pemuda. Usia pertama kali merokok paling tinggi berada pada usia 15-19 tahun (Riskesmas 2018 dalam TCSC-IAKMI, 2020). Menurut data Riskesmas, tren konsumsi rokok pada usia remaja terus meningkat. Selama tahun 2013-2018, proporsi perokok usia 15-19 tahun mengalami peningkatan sebesar 1,4 persen. Pada tahun 2020, persentase pemuda yang merokok mencapai 25,70 persen (BPS, 2020b).

Konsumsi rokok memberikan dampak negatif bagi pemuda. Kualitas pendidikan pemuda yang merokok cenderung rendah. 41,43 persen dari mereka tidak tamat SD dan 35,81 persennya hanya tamat SD (BPS, 2020b). Pemuda yang merokok dan berpendidikan rendah memiliki andil dalam permasalahan kemiskinan di Indonesia. Perokok yang didominasi laki-laki paling banyak berada pada kuintil kalangan bawah/miskin (SDKI, 2017 dalam TCSC-IAKMI, 2020).

Dari sisi kesehatan, konsumsi rokok dapat menimbulkan berbagai macam penyakit kronis pada usia produktif. Kondisi ini akan mendorong tingginya angka morbiditas dan kematian prematur. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada penurunan produktivitas yang signifikan pada kelompok usia produktif. Kerugian yang disebabkan karena rokok diperkirakan mencapai hampir 4200 triliun atau lebih dari seperempat PDB akibat penyakit yang disebabkan rokok, yaitu karena kematian dini dan tahun produktif yang hilang karena sakit (TCSC-IAKMI, 2020).

Selain rokok, permasalahan pemuda juga banyak bersumber dari penggunaan narkoba. Sama halnya dengan rokok, rata-rata usia pemakai narkoba yang paling rendah juga berada pada usia remaja, yaitu 19,2 tahun (BNN, 2020). Jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, penduduk usia produktif (24-49 tahun) merupakan pengguna yang paling banyak. Permasalahan penggunaan narkoba, khususnya pada kelompok usia produktif membutuhkan penanganan yang serius mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan bagi bangsa Indonesia. Penggunaan narkoba dapat merusak performa penduduk usia produktif yang berdampak pada rendahnya daya saing Indonesia.

Berbagai upaya tengah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pemuda. Semua kalangan perlu bekerja sama untuk mewujudkan pemuda yang lebih berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Pemerintah melalui program GenRe (generasi berencana) berusaha menyediakan wadah penyaluran aspirasi kreasi bagi pemuda untuk memaksimalkan pengembangan life skill-nya (Mayasari dkk, 2017). Pemaksimalan program GenRe dapat dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan sekitar. Upaya peningkatan life skill pemuda juga dapat disertakan dalam kurikulum sekolah, sehingga lulusannya bisa siap pakai. Selain penyediaan sarana penyaluran kreasi tersebut, penanaman karakter juga penting untuk mendukung perbaikan kualitas pemuda. Sebagai lingkungan pertama tempat remaja tumbuh dan berkembang, penanaman karakter yang baik dalam keluarga menjadi kunci keberhasilan terciptanya generasi muda yang berkualitas.

F. Kesimpulan

Bonus demografi memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan tingkat perekonomian bangsa apabila dapat dimanfaatkan dengan optimal. Untuk maksud tersebut, penduduk usia produktif harus berada dalam kondisi yang prima, yaitu sehat, cerdas, dan produktif. Penduduk usia produktif yang berkualitas, baik dari sisi pendidikan, karakter, dan kompetensi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional.

Jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif didorong oleh peningkatan jumlah penduduk menurut kelompok umur di dalamnya, kecuali penduduk remaja, atau yang berusia 15-24 tahun. Jumlah penduduk pada kelompok umur ini terus turun sebagai akibat dari keberhasilan program KB yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Penduduk usia produktif yang mendominasi penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di Pulau Jawa, terutama di perkotaan.

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus maju. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan mengingat kualitas penduduk usia produktif Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, baik di tingkat global maupun ASEAN.

Saat ini penduduk usia produktif di Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda dan prima (generasi Z dan Y). Mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Agar mereka bisa berperan maksimal sebagai motor penggerak ekonomi bangsa, beberapa masalah yang saat ini dihadapi perlu segera diatasi, seperti tingkat pendidikan yang terbilang rendah, pernikahan usia muda, konsumsi rokok, dan penyalahgunaan narkoba.

G. Referensi

- APO. (2021). *APO Productivity Databook 2021*. Tokyo: Keio University Press Inc.
- Bappenas. (2019). *Transisi Demografi dan Epidemiologi : Permintaan Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Jakarta Pusat: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedeputan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- BNN. (2020). *Infografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*. Jakarta Timur: PUSLITDATIN, BNN.
- BPS. (2011). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2011*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2012). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2012*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2013). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2013*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2014). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2014*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2015*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2016*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2017*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2018). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2019*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020a). Retrieved from *Sosial dan Kependudukan*: <https://bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>
- BPS. (2020b). *Statistik Pemuda Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020c). Retrieved from *Sosial dan Kependudukan*: <https://bps.go.id/indicator/40/455/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS. (2021a). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Retrieved from *Berita Resmi Statistik*: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BPS. (2021b). *Istilah*. Retrieved from *Dikutip dari BPS* : https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4

- BPS. (2021c). Retrieved from Sosial dan Kependudukan: <https://bps.go.id/indicator/6/1186/1/persentase-usia-muda-15-24-tahun-yang-sedang-tidak-sekolah-bekerja-atau-mengikuti-pelatihan.html>
- BPS, Bappenas, UNFPA. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: BPS.
- Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2020). *The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, and Geneva*.
- Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia : Suatu Anugerah Atau Petaka. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, [S.I.], v. 2, n. 3, p. 17-23, aug. 2018. ISSN 2598-8719. Available at: <<https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/44>>. Date accessed: 20 Desember 2021.
- Gedi. (2019). *Global Entrepreneurship and Development Institute*. Washington, D.C, USA : The Global Entrepreneurship and Development Institute.
- IMD. (2020). *IMD World Competitiveness Yearbook*. Switzerland : International Institute for Management Development.
- IMD. (2021). Retrieved from *Competitiveness Ranking*: Dikutip dari worldcompetitiveness.imd.org: <https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/ID/wcy>
- Kemendikbud. (2017). *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*. Jakarta: Kemendikbud.
- Khairunnisa, S. & Nurwati, N (2020). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3, 45-49. ISSN 2656-9353. Available at: <<https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2821>>. Date accessed: 20 Desember 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.23969/humanitas.v3il.2821>.
- Kupperschmidt, B. (2000). Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management. *The health care manager*, 19, 65-76.
- Lindh, T. (1999). Age Structure Effects and Growth in the OECD,1950-1990. *Journal of Population Economics*, 12(3), 431-449.
- Mayasari, S., & Husin, A. (2017). Remaja genre: peluang menuju bonus demografi. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 1(2), 4-8.
- OECD. (2021). *Working Age Population*. Retrieved from OECD Data: <https://data.oecd.org/pop/working-age-population.htm#:~:text=The working age population is,age population in total population>.
- Pemerintah RI. (2020). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Pemerintah RI.
- TCSC-IAKMI. (2020). *Atlas Tembakau Indonesia 2020*. Jakarta: Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020*. New York: UNDP.

Wisnumurti, d. (2018). Government Policy of Indonesia to Managing Demographic Bonus and Creating Indonesia Gold in 2045. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23, 23-34. Diakses 20 Desember 2021 dari <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/405/1/Government%20Policy%20of%20Indonesia%20to%20Managing%20Demographic.pdf>.

World Bank. (2020). *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.

<https://www.bps.go.id>





4

Penduduk Lanjut Usia di Indonesia

- A. Lansia Indonesia dalam Perbandingan Internasional
- B. Sebaran Lansia di Indonesia
- C. Lansia Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif (SMART)
- D. Lansia dalam Perlindungan Keluarga dan Negara
- E. Menyongsong Era Pasca-Bonus Demografi
- F. Kesimpulan
- G. Referensi



Penduduk Lanjut Usia di Indonesia

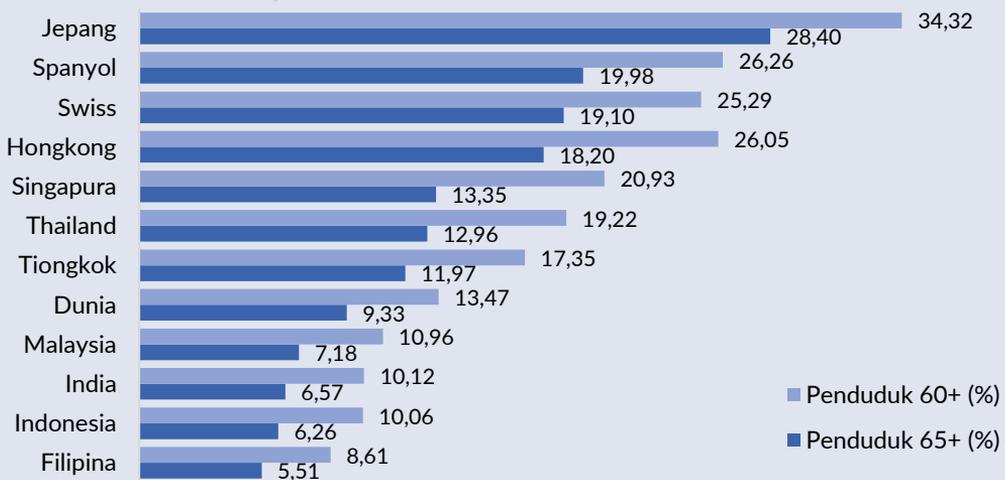
A. Lansia Indonesia dalam Perbandingan Internasional

1. Ageing Population di Dunia

Perjalanan hidup manusia setelah lahir adalah menjalani masa anak-anak, kemudian tumbuh dan menjalani masa dewasa yang produktif, dan kemudian memasuki masa lanjut usia. Penduduk lanjut usia (Lansia) adalah kelompok penduduk usia 60 tahun ke atas (WHO, 2002). Beberapa negara maju menggunakan batasan 65 tahun ke atas (Adioetomo, dkk 2020). Batasan yang sama juga digunakan *International Labor Organization* dalam menyusun indikator angka ketergantungan dan bonus demografi. Di tanah air, konsep ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci, pembahasan dalam bab ini membagi usia lansia menjadi tiga, yaitu: Lansia Muda (60-69 tahun), Lansia Madya (70-79 tahun), dan Lansia Tua (80 tahun ke atas) (Adioetomo, dkk 2020).

Persentase jumlah lansia di dunia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun hal ini tidak berlaku di semua wilayah. Berdasarkan data dari *World Population Ageing 2015*, wilayah di negara-negara berkembang seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Asia naik paling cepat diantara wilayah lainnya. Sementara



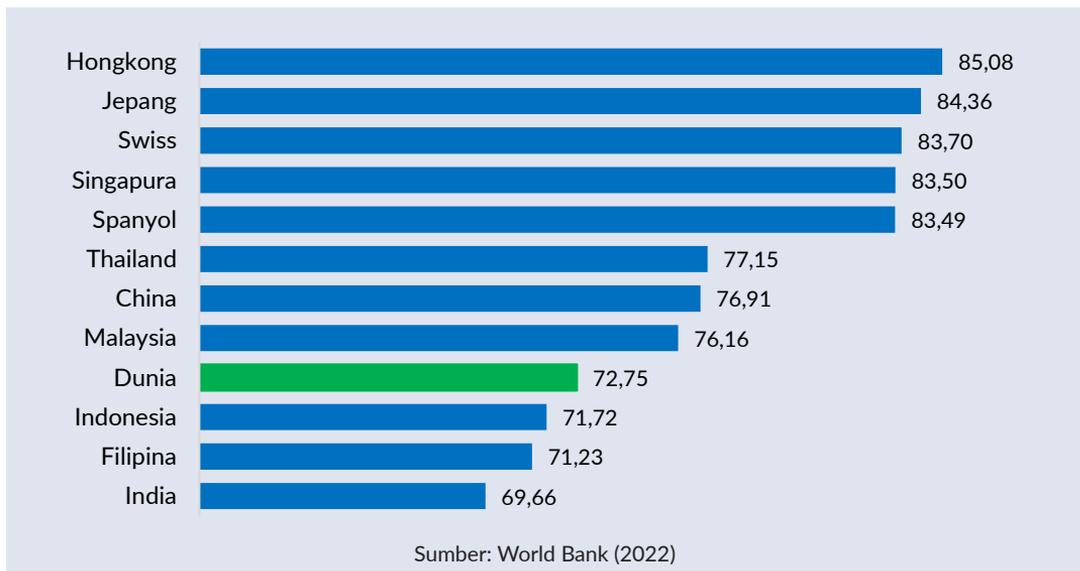
Sumber: United Nations (2020)

Gambar 1. Persentase Penduduk Usia 60 Tahun Ke atas dan 65 Tahun Ke atas di Beberapa Negara (Persen), 2020

negara-negara maju lebih dahulu mengalami *ageing population* atau penuaan penduduk dibandingkan negara-negara berkembang. Suatu negara dikatakan mengalami penuaan penduduk jika persentase penduduk lansia mencapai 10 persen lebih (Adioetomo dan Mujahid, 2014). Pada tahun 2020, penduduk lansia paling banyak berada di Jepang. Satu dari tiga penduduk di Jepang adalah lansia (berumur 60 tahun ke atas). Negara dengan jumlah lansia terbanyak lainnya adalah Spanyol dan Hongkong (Gambar 1).

Penuaan penduduk sangat terkait dengan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Apabila ini dapat tercukupi akan berdampak pada penurunan angka kematian penduduk sehingga menumbuhkan angka harapan hidup (WHO, 2011). Hongkong, Jepang, dan negara-negara maju lainnya yang mempunyai angka harapan hidup tinggi mempunyai jumlah lansia yang tinggi juga. Jepang sebagai negara dengan angka harapan hidup saat lahir tertinggi kedua di dunia, mempunyai persentase jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas tertinggi di dunia. Sementara itu, baik umur harapan hidup maupun persentase lansia Indonesia saat ini masih berada di bawah rata-rata dunia (Gambar 2).

Peningkatan penduduk yang memasuki usia lanjut akan memberikan tantangan dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada sistem kesehatan di suatu negara. Sebagai contoh, China dan India yang mengalami lonjakan jumlah lansia yang cukup tinggi, menghadapi masalah dalam meningkatkan akses pada intervensi kesehatan yang efektif untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik (Chatterji dkk, 2008). Sementara itu, WHO (2011) mengemukakan jika negara-negara berkembang juga menghadapi peningkatan penyakit kronis tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes, maka potensi biaya ekonomi dan sosial dari jenis penyakit ini akan meningkat tajam seiring bertambahnya usia. Peningkatan biaya ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai tantangan dalam menghadapi penuaan penduduk, beban ekonomi suatu negara akan lebih ringan jika penduduk yang berusia lanjut mampu aktif dan mandiri meskipun dalam keterbatasan fisik.

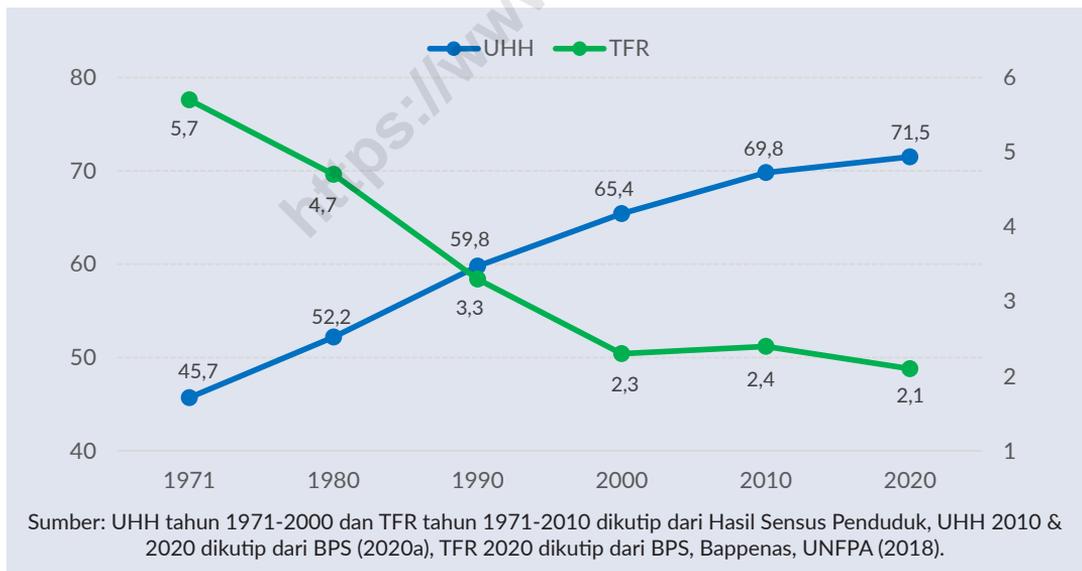


Gambar 2. Umur Harapan Hidup Beberapa Negara (Tahun), 2020

2. Ageing Population di Indonesia

Seiring dengan pola penuaan penduduk di dunia, penduduk lansia di Indonesia mengalami peningkatan jumlah dan persentasenya dari waktu ke waktu yang mengantarkan Indonesia menuju penuaan penduduk. Pada awal tahun 1970-an, keluarga Indonesia rata-rata memiliki 5 sampai 6 anak. Saat ini, rata-rata keluarga Indonesia hanya memiliki 2 anak. Program Keluarga Berencana (KB) sejak awal 1970 telah berhasil menurunkan angka kelahiran (*Total Fertility Rate*) secara signifikan, akibatnya perempuan Indonesia saat ini rata-rata memiliki 2 anak. Pada saat yang sama, terjadi penurunan angka kematian karena akses ke fasilitas kesehatan yang semakin berkualitas. Peningkatan kualitas hidup juga terjadi seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan penduduk yang disebabkan oleh perbaikan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan kemajuan di bidang pendidikan. Hal tersebut secara bersama-sama telah mendorong peningkatan usia harapan hidup (UNFPA, 2012). Selama 50 tahun terakhir, usia harapan hidup telah meningkat dari 46 tahun pada tahun 1971 menjadi sekitar 72 tahun pada tahun 2020 (Gambar 3).

Dengan meningkatnya usia harapan hidup, rata-rata orang Indonesia menikmati rentang hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas menyebabkan struktur usia penduduk Indonesia bergeser ke kelompok usia yang lebih tua (UNFPA, 2014). Pergeseran ini berdampak pada peningkatan persentase jumlah lansia yang mengindikasikan penuaan penduduk atau “*ageing population*”.



Gambar 3. Usia Harapan Hidup (UHH) dan Angka Kelahiran Kasar (Total Fertility Rate/TFR) Indonesia, 1971-2020

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menunjukkan jika persentase lansia di Indonesia sudah hampir mencapai 10 persen, padahal empat puluh tahun sebelumnya hanya sekitar 5 persen (Gambar 4). Setelah bonus demografi di Indonesia usai sekitar tahun 2036, persentase lansia diprediksi akan mencapai sekitar 16 persen. Hal ini didasarkan pada angka proyeksi penduduk hasil SUPAS



Gambar 4. Proporsi Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Indonesia (%), 1980-2020 dan Proyeksi Tahun 2020-2045

2015 (BPS, Bappenas, dan UNFPA, 2018). Persentase penduduk lansia akan terus membesar, bahkan di tahun 2045 diperkirakan satu diantara lima penduduk Indonesia merupakan lansia.

Indikasi adanya penuaan penduduk di Indonesia juga dapat dijelaskan dari beberapa indikator penuaan penduduk, yaitu Indeks Penuaan (*Ageing Index*) dan Rasio Dukungan (*Support Ratio*). Indeks Penuaan didefinisikan sebagai jumlah lansia per 100 anak di bawah 15 tahun, sementara Rasio Dukungan adalah jumlah penduduk usia kerja per satu lansia. Indeks Penuaan yang meningkat terus menunjukkan penurunan jumlah anak-anak. Sebaliknya, jumlah lansia menunjukkan peningkatan, padahal anak-anak akan berpotensi menjadi pekerja yang akan membayar pajak dan menyantuni lansia (Adioetomo dkk, 2018).

Tidak hanya besaran rasio dari penduduk usia anak, dukungan dari penduduk usia kerja terhadap lansia juga menunjukkan penurunan. Jika pada tahun 2010 untuk setiap 13 orang yang bekerja menanggung seorang lansia, maka nanti pada tahun 2045 diperkirakan hanya ada 5 orang yang akan menanggung seorang lansia. Hal ini ditunjukkan dari angka *support ratio* pada Tabel 1. Penurunan ini berpotensi mengurangi tenaga untuk merawat lansia baik secara fisik maupun ekonomi. Disamping itu, penurunan angka dukungan tersebut juga berpotensi mengurangi pajak dan pendapatan negara yang dihasilkan penduduk usia produktif, padahal

Tabel 1. Indikator Penuaan Penduduk, 2010-2045

Indikator	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Ageing Index</i>	26,30	30,51	43,47	56,12	78,12	76,43	86,67	95,96
<i>Support Ratio</i>	13,10	12,85	10,18	8,06	5,68	5,99	5,17	4,62

Sumber: diolah dari Susenas 2010 dan 2020

negara dituntut untuk meningkatkan kualitas hidup lansia agar terpenuhi kebutuhan ekonomi dan kesehatannya (World Bank, 2016). Oleh sebab itu, usia produktif saat ini harus mempersiapkan diri untuk menjadi lansia yang aktif dan sukses.

B. Sebaran Lansia di Indonesia

1. Pulau Jawa Telah Mengalami Penuaan Penduduk

Salah satu indikator yang menunjukkan Indonesia menuju penuaan penduduk terlihat dari pertumbuhan jumlah lansia yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk nonlansia. Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan jumlah lansia hampir 50 persen, sementara peningkatan jumlah nonlansia hanya sekitar 10 persen. Peningkatan jumlah lansia yang tinggi, didominasi oleh penduduk yang terkategori lansia muda, yaitu berusia antara 60-69 tahun. Peningkatan jumlah penduduk pada kategori ini mencapai lebih dari 60 persen selama periode 2010-2020 (Tabel 2).

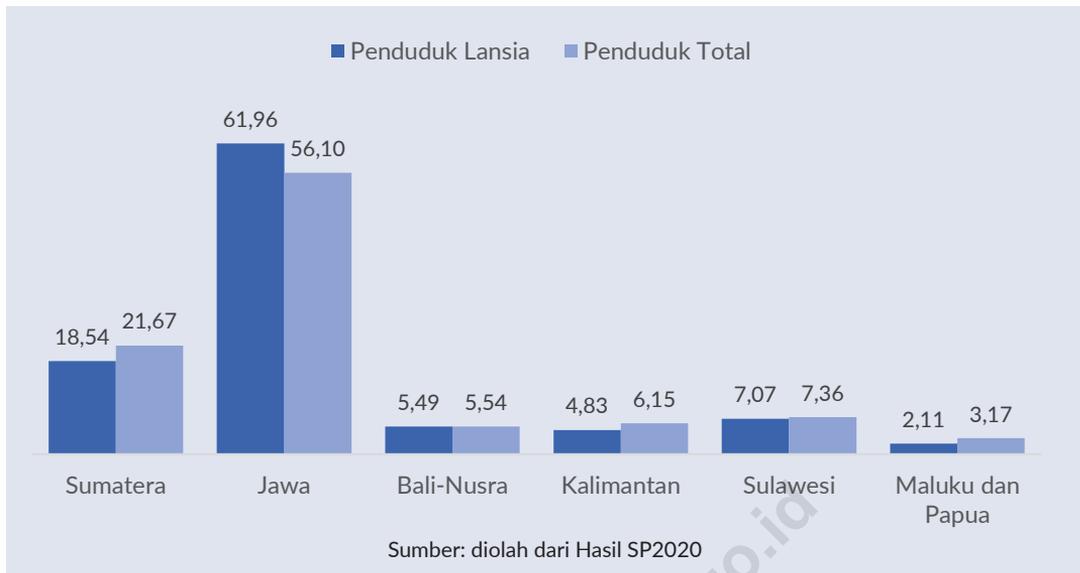
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia dan Nonlansia serta Peningkatannya, 2010-2020

Klasifikasi Lansia	2010		2020		Peningkatan 2010-2020 (%)
	Jumlah (juta)	Persentase (%)	Jumlah (juta)	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lansia					
Lansia Muda (usia 60-69 tahun)	10,75	59,59	17,66	65,81	64,27
Lansia Madya (usia 70-79 tahun)	5,43	30,12	7,17	26,73	32,03
Lansia Tua (usia 80 tahun ke atas)	1,86	10,29	2,00	7,47	7,92
Total Lansia	18,04	100,00	26,84	100,00	48,76
Nonlansia					
Anak (0-14 tahun)	68,60	31,24	66,36	27,27	-3,27
Dewasa (15-59 tahun)	151,43	68,96	177,00	72,73	16,88
Total Nonlansia (usia 0-59 tahun)	219,60	100,00	243,36	100,00	10,82

Sumber: diolah dari Hasil SP2010 dan SP2020

Karena peningkatannya yang cukup tajam, persentase lansia muda menjadi lebih tinggi dibandingkan lansia kategori lainnya. Pada tahun 2020 persentase lansia muda mencapai hampir dua pertiga dari jumlah lansia. Persentase lansia muda di tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2010, sementara lansia madya dan lansia tua persentasenya menurun. Peningkatan usia harapan hidup di Indonesia mendorong peningkatan jumlah penduduk pada lansia di bawah 80 tahun.

Pulau Jawa yang mendominasi jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mempunyai persentase penduduk lansia yang tinggi. Persentase lansia yang berada di Pulau Jawa bahkan lebih tinggi dibandingkan persentase keseluruhan penduduk. Hal ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa Pulau Jawa akan lebih dahulu mengalami penuaan penduduk. Persentase lansia Pulau Jawa juga lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk secara keseluruhan, sementara persentase lansia Bali-Nusra dan Sulawesi hampir sama dengan persentase keseluruhan penduduk (Gambar 5).



Gambar 5. Distribusi Penduduk Lansia dan Keseluruhan Penduduk menurut Pulau (%), 2020

Tingginya persentase penduduk lansia selain karena usia harapan hidup, juga dapat diakibatkan oleh tingkat migrasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Harmadi (2017), jika perubahan jumlah dan struktur penduduk disebabkan oleh perubahan parameter fertilitas, mortalitas dan migrasi. Migrasi lebih banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif (Gilbert dan Gugler, 1996), sehingga wilayah tujuan migrasi akan lebih banyak ditinggali oleh penduduk berusia produktif atau usia muda. Kawasan yang persentase penduduk migrannya tinggi cenderung mempunyai persentase usia muda lebih tinggi sekaligus persentase penduduk lansia yang lebih rendah. Pulau

Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi mempunyai persentase penduduk migran masuk yang rendah sehingga turut memengaruhi tingginya persentase penduduk lansia di keempat wilayah tersebut (Tabel 3). Sementara itu rendahnya persentase migran di wilayah Bali-Nusra, lebih dipengaruhi oleh rendahnya jumlah migran di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, karena angka migran di Bali cukup tinggi.

Indikasi Pulau Jawa sudah memasuki periode penuaan penduduk diperkuat oleh data persentase jumlah lansia di Pulau Jawa yang sudah mencapai angka 10 persen pada tahun 2020 (Tabel 4). Jika Pulau Jawa sudah memasuki penuaan penduduk, wilayah Bali-Nusra dan Sulawesi akan mengikuti Pulau Jawa dalam beberapa tahun kedepan. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua masih cukup jauh untuk

Tabel 3. Persentase Migran Seumur Hidup menurut Pulau, 2015

Pulau	Persentase Jumlah Migran Masuk (%)	Persentase Jumlah Migran Keluar (%)
(1)	(2)	(3)
Sumatera	13,44	10,74
Jawa	9,39	11,66
Bali - Nusra	5,16	5,16
Kalimantan	17,24	5,11
Sulawesi	9,00	11,43
Maluku dan Papua	14,66	6,09

Sumber: BPS, Bappenas, & UNFPA (2018)

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia dan Nonlansia serta Pertumbuhannya, 2010-2020

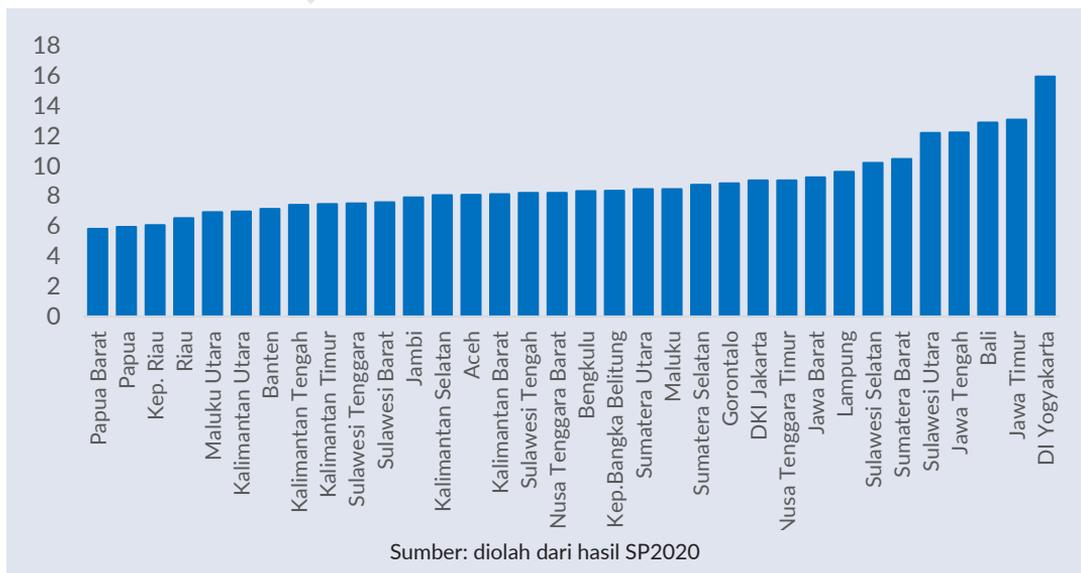
Pulau	2010	2020	Pertumbuhan Jumlah Lansia (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	6,04	8,50	62,71
Jawa	8,57	10,97	42,02
Bali - Nusra	8,07	9,85	39,70
Kalimantan	5,20	7,79	80,85
Sulawesi	7,50	9,54	45,72
Maluku dan Papua	3,62	6,62	153,96
Indonesia	7,59	9,93	48,76

Sumber: diolah dari Hasil SP2010 dan SP2020

menghadapi penuaan penduduk. Usia harapan hidup kedua wilayah tersebut tergolong masih rendah, sedangkan angka persentase migrannya cukup tinggi.

Proses penuaan penduduk di Indonesia akan semakin jelas jika dilihat lebih dalam ke masing-masing wilayah. Apabila dilihat persentase lansia menurut provinsi, tujuh provinsi telah memasuki *ageing population* di tahun 2020 meskipun Indonesia belum memasuki penuaan penduduk di tahun tersebut. Semua provinsi di Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta dan Banten sudah memasuki masa *ageing population*, yang diikuti beberapa provinsi di Luar Jawa, yaitu Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan (Gambar 6).

Seperti telah dibahas pada bahasan sebelumnya, kondisi penuaan penduduk sering kali disertai dengan peningkatan usia harapan hidup. DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan persentase jumlah lansia tertinggi di Indonesia, memiliki UHH tertinggi pula. Beberapa artikel menyebutkan bahwa suasana yang nyaman

**Gambar 6. Persentase Jumlah Lansia menurut Provinsi, 2020**

huni, menjadi daya tarik bagi para pensiunan atau kaum lansia untuk menjadikan Yogyakarta sebagai tempat tinggal terakhir untuk menikmati masa tua. Fasilitas kesehatan yang baik menjadi salah satu faktor tingginya angka harapan hidup di Yogyakarta, Bali, dan provinsi-provinsi lainnya. Sebagai contoh, angka rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk di Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, dan Bali di atas 100 orang, sementara angka Indonesia hanya sekitar 56 (Kemenkes, 2019). Angka rasio jumlah rumah sakit per 100.000 penduduk di Provinsi DI Yogyakarta dan Bali juga tertinggi di Indonesia, disamping DKI Jakarta. Dengan berbagai disparitas wilayah penuaan penduduk, kebijakan terkait kelanjutusiaan juga perlu memperhatikan sisi kewilayahan. Jawa dan beberapa wilayah lainnya yang telah memasuki penuaan penduduk perlu mendapat perhatian yang lebih dalam membangun sistem perlindungan lansia.

2. Lansia Indonesia dalam Dimensi Gender

Dari sisi kuantitas, lansia perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari sekitar 27 juta penduduk lansia Indonesia, 52 persennya merupakan lansia perempuan (Tabel 5). Perempuan cenderung hidup lebih lama daripada laki-laki. Meskipun jumlahnya masih dominan, namun persentase lansia perempuan mengalami penurunan dalam dua periode Sensus Penduduk terakhir. Penurunan persentase ini didorong oleh laju pertumbuhan penduduk lansia laki-laki yang lebih cepat dibandingkan lansia perempuan. Pertumbuhan angka harapan hidup laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan merupakan faktor penyebab pertumbuhan lansia laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan. Selama periode 2010-2020, pertumbuhan usia harapan hidup laki-laki sebesar 2,50 persen, sementara perempuan 2,27 persen.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia dan Nonlansia serta Peningkatannya, 2010-2020

Jenis Kelamin	2010		2020		Pertumbuhan 2010-2020 (%)
	Jumlah (juta)	Persentase (%)	Jumlah (juta)	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	8,29	45,94	12,96	48,28	56,33
Perempuan	9,75	54,06	13,88	51,72	42,33
Total Lansia	18,04	100,00	26,84	100,00	48,76

Sumber: diolah dari Hasil SP2010 dan SP2020

Dari berbagai literatur, lansia perempuan mempunyai faktor kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki. Menurut Kidd dkk (2019), lansia perempuan lebih berisiko mengalami kemiskinan sebanyak 14 persen. Berdasarkan data Susenas 2020, lansia perempuan juga berisiko menjadi janda dibandingkan laki-laki menjadi duda, yakni 56,81 persen sementara laki-laki hanya 17,31 persen. Oleh sebab itu, lansia perempuan berisiko untuk hidup sendiri sebesar 14,13 persen dibandingkan laki-laki yang hanya 5,06 persen. Hal ini menyebabkan lansia perempuan juga berisiko mengalami ketelantaran dibandingkan laki-laki.

Pada sisi ketenagakerjaan, lansia perempuan juga berpeluang lebih rendah berpartisipasi pada lapangan pekerjaan. Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa lansia perempuan yang bekerja sebesar 38,28 persen, sementara lansia laki-laki 65,05 persen. Rendahnya aksesibilitas perempuan pada sumber daya produktif menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap keluarganya sehingga berisiko jatuh pada kemiskinan. Oleh sebab itu, pembangunan sistem kelanjutusiaan juga perlu untuk melihat dari sisi gender.

C. Lansia Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif (SMART) dan Tantangan yang Dihadapi

1. Lansia SMART

Dalam konteks negara, penuaan penduduk akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Mason, dkk (1995) dampak tersebut melalui tiga mekanisme, yaitu terjadinya peningkatan angka rasio ketergantungan, penurunan tabungan masyarakat, dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pensiun. Kenaikan pengeluaran pemerintah berisiko meningkatkan defisit anggaran sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi.

Penuaan penduduk akan meningkatkan beban ketergantungan yang berpotensi menurunkan pendapatan per kapita sehingga berimplikasi menurunkan konsumsi masyarakat. Selain itu, penuaan penduduk juga akan meningkatkan angka disabilitas

yang pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial. Agar penuaan di Indonesia tidak berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, diperlukan konsep, kebijakan, dan aksi yang terpadu, agar penuaan di Indonesia menjadi sukses.

Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 mencantumkan landasan pembangunan terkait dengan lansia, yaitu penyiapan kelanjutusiaan di berbagai aspek dalam menciptakan penduduk lansia yang sehat dan produktif. Dalam implementasi kebijakannya, Kementerian Kesehatan melalui Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020-2024 membentuk aksi



Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020-2024 membentuk aksi yang bertujuan untuk mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif)

yang bertujuan untuk mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif). BKKBN dengan program Bina Keluarga Lansia (BKL) melakukan pemberdayaan pada lansia potensial (mandiri) agar menjadi lansia tangguh. Di sisi lain, Kementerian Sosial mengarahkan kebijakannya pada lansia nonpotensial melalui program rehabilitasi sosial (progres lansia). Berbagai kebijakan yang diambil pada intinya adalah untuk mewujudkan lansia yang SMART sehingga tercipta kesejahteraan lansia.

Lansia SMART merupakan konsep lansia yang mendasari pembangunan kelanjutusiaan agar Indonesia mengalami penuaan yang sukses. Konsep penuaan yang sukses menurut Rowe dan Kahn (1998) merupakan konsep yang multidimensi. Keduanya menuangkan konsep “*successful ageing*” ke dalam tiga elemen, yaitu

penuaan aktif, penuaan sehat, dan penuaan produktif. Menurut WHO (2015), penuaan yang sehat diartikan sebagai kemampuan lansia untuk mempertahankan kemampuan fungsional sehingga memungkinkan melakukan kegiatan yang diinginkan. Kemampuan fungsional merupakan kemampuan berinteraksi antara individu lansia dengan lingkungannya. Penuaan aktif adalah sebuah proses mengoptimalkan kesempatan untuk meraih kesehatan, berpartisipasi, dan memperoleh jaminan untuk meningkatkan kualitas hidup menuju usia lanjut, termasuk pengembangan potensi fisik, sosial, dan kesehatan mental (WHO, 2002). Lansia yang mencapai penuaan sehat dan aktif berpotensi mencapai penuaan produktif, yaitu kemampuan untuk terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat luas. Dengan kata lain, penuaan yang sukses diartikan sebagai kondisi fungsional lansia yang berada pada kondisi optimal, sehingga memungkinkan lansia menikmati masa tua dengan penuh makna, membahagiakan, berguna, dan berkualitas (Rahmawati dan Saidiyah, 2016). Kebahagiaan dan kepuasan hidup sebagai penanda jika lansia mengalami kesejahteraan di masa tua atau *successful ageing*.

Dalam konteks lansia SMART, terdapat tujuh dimensi kesejahteraan lansia yang aktif yang dijabarkan oleh *International Council of Active Ageing* (ICAA). Ketujuh dimensi tersebut meliputi spiritual, intelektual, fisik, professional/vokasional, sosial kemasyarakatan, emosional, dan lingkungan. Dimensi-dimensi tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengukur lansia yang SMART.

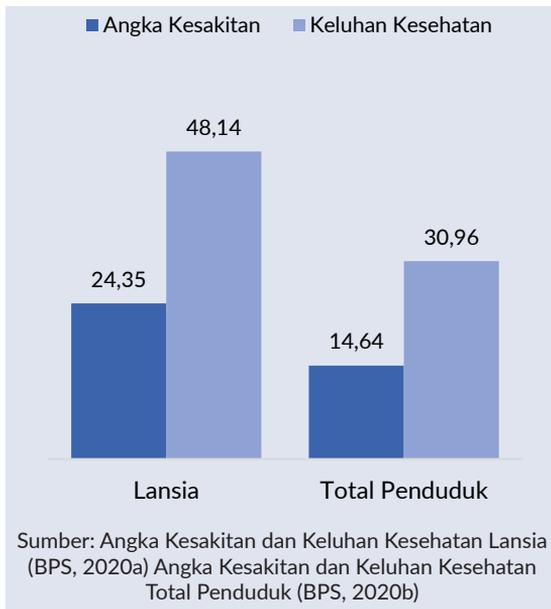
Lansia SMART wajib diupayakan untuk meminimalkan dampak negatif penuaan penduduk di kemudian hari. Evaluasi kebijakan yang telah dilakukan maupun yang akan disusun ke depan perlu untuk melihat kondisi lansia pada saat ini. Kebijakan untuk menciptakan lansia SMART sebaiknya juga mengadopsi pendekatan siklus kehidupan. Hal ini didasarkan adanya saling ketergantungan kehidupan lintas generasi, sehingga sistem yang dibangun sudah dipersiapkan dan dimulai dari masa kelahiran seseorang. Apalagi di masa mendatang setelah periode bonus demografi berakhir, jumlah lansia akan mencapai angka yang cukup tinggi.

2. Tantangan Menuju Lansia SMART

Menjadi tua merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Menua juga merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua. Proses menua merupakan suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan, sehingga tidak mampu bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Nugroho, 2000). Secara biologis tubuh lansia akan mengalami perubahan, yang



Penuaan yang sukses diartikan sebagai kondisi fungsional lansia yang berada pada kondisi optimal, sehingga memungkinkan lansia menikmati masa tua dengan penuh makna, membahagiakan, berguna dan berkualitas.



Gambar 7. Angka Kesakitan dan Persentase Keluhan Kesehatan Lansia dan Total Penduduk Indonesia, 2020

mengarah pada penurunan kapasitas fisik dan mental, moral, potensi, serta peningkatan risiko penyakit.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia menimbulkan berbagai risiko. Stanhope & Lancaster (2016) mencirikan tiga risiko yang dihadapi lansia, yaitu risiko biologis, sosial dan lingkungan, serta gaya hidup dan perilaku. Risiko biologis adalah terjadinya berbagai penurunan fungsi biologi akibat proses menua, akibatnya lansia dihadapkan pada berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, rematik dan lain-lain (Kemenkes, 2019). Penyakit-penyakit degeneratif merupakan penyakit kronis dan berisiko menimbulkan ketidakmampuan atau disabilitas. Data Susenas menunjukkan bahwa angka kesakitan dan keluhan kesehatan pada lansia lebih tinggi dari total penduduk Indonesia (Gambar 7).

Lansia juga dihadapkan pada kondisi berkurangnya fungsi tubuh seperti pergerakan anggota badan, fungsi penglihatan dan pendengaran. Keterbatasan fisik tersebut berpotensi menurunkan produktivitas sehingga berisiko hilangnya pendapatan (ekonomi). Hal ini akan memengaruhi hubungan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, lansia juga dihadapkan dengan risiko perilaku atau gaya hidup, diantaranya keterbatasan aktivitas fisik dan pembatasan konsumsi makanan.

Secara ringkas, masalah-masalah yang dihadapi lansia akan menimbulkan ketergantungan terhadap orang lain karena ketidakberdayaan fisik dan perubahan dalam pola hidupnya karena ketidakpastian ekonomi (Hurlock, 2002). Kondisi tersebut menyebabkan lansia rentan terhadap kondisi sekelilingnya. Ada tiga faktor utama lansia menjadi rentan, yaitu tidak produktif secara ekonomi, penurunan kondisi kesehatan, dan kebutuhan akan pendamping (Bloom, dkk., 2011).

Diantara keterbatasan-keterbatasannya, lansia menyimpan potensi yang besar. Dalam konstruksi kehidupan bermasyarakat, para lansia dianggap sebagai terkumpulnya kebijaksanaan dan kearifan (Swasono, 1989). Akibatnya, lansia dianggap tokoh dan orang yang patut dihormati dan menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Lansia yang berpendidikan dan masih mempunyai kemampuan secara fisik mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan dari pendidikan, pengetahuan dan pengalamannya. Lansia ini masih mampu memberikan ilmu sekaligus memberikan motivasi bagi generasi-generasi yang lebih muda. Profesi seperti guru, dosen, dan dokter masih banyak dilakukan oleh lansia di usia senjanya.

Lansia juga banyak berperan merawat cucu-cucunya. Jika beban merawat cucunya sesuai kemampuan dan kapasitas fisik, lansia akan menimbulkan banyak keuntungan. Menurut Hilbrand, et.al (2016), interaksi antara lansia dengan cucu mereka dapat

berdampak positif bagi kesehatan mental lansia sehingga berpotensi menurunkan angka kematian. Interaksi dengan anak-anak akan menghilangkan rasa kesepian lansia, serta muncul perasaan dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain. Bagi anak-anak, hal ini juga memberikan keuntungan karena akan diasuh dengan penuh rasa kasih sayang dan berpeluang terhindar dari ketelantaran.

Yang tidak kalah penting, lansia sangat berperan sebagai pemelihara kelestarian adat dan budaya (Swasono, 1995). Lansia dianggap kepanjangan tangan nenek moyang dalam mewariskan budaya luhur. Hal ini merupakan kearifan lokal dalam menyikapi kemajuan zaman, yang mampu membentengi bangsa Indonesia dari distorsi modernitas (Suharti, dkk, 2015).



Lansia yang sukses juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti menghadapi pandemi COVID-19. Lansia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan COVID-19.

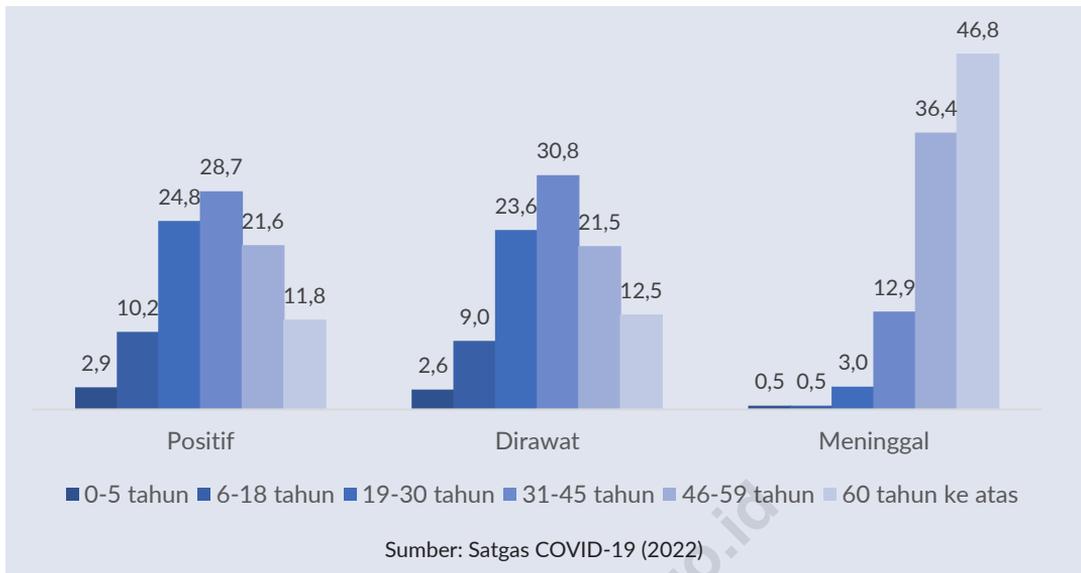
3. Lansia Menghadapi COVID-19

Lansia yang menua dengan sukses adalah lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Lansia yang sukses juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti menghadapi pandemi COVID-19. Lansia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan COVID-19. Selain itu, lansia yang terinfeksi COVID-19 juga berisiko mengalami kondisi yang lebih parah saat tertular. Hasil penelitian Ugbolu, dkk. (2020) menunjukkan bahwa lansia lebih rentan mengalami komplikasi yang lebih parah akibat terinfeksi COVID-19, sehingga memerlukan perawatan intensif karena adanya penyakit penyerta, seperti darah tinggi, penyakit jantung, penyakit pernafasan, dan lain-lain.

Secara umum, lansia mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga menurunkan imun tubuhnya yang berisiko tertular COVID-19. Lansia yang mempunyai penyakit dan harus ditangani di fasilitas kesehatan secara rutin juga lebih berisiko tertular. Lansia yang memiliki gangguan kognitif seperti Alzheimer juga berpotensi terpapar karena adanya kesulitan untuk patuh terhadap protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

Rentannya lansia tertular COVID-19 menyebabkan angka positif khususnya kematian karena COVID-19 pada lansia cukup tinggi. Persentase lansia yang tertular COVID-19 sekitar 12 persen (Gambar 8), lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk lansia secara total yakni sekitar 10 persen, padahal aktivitas lansia di luar rumah cukup terbatas dibandingkan kelompok umur lainnya. Tingkat keparahan akibat COVID-19 sangat tinggi pada lansia. Hal ini ditunjukkan dari angka kematian pada lansia mendominasi angka kematian karena terpapar COVID-19. Hampir 50 persen angka kematian akibat COVID-19 disumbang oleh lansia (Gambar 8).

Dari data di atas menunjukkan jika risiko kematian lansia akibat COVID-19 sangat tinggi, itulah mengapa pentingnya menjaga kesehatan sekaligus perlindungan



Gambar 8. Persentase Angka Positif, Dirawat, dan Meninggal karena COVID-19 menurut Kelompok Umur, sampai dengan 31 Januari 2022

terhadap lansia. Perlindungan yang dibutuhkan oleh lansia salah satunya adalah kebutuhan dasar, seperti perlindungan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting agar lansia mampu memenuhi kebutuhan ekonominya sekaligus menjaga kesehatannya. Selain itu, tidak mengunjungi lansia setelah bepergian dari wilayah lain sangat diperlukan dalam rangka menghindari terpaparnya lansia dari virus COVID-19. Bagi anggota keluarga yang sering berinteraksi di luar, sebaiknya membatasi bertemu muka dengan lansia. *Physical distancing* merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan perlindungan bagi lansia.

D. Lansia dalam Perlindungan Keluarga dan Negara

Menjadi tua merupakan tahapan kehidupan yang cukup berisiko. Lansia akan dihadapkan pada perubahan kondisi fisik, mental, spiritual, dan psikososial (Kholifah, 2016). Perubahan-perubahan tersebut memicu penurunan kemampuan fisik lansia sehingga menimbulkan adanya keterbatasan aktivitas fisik dan risiko disabilitas. Keterbatasan ini dapat menyebabkan lansia semakin rentan terhadap kemiskinan akibat menurunnya kemampuan memperoleh pendapatan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, akan berpotensi menimbulkan ketergantungan lansia terhadap pihak lain. Tidak sedikit lansia yang pada akhirnya bergantung pada anggota keluarga. Namun, pada umumnya lansia berkeinginan untuk mempertahankan kemandirian di antara keterbatasan-keterbatasan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan dari pihak lain bagi lansia. Perlindungan yang dibutuhkan oleh lansia tidak hanya berasal dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar lansia, namun juga dari negara. Perlindungan ini untuk menjamin lansia agar mampu menjalankan kehidupan di hari tua.

Keluarga sebagai pihak yang langsung terhubung dengan lansia, menjadi support system bagi para lansia. Dukungan keluarga ini merupakan hal yang sangat penting bagi lansia untuk menjalani masa tuanya dengan sukses. Sementara itu negara juga berkewajiban melindungi lansia, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar lansia seperti kesehatan, sosial dan ekonomi. Perlindungan yang diperoleh lansia dari berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup lansia.



Keluarga menjadi support system bagi para lansia. Di Indonesia, sekitar 10 persen lansia tinggal sendiri dan paling banyak adalah lansia perempuan.

1. Lansia dalam Perlindungan Keluarga

Pada hampir semua budaya, keluarga dikonstruksikan sebagai satu atau lebih kumpulan keluarga inti yang saling berhubungan darah, yang hidup bersama dalam satu rumah (Haviland 1985). Dalam kebudayaan masyarakat timur seperti Indonesia, posisi lansia memainkan peranan yang sangat terhormat. Generasi tua dianggap menjadi panutan dan sebagai tempat mencari pertimbangan ketika generasi yang lebih muda menghadapi masalah. Lansia dianggap memiliki kelebihan, keahlian, dan pengalaman yang lebih banyak sehingga dianggap mampu untuk memberikan jalan keluar dalam menghadapi urusan dan permasalahan dalam keluarga.

Peran lansia tidak hanya sebagai sosok yang dihormati saja, tidak sedikit lansia ikut berperan aktif dalam mengasuh cucu-cucunya di rumah. Ketika terjadi perubahan pola asuh anak pada generasi sekarang, peran kakek dan nenek menjadi sangat penting sebagai pengganti orang tua dalam mengasuh dan merawat anak-anak yang kedua orang tuanya bekerja. Menurut Kodaruddin dan Apsari (2019), motivasi lansia dalam merawat cucu-cucunya, diantaranya adanya kepedulian terhadap kesejahteraan anaknya, rasa tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendukung anaknya, keinginan untuk mengisi waktu luangnya, serta adanya ketidakpercayaan jika cucu diasuh pihak selain keluarga.

Di sisi lain, sebagian lansia juga masih harus menanggung beban sebagai pencari nafkah keluarga, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Basri (2012), faktor utama yang mendorong penduduk lansia tetap bekerja karena kondisi perekonomian keluarga.

Berbagai penghormatan dan peran lansia pada keluarga tersebut menempatkan lansia sebagai sosok kepala dalam keluarga. Lebih dari 60 persen lansia berstatus sebagai kepala keluarga (Tabel 6). Pada masyarakat yang menganut sistem patriarki, sosok laki-laki tetap menjadi pilihan utama sebagai pemimpin, karena pria dianggap lebih superior dibandingkan perempuan (Olson & Defrain, 2003). Perpaduan budaya penghormatan dan budaya patriarki ini menempatkan lansia

Tabel 6. Persentase Lansia menurut Kedudukan dalam Keluarga dan Jenis Kelamin, 2020

Jenis Kelamin	Kepala Keluarga	Anggota Keluarga
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	91,29	8,71
Perempuan	35,81	64,19
Total	62,28	37,72

Sumber: BPS (2020a)

laki-laki mayoritas menjadi kepala keluarga di Indonesia. Tahun 2020, lansia laki-laki yang menjadi kepala keluarga tercatat lebih dari 90 persen, sementara lansia perempuan hanya sekitar sepertiganya (Tabel 6).

Tabel 7. Persentase Lansia menurut Jenis Kelamin, 2020

Jenis Kelamin	Tinggal sendiri	Tinggal bersama keluarga
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	5,06	94,94
Perempuan	14,13	85,87
Total	9,80	90,20

Sumber: BPS (2020a)

lainnya. Di Indonesia, sekitar 90 persen lansia tinggal bersama keluarganya, baik dengan pasangannya atau dengan anggota keluarga lainnya, dan sisanya tinggal sendiri (Tabel 7). Menurut penelitian Indriani (2012), lansia yang tinggal bersama keluarganya memiliki tingkat kebahagiaan dan tingkat kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan lansia yang tinggal sendiri.



Gambar 9. Persentase Penduduk Lansia menurut Status Perkawinan, 2020

lansia terendah diantara kelompok umur lainnya (Gambar 10). Hal ini menunjukkan bahwa menjelang usia tua tingkat kebahagiaan semakin menurun.

Keluarga menjadi support system bagi para lansia. Dukungan dan perlindungan bagi lansia dari keluarga terdekat adalah perlindungan yang paling penting bagi lansia. Tinggal bersama dengan keluarga adalah tempat terbaik bagi lansia. Keluarga tetap merupakan tempat berlindung yang paling disukai lansia (Suprajitno, 2004). Jauh dari keluarga akan membuat lansia rentan untuk merasa kesepian karena ditinggal oleh pasangan hidup atau anggota keluarga

Lansia perempuan lebih banyak tinggal sendiri dibandingkan lansia laki-laki. Hal ini karena usia harapan hidup lansia perempuan lebih tinggi dari lansia laki-laki, sehingga banyak lansia perempuan yang ditinggal pasangannya karena meninggal dunia. Hal ini ditunjukkan dari status perkawinan lansia perempuan lebih banyak cerai mati. Lansia perempuan yang menjadi janda karena ditinggal meninggal oleh pasangannya ini bahkan mencapai lebih dari 50 persen (Gambar 9).

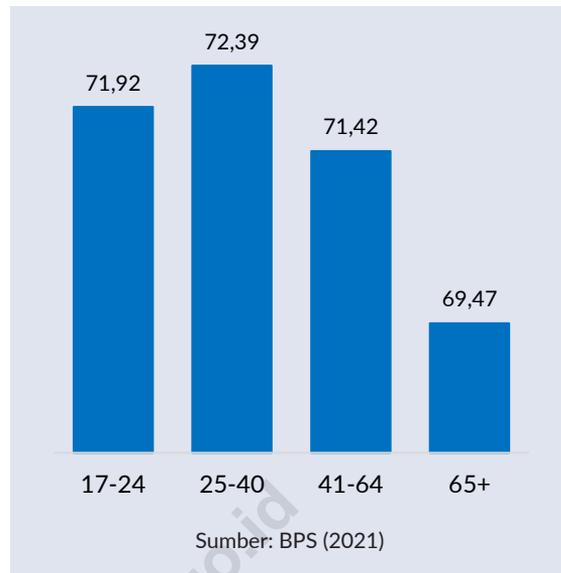
Lansia yang tinggal sendiri tentunya rentan mengalami depresi. Kehilangan pasangan akan memengaruhi tingkat kebahagiaan lansia sehingga menimbulkan gejala psikologis seperti kesepian, takut kehilangan, kurang percaya diri, kecemasan, terasingkan dari lingkungan, ketidakberdayaan, ketelantaran, dan lain-lain (Suardiman, 2011). Tingkat kebahagiaan yang berkurang pada lansia dapat tercermin dari data Indeks Kebahagiaan. Angka Indeks kebahagiaan

Dibanding lansia laki-laki, lansia perempuan umumnya hidup lebih lama dan lebih sedikit yang bekerja. Selain rentan terhadap hal-hal seperti yang dikemukakan oleh Suardiman (2011), lansia perempuan yang tinggal sendiri juga rentan terhadap kemiskinan karena tidak bekerja. Oleh sebab itu, peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat di sekitarnya sangat diperlukan untuk memberikan perhatian sekaligus bantuan, khususnya bagi lansia yang tinggal sendiri.

Sebagai orang yang diposisikan sebagai kepala keluarga, lansia dianggap sebagai pemimpin keluarga sekaligus juga dianggap masih bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan hidup keluarga. Hermalin (2002) mengemukakan bahwa banyak lansia memasuki pasar tenaga kerja karena konsekuensi dari penuaan penduduk, rendahnya dukungan keluarga, serta minimnya cakupan jaminan sosial untuk lansia. Namun demikian, lansia bekerja tidak selamanya berarti negatif. Sebagian lansia yang bekerja mempunyai beberapa alasan untuk tetap aktif bekerja, diantaranya karena merasa masih sehat, mengisi waktu luang, dan keinginan untuk hidup lebih mandiri.

Vodopivec & Arunatilake (2011) mengemukakan bahwa lansia yang bekerja dibedakan kedalam dua sektor, yaitu formal dan informal. Lansia yang bekerja pada sektor formal umumnya akan berhenti pada usia 60 tahun. Di sisi lain, lansia yang bekerja pada sektor informal umumnya bekerja dengan keterpaksaan karena adanya tekanan kemiskinan. Kesulitan lansia mendapat pekerjaan pada sektor formal, karena kondisi kesehatan yang melemah serta rendahnya pendidikan dan kemampuan lansia (Nilsson, 2015).

Di Indonesia, lebih dari 50 persen lansia masih bekerja. Dibandingkan lansia perempuan, lansia laki-laki lebih banyak yang masih bekerja. Lansia laki-laki yang masih bekerja sekitar dua pertiganya, sementara lansia perempuan yang masih bekerja kurang lebih sepertiganya (Tabel 8). Dalam hal ini, mencari nafkah

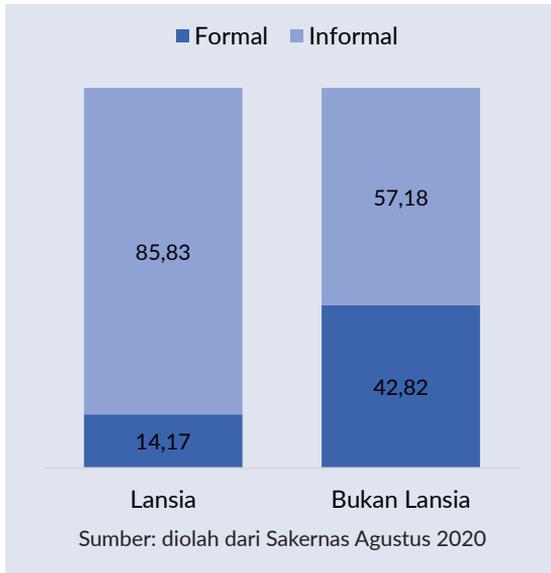


Gambar 10. Indeks Kebahagiaan Indonesia menurut Kelompok Umur, 2021

Tabel 8. Persentase Lansia menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2020

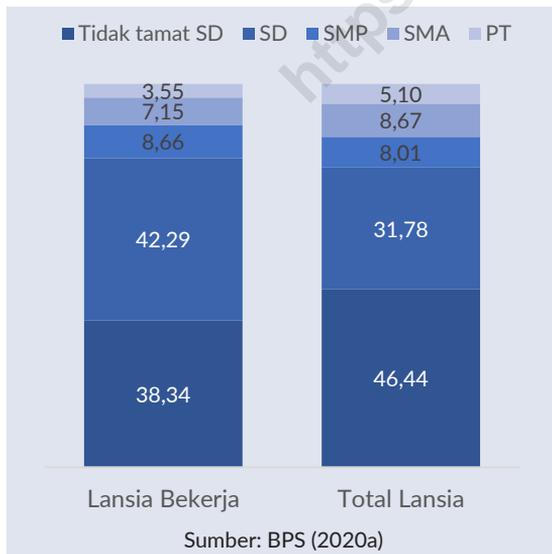
Jenis Kelamin	Formal	Informal	Tidak Bekerja/ Sekolah/ mengurus Rumah Tangga	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	11,08	53,97	34,95	100,00
Perempuan	3,73	34,54	61,72	100,00
Total	7,23	43,81	48,96	100,00

Sumber: diolah dari Sakernas Agustus 2020



Gambar 11. Persentase Penduduk Lansia dan Bukan Lansia menurut Jenis Pekerjaan, 2020

sama sekali (Gambar 12). Ini menunjukkan bahwa kualitas lansia saat ini sangat rendah. Sementara itu, pendidikan mayoritas lansia yang bekerja hanya sampai tamat SD, bahkan sekitar 40 persen lansia yang bekerja tidak tamat SD atau tidak



Gambar 12. Persentase Penduduk Lansia Bekerja dan Total Penduduk Lansia menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020

masih dibebankan kepada lansia laki-laki dibandingkan perempuan sehingga memengaruhi perbedaan angka tersebut. Lansia yang tidak bekerja, dapat dikategorikan sebagai penerima pensiun, penerima pendapatan, atau memang tidak bekerja sama sekali.

Lansia yang bekerja di Indonesia pada umumnya bekerja pada sektor informal baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, persentase lansia yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan bukan lansia yang bekerja di sektor informal (Gambar 11). Ini menunjukkan bahwa pilihan pekerjaan bagi lansia di sektor formal tidak cukup banyak karena kondisi fisik, kesehatan, dan kemampuan lansia.

Tingkat pendidikan yang rendah turut mendorong banyaknya lansia yang bekerja di sektor informal. Tahun 2020, hampir setengah jumlah lansia tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali (Gambar 12). Sangat berkorelasi jika sebagian besar lansia bekerja di sektor informal yang minim pendapatan. Mengutip pendapat Vodopivec & Arunatilake (2011), bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak disebabkan faktor kemiskinan, demikian pula yang terjadi pada lansia. Dengan kata lain, lansia yang bekerja di sektor informal dapat dikatakan sebagai tulang punggung keluarga.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, faktor ekonomi menjadi alasan lansia yang masih bekerja. Lansia terpaksa bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga karena ketidakberdayaan secara ekonomi. Hal ini sangat terkait dengan tingkat kemiskinan keluarga yang tercermin dari tingkat pendidikan kepala keluarga. Rumah tangga miskin banyak dijumpai pada kepala keluarga yang berpendidikan rendah (BPS, 2021).

Tabel 9. Persentase Lansia Bekerja menurut Pendidikan Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin, 2020

Jenis Kelamin	Tidak pernah sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	31,70	44,26	10,32	9,17	4,54	100,00
Perempuan	52,50	35,20	6,19	4,40	1,71	100,00
Total	36,16	42,32	9,44	8,15	3,93	100,00

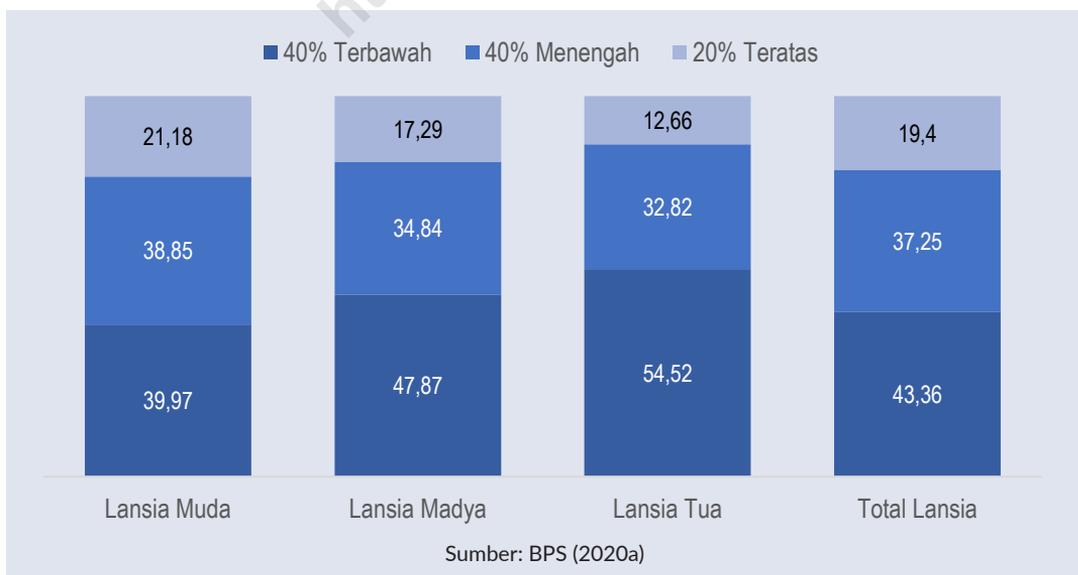
Sumber: BPS (2020a)

Hasil Sakernas Agustus 2020 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga yang terdapat lansia bekerja masih rendah. Pendidikan lansia bekerja yang menjadi kepala rumah tangga sampai tingkat SD lebih dari 75 persen (Tabel 9). Hal ini mengindikasikan adanya sinyal kemiskinan pada keluarga dengan lansia bekerja. Jika lansia merangkap sebagai kepala keluarga, maka lansia dapat dianggap sebagai tulang punggung keluarga.

2. Lansia dalam Perlindungan Negara

Perlindungan bagi lansia tidak hanya diharapkan dari pihak keluarga, namun juga masyarakat sekitar dan khususnya pemerintah. Perlindungan yang diharapkan meliputi jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi, jaminan pelayanan kesehatan, juga tersedianya fasilitas yang ramah lansia. Yang tidak kalah penting adalah perlindungan lansia dari unsur kekerasan mengingat lansia juga termasuk penduduk yang fisiknya dikategorikan lemah.

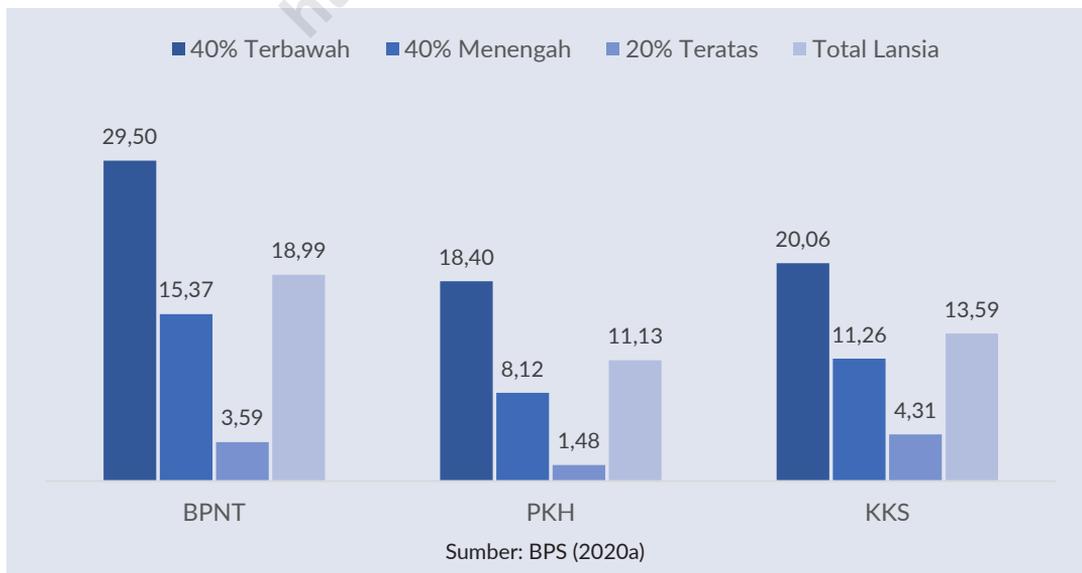
Peningkatan biaya kesehatan merupakan kondisi yang umum terjadi pada lansia. Keluarga yang menanggung segala kebutuhan lansia berpotensi mengalami

**Gambar 13. Persentase Lansia menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Lansia dan Klasifikasi Lansia, 2020**

peningkatan pengeluaran biaya kesehatan. Hal yang paling memprihatinkan adalah apabila lansia berada di keluarga yang kurang mampu. Risiko keluarga tersebut untuk jatuh pada kemiskinan akan menjadi lebih besar. Saat ini lebih dari 40 persen lansia tinggal pada keluarga yang tergolong pada kelompok berpengeluaran 40 persen terbawah. Semakin lanjut usia lansia, semakin tinggi persentase lansia yang tinggal bersama keluarga dengan 40 persen pengeluaran terendah (Gambar 13). Artinya, ada kecenderungan lansia yang berusia sangat lanjut lebih banyak tinggal pada keluarga berpendapatan rendah.

Dengan melihat kondisi tersebut, sangat diperlukan sistem perlindungan sosial agar lansia mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Perlindungan tersebut telah mendapat legalitas dari UU No 13 Tahun 1998 mengenai Kesejahteraan Lansia. Selain itu, UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial secara tegas menerangkan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, termasuk lansia. Berbagai program bantuan sosial bagi lansia telah diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebagai contoh Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial yang diantaranya terdapat kriteria bagi lansia. Selain itu, ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menggantikan program subsidi beras menjadi uang melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat dicairkan setiap bulannya. KKS dikeluarkan pemerintah sebagai penyaluran bansos dan subsidi. Di bidang kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan prioritas bagi lansia.

Bantuan-bantuan sosial yang diterima lansia pada tahun 2020 tersebar ke semua keluarga dengan berbagai pengeluaran, dan paling banyak pada keluarga lansia berpengeluaran 40% terendah (Gambar 14). Pada lansia yang berada pada keluarga dengan pengeluaran 40% terendah, sekitar 30 persen diantaranya menerima BPNT, sekitar 18 persen menerima PKH, dan sekitar 20 persen menerima KKS.



Gambar 14. Persentase Lansia yang Menerima BPNT, PKH, dan KKS menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Lansia, 2020

Jika melihat angkanya, nampaknya belum semua keluarga lansia yang tergolong berpendapatan rendah menerima manfaat dari bantuan-bantuan sosial tersebut.

Tidak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi juga ikut memberikan bantuan sosial bagi lansia sebagai pelengkap bantuan dari Pusat. Sebagai contoh, Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan Kartu Lansia, yaitu berupa uang tunai yang diberikan setiap bulan sebesar Rp600.000 bagi lansia yang kurang mampu. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 sebanyak 225.945 lansia kurang mampu di DKI Jakarta menerima kartu ini (Pemprov DKI Jakarta, 2021). Bantuan ini telah menjangkau lebih dari 20 persen lansia di wilayah administrasi DKI Jakarta.

Selain DKI Jakarta, Pemkot Yogyakarta juga memberikan bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM) kepada warga lansia yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) pada tahun 2021 sebesar Rp. 180.000/bulan. Bantuan ini disalurkan ke rekening lansia penerima, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para lansia miskin di Kota Yogyakarta.

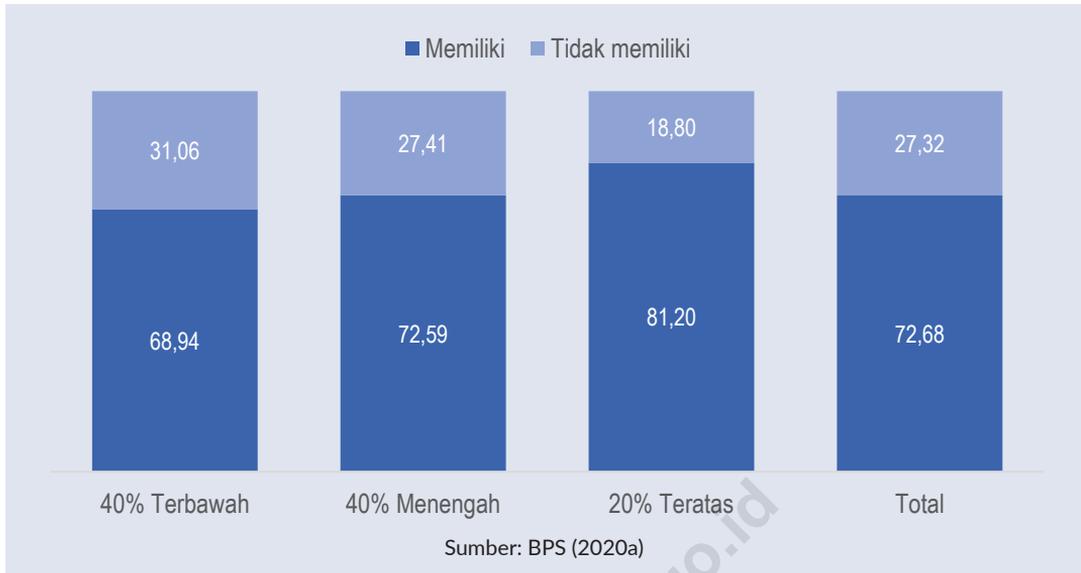
Di Kabupaten Aceh Jaya, Pemkab menyelenggarakan Program Asistensi Lanjut Usia Risiko Tinggi (ASLURETI), yaitu pemberian uang tunai sebesar Rp. 200.000/bulan kepada penduduk lansia penduduk lansia risiko tinggi (berumur 70 tahun ke atas). Program ini dianggap sukses untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya.

Selama pandemi, bantuan bagi lansia lebih diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bantuan sosial seperti sembako yang diprioritaskan bagi lansia lebih banyak berasal dari berbagai institusi. Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah merupakan institusi yang paling banyak berperan dalam bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Bagi penyandang disabilitas dan lansia, diberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas perekaman data kependudukan. Tujuannya agar lansia dan para penyandang disabilitas dapat mengakses data kependudukan, salah satunya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan adanya NIK, lansia dan penyandang disabilitas bisa terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bisa mendapat akses kepada layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), BST, PKH, BPNT, dan bahkan program dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan lansia SMART adalah adanya perlindungan kesehatan bagi lansia. Agar dapat menjaga lansia menua dengan sehat, perlu adanya kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan serta penyediaan fasilitas publik yang lebih ramah lansia. Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), terdapat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan bentuk pelayanan



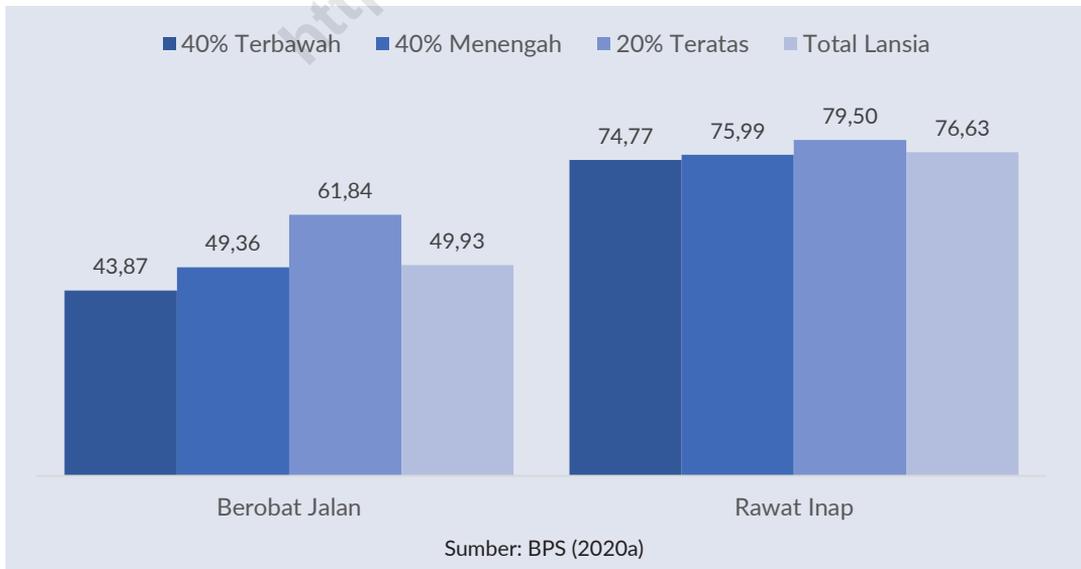
Belum semua keluarga lansia yang tergolong berpendapatan rendah menerima manfaat dari bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.



Gambar 15. Persentase Kepemilikan JKN oleh Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Lansia, 2020

komitmen pemerintah terhadap terselenggaranya jaminan kesehatan masyarakat, termasuk lansia.

Bentuk perlindungan terhadap kesehatan lansia adalah adanya kepemilikan jaminan kesehatan, salah satunya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SSJN merupakan bentuk pelayanan



Gambar 16. Persentase Lansia yang Pernah Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dan Rawat Inap menurut Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Lansia, 2020

jaminan kesehatan dari pemerintah yang terdiri dari BPJS PBI, BPJS Non PBI, dan Jamkesda. Namun demikian, program ini belum menjangkau semua lansia. JKN baru menjangkau hampir tiga perempat penduduk lansia (Gambar 15). Keterjangkauan lansia terhadap JKN semakin menurun seiring dengan menurunnya pendapatan. Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap JKN dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya pengetahuan penduduk miskin tentang prosedur, persyaratan, serta gambaran umum tentang program JKN, sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor geografis dan prosedur administratif yang rumit.

Lansia yang memiliki jaminan kesehatan, tidak selamanya menggunakan fasilitas kesehatan, baik untuk berobat jalan maupun untuk rawat inap. Semakin rendah pengeluaran rumah tangga lansia, semakin rendah penggunaan jaminan kesehatan (Gambar 16). Dengan kata lain, penduduk yang tergolong miskin (berpengeluaran 40% terbawah) lebih sedikit menggunakan Jaminan Kesehatan dibandingkan kelompok penduduk lainnya. Menurut Sparrow, dkk (2010) seseorang akan menghadapi masalah ketika menggunakan jaminan kesehatan yang disubsidi pemerintah. Permasalahan itu diantaranya adalah pelayanan yang kurang berkualitas dan adanya diskriminasi. Untuk lebih mengefektifkan program jaminan kesehatan yang tersubsidi, kualitas pelayanan program JKN harus lebih ditingkatkan.

Jenis jaminan kesehatan yang umum digunakan lansia baik untuk berobat jalan maupun rawat inap adalah jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Tabel 10). Sebagian besar lansia yang tergolong berpengeluaran rendah menggunakan BPJS jenis PBI yaitu BPJS yang diperuntukkan bagi fakir Miskin untuk berobat jalan. Hal yang sama juga berlaku untuk rawat inap. Namun masih ada sekitar 20 persen lansia golongan berpengeluaran rendah yang rawat inap dengan BPJS non PBI. Hal ini mengindikasikan tidak semua lansia berpendapatan rendah menggunakan BPJS PBI dalam melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan. Salah satu sebab peserta PBI tidak menggunakan fasilitas BPJS tersebut karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang jaminan kesehatan bersubsidi sehingga

Tabel 10. Persentase Lansia yang Pernah Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Berobat, 2020

Kelompok Pengeluaran	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berobat Jalan:				
BPJS PBI	79,91	57,31	25,98	56,64
BPJS Non PBI	15,36	38,25	68,60	38,56
Selain BPJS	5,01	5,12	5,88	5,29
Rawat Inap				
BPJS PBI	77,00	56,57	27,25	53,93
BPJS Non PBI	20,94	40,70	68,00	42,93
Selain BPJS	2,22	3,14	5,12	3,46

Sumber: BPS (2020a)

tidak mengetahui penggunaan kartu tersebut. Informasi yang lebih lengkap dan jelas kepada peserta PBI sangat diperlukan untuk menjamin pelayanan kesehatan, khususnya kepada lansia yang berada pada keluarga berpendapatan rendah.

Selain peningkatan pelayanan perlindungan sosial bagi lansia kurang mampu, yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah perluasan sistem perlindungan sosial. Saat ini sistem perlindungan sosial lebih banyak menjangkau penduduk yang lebih mampu pada sektor formal melalui asuransi atau dana pensiun. Sistem perlindungan sosial juga menyasar masyarakat lansia miskin, sementara kelompok menengah belum terjangkau oleh kebijakan. Kelompok menengah ini hidup dari pendapatan yang terbatas dan sangat rentan jika terjadi guncangan perekonomian, seperti gejolak harga, krisis ekonomi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sistem ini perlu diperluas, karena kelompok menengah ini juga memerlukan perlindungan sosial.

E. Menyongsong Era Pasca-Bonus Demografi

1. Penduduk Pralansia sebagai Penanda Penuaan Penduduk di Era Setelah Bonus Demografi

Saat ini, sebagian penduduk usia produktif telah menjadi lansia dan sebagian lagi akan menjadi lansia ketika mencapai usia 60 tahun. Semua penduduk usia pralansia (usia 45 - 59 tahun) akan memasuki usia lansia di saat bonus demografi usai. Penduduk pralansia jumlahnya mencapai seperempat dari penduduk usia produktif saat ini. Mereka akan memiliki kontribusi yang besar di era setelah bonus demografi.

Peningkatan jumlah lansia yang signifikan di Indonesia akan memberikan berbagai tantangan bagi negara, diantaranya adalah bertambahnya beban fiskal terutama untuk penyediaan santunan dan perlindungan sosial bagi lansia (Adioetomo dkk, 2017). Mewujudkan lansia yang SMART merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan beban tersebut. Agar penuaan penduduk Indonesia sukses dengan lansia SMART, kelompok penduduk ini perlu mendapat perhatian baik dari sisi kesehatan maupun produktivitasnya sehingga Indonesia dapat lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi ledakan jumlah penduduk lansia di masa mendatang.

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Penduduk Pralansia (Usia 45-59 Tahun) menurut Pulau, 2020

Pulau	Jumlah (juta orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Sumatera	9,38	16,02
Jawa	27,89	18,40
Bali - Nusra	2,43	16,26
Kalimantan	2,70	16,24
Sulawesi	3,22	16,16
Maluku dan Papua	1,27	14,80
Total	46,89	17,35

Sumber: hasil SP2020

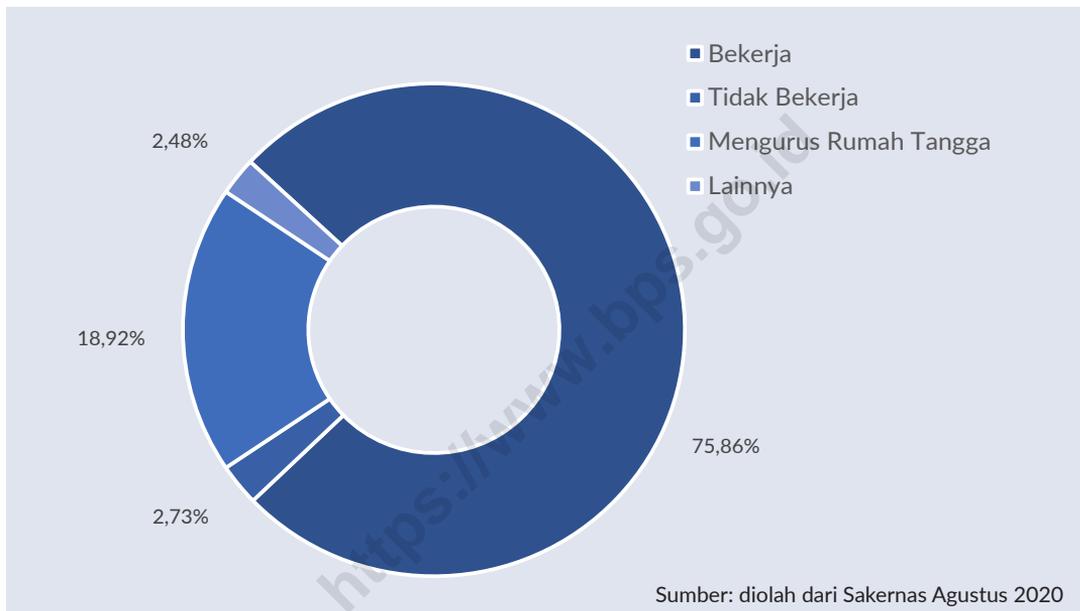
Pulau Jawa mempunyai persentase penduduk pralansia terbesar diantara pulau yang lain (Tabel 11). Dapat dipastikan bahwa ledakan penduduk lansia paling banyak akan terjadi di Pulau Jawa. Jika pada tahun 2020 hanya Pulau Jawa yang sudah memasuki era penduduk menua, pada era setelah bonus demografi semua pulau dianggap sudah memasuki penuaan penduduk. Hal ini terindikasi dari jumlah penduduk pralansia pada saat ini.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa rata-rata mempunyai persentase penduduk pralansia yang cukup tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama persentase jumlah lansia, diikuti

Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta. Sementara persentase pralansia provinsi lainnya masih di bawah 18 persen.

2. Profil Pralansia sebagai Gambaran Lansia di Masa Mendatang

Aktivitas penduduk dapat mengindikasikan akses terhadap sumber daya produktif. Penduduk yang bekerja akan memberikan keuntungan secara ekonomi baik bagi keluarga, lingkungan, maupun bagi negara. Sebagai kelompok usia produktif, mayoritas kegiatan pralansia adalah bekerja (Gambar 17). Hasil Sakernas Agustus 2020 mencatat sekitar tiga perempat penduduk pralansia mempunyai aktifitas bekerja, sisanya mengurus rumah tangga dan beraktivitas lainnya. Hanya sekitar



Gambar 17. Persentase Pralansia menurut Kegiatan Utama yang dilakukan, 2020

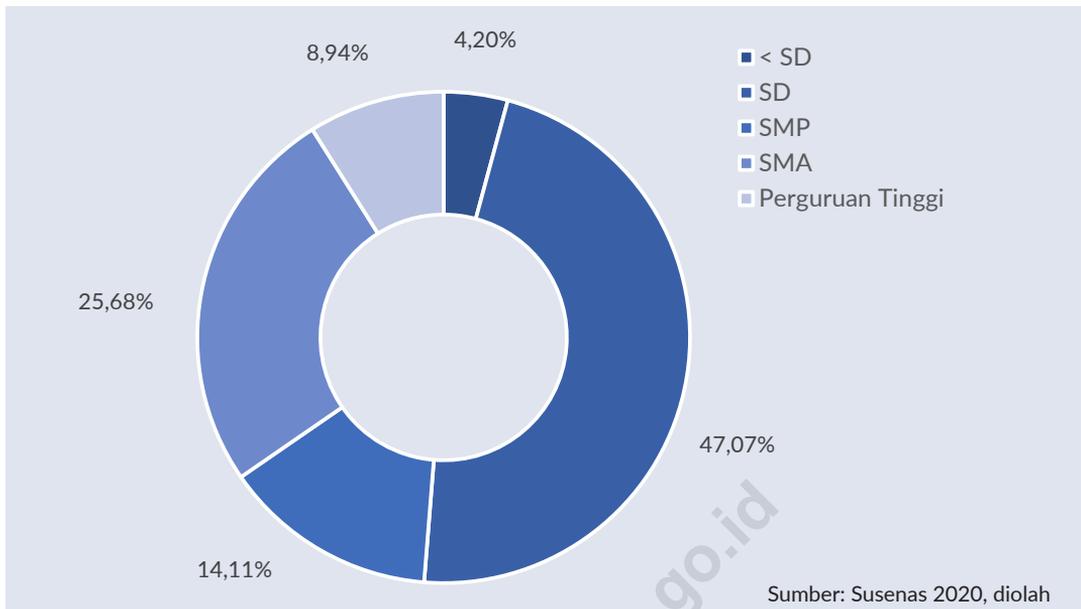
3 persen saja pralansia yang tidak bekerja. Dari sisi akses terhadap sumber daya produktif, informasi ini menunjukkan indikasi yang positif, namun harus diperkuat dari jenis pekerjaannya maupun dari sisi produktivitasnya.

Dari sisi jenis pekerjaan, sebagian besar pralansia bekerja pada sektor informal. Lebih dari sepertiga pralansia bekerja pada sektor informal di tahun 2020. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan persentase semua penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal (Tabel 12). Dengan kata lain, persentase pralansia yang bekerja di sektor informal lebih tinggi

Tabel 12. Persentase Penduduk Pralansia dan Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja menurut Sektor Formal dan Informal (persen), 2020

Kelompok Penduduk	Formal	Informal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pralansia (45 - 59 tahun)	32,50	67,50	100,00
Penduduk Usia 15 tahun ke atas	39,53	60,47	100,00

Sumber: Buletin Resmi Statistik dan Sakernas Agustus 2020 diolah



Gambar 18. Persentase Pralansia menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020

dibandingkan penduduk usia yang lebih muda. Gambaran umum sektor informal adalah aktivitas ekonomi skala kecil dan mempunyai produktivitas yang rendah. Selain itu, pekerja di sektor informal sangat minim akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan jaminan sosial di hari tuanya. Tingginya persentase pralansia yang bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa kondisi lansia di masa mendatang akan minim terhadap akses jaminan hari tua. Hal ini diperkirakan akan mendorong banyaknya lansia yang masih bekerja di sektor informal di masa mendatang karena minimnya akses tersebut.

Pekerja di sektor informal juga menghasilkan produktivitas yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan kualitas tenaga kerja. Kualitas tersebut salah satunya tercermin dari tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Bong (2009) menjelaskan jika tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi dan diiringi dengan kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, maka akan menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Gambaran pendidikan pralansia saat ini erat hubungannya dengan jenis pekerjaan. Dengan lebih dari setengah pralansia yang berpendidikan paling tinggi SD, tentunya akan menghasilkan pekerjaan dengan upah yang rendah.

Berbagai gambaran di atas mengindikasikan bahwa kondisi lansia Indonesia di masa setelah bonus demografi harus menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan. Dengan upah dan akses terhadap jaminan hari tua yang minim, maka lansia diperkirakan tidak mampu mandiri jika kondisi fisiknya tidak mampu lagi untuk bekerja. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi penduduk usia produktif, apalagi di masa mendatang beban usia produktif semakin membesar.

3. Belajar Menghadapi Penuaan Penduduk dari Jepang dan Singapura

Beberapa negara telah mengalami penuaan penduduk seperti Jepang dan Singapura. Jepang adalah negara di Asia yang menua dengan cepat. Jepang juga dianggap sebagai negara yang sukses dalam menangani penuaan penduduk. Saat ini, terdapat 28 persen populasi Jepang berusia di atas 65 tahun. Tingginya penduduk usia lansia ini tentunya akan berpotensi membebani sistem jaminan hari tua dan memperlambat perekonomian Jepang. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Jepang telah mengambil kebijakan dengan pendekatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan penduduk Jepang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jepang memiliki investasi yang cukup besar dan mendunia khususnya pada industri dengan teknologi tinggi. Dengan investasi yang besar ini mampu untuk menyokong sistem perlindungan dan perawatan bagi lansia. Tentunya investasi industri tersebut juga dimulai dari investasi di bidang pendidikan sehingga Jepang mampu mengembangkan penggunaan teknologi tinggi di segala bidang.

Pada tahun 2000, Jepang menerapkan Asuransi Perawatan Jangka Panjang yang komprehensif dan dikenal sebagai salah satu asuransi kesehatan paling lengkap di dunia. Selanjutnya, pemerintah Jepang terus meningkatkan perawatan bagi lansia dengan memperkenalkan lebih banyak model perawatan yang mengintegrasikan perawatan kesehatan, perawatan pencegahan, dan perawatan jangka panjang. Perawatan lanjut usia di Jepang juga memanfaatkan keunggulan teknologi. Perusahaan Jepang juga berinvestasi untuk menciptakan robot perawatan untuk lansia. Teknologi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan lansia di Jepang serta menurunkan biaya perawatannya.

Selain Jepang, Singapura merupakan negara yang juga menua dengan cepat. Salah satu upaya untuk menghadapi penuaan penduduk adalah investasi Pemerintah Singapura yang signifikan pada pembelajaran seumur hidup. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di semua golongan umur. Sejak tahun 2014, Pemerintah Singapura memberikan kredit awal sebesar 500 dollar Singapura 500 kepada setiap warga Singapura yang berusia 25 tahun ke atas untuk mengikuti kursus berbasis keterampilan yang diberi nama *SkillsFuture*.

Untuk menghadapi risiko hidup lebih lama dari sumber daya pensiun dan menghadapi adanya gangguan kesehatan lansia, Pemerintah Singapura menerbitkan skema *Central Provident Fund Lifelong Income for the Elderly* (CPF LIFE). Tujuannya untuk menyediakan perlindungan untuk kebutuhan pendapatan pensiun warga Singapura. Selain itu juga diterbitkan skema lain untuk memberikan biaya rawat inap seumur hidup bagi warga Singapura.

Singapura dan Jepang telah mengambil tindakan yang dimulai dari awal dan sifatnya jangka panjang dalam menghadapi penuaan penduduk. Hal yang sangat diperhatikan kedua negara tersebut adalah memastikan populasi lansia mereka



Indeks Penuaan Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah anak-anak dan peningkatan jumlah lansia.

memiliki perlindungan asuransi kesehatan yang memadai di masa depan. Hal ini berfungsi untuk melindungi negara dari beban perawatan kesehatan yang besar seiring dengan penuaan penduduknya. Kedua negara tersebut juga sudah memikirkan mengenai pekerjaan dan karakter ekonomi penduduknya, seiring dengan bertambahnya usia penduduk. Dengan demikian, kedua negara tersebut sudah cukup siap untuk menuai dividen penuaan penduduknya.

F. Kesimpulan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menua dengan cepat. Persentase jumlah lansia akan naik berlipat ganda dari sekitar 12 persen pada tahun 2015 menjadi sekitar 21 persen pada tahun 2050. negara-negara berkembang seperti Amerika Selatan, Afrika, dan Asia naik paling cepat, sementara negara-negara maju lebih dahulu mengalami "*ageing population*". Hongkong, Jepang, dan Swiss merupakan negara dengan tingkat penduduk lansia tertinggi di dunia. Peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian akibat membaiknya pelayanan kesehatan dan tumbuhnya perekonomian mendorong semua negara mengalami penuaan penduduk.

Saat ini Indonesia akan segera memasuki masa penuaan penduduk dengan persentase jumlah lansia yang mencapai hampir 10 persen di tahun 2020. Di tahun 2045, jumlah lansia diperkirakan akan menjadi seperlima penduduk Indonesia. Indikasi adanya penuaan penduduk di Indonesia ditunjukkan oleh Indeks Penuaan (*Ageing Index*) dan Rasio Dukungan (*Support Ratio*). Indeks Penuaan Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menunjukkan penurunan jumlah anak-anak dan peningkatan jumlah lansia. Sementara Rasio dukungan juga mengalami penurunan yang menunjukkan angka dukungan penduduk usia produktif menurun. Jika pada tahun 2010 ada 8 orang usia produktif yang bekerja untuk menyantuni lansia, maka pada tahun 2045 diperkirakan hanya ada 3 orang saja yang akan menyantuni lansia.

Diantara wilayah lainnya, saat ini Pulau Jawa telah memasuki penuaan penduduk. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara akan mengikuti Jawa dalam waktu dekat. Selain karena jumlah peningkatan pelayanan Kesehatan, penuaan penduduk di Jawa diakibatkan karena arus migrasi. Arus migrasi keluar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan yang masuk ke Pulau Jawa. Hal ini menimbulkan peningkatan persentase lansia yang tinggi di Pulau Jawa, karena pada umumnya kaum migran adalah penduduk usia produktif.

Penuaan penduduk tentunya memberikan beberapa tantangan dan peluang. Proses menua menimbulkan berbagai risiko yaitu risiko biologis, sosial, dan lingkungan. Ketiga risiko tersebut akan menimbulkan kerentanan pada lansia, yaitu tidak produktif secara ekonomi, penurunan kondisi kesehatan, dan kebutuhan akan pendamping. Namun demikian, diantara keterbatasan-keterbatasan tersebut, lansia menyimpan potensi yang besar diantaranya para lansia dianggap sebagai penasehat bagi masyarakat sekelilingnya. Bagi lansia yang berpendidikan dan masih mempunyai kemampuan secara fisik mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan sekaligus memberikan motivasi bagi generasi yang lebih muda. Selain itu lansia juga berperan mengasuh dan mendidik cucu-cucunya sekaligus meminimalkan angka ketelantaran anak dan balita. Dan yang terakhir, lansia sangat berperan sebagai pemelihara kelestarian adat dan budaya.

Dalam keluarga, lansia masih mendapat tempat terhormat khususnya bagi lansia laki-laki, karena sebagian besar menjadi kepala keluarga. Rata-rata lansia Indonesia tinggal dengan keluarganya, meskipun sudah ditinggal pasangannya. Hal ini menunjukkan jika lansia Indonesia masih dalam perlindungan keluarga. Di sisi lain, penempatan lansia sebagai kepala keluarga juga bermakna jika lansia masih menanggung perekonomian keluarga. Lima puluh persen lansia masih bekerja dan sebagian besar bekerja di sektor Informal. Dominasi lansia yang bekerja di sektor informal mengindikasikan lansia masih menjadi tulang punggung keluarga.

Data Susenas menunjukkan bahwa lansia yang berusia lebih lanjut lebih banyak tinggal bersama keluarga yang berpenghasilan rendah. Salah satu sebab lansia banyak berada pada keluarga berpenghasilan rendah adalah karena risiko kerentanan sosial maupun ekonomi akibat penurunan kondisi fisik dan mental pada lansia. Lansia juga memerlukan lebih banyak biaya untuk kesehatan sekaligus perawatan, khususnya bagi lansia yang tidak mampu beraktivitas lagi. Oleh sebab itu, lansia yang tinggal dengan keluarga tidak mampu memerlukan perlindungan sosial seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di bidang kesehatan terdapat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan prioritas bagi lansia. Pada tahun 2020, bantuan-bantuan tersebut telah tersebar ke semua keluarga lansia dan paling banyak pada keluarga lansia yang berpenghasilan rendah.

Lansia yang tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif menjadi harapan Indonesia di masa depan. Bonus demografi yang diperoleh Indonesia saat ini berpotensi meningkatkan persentase jumlah lansia di masa mendatang. Kondisi pralansia sebagai calon lansia di masa mendatang juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar nantinya Indonesia mampu mengalami penuaan penduduk yang sukses. Belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi penuaan penduduk adalah salah satu upaya untuk mencapai penuaan penduduk yang sukses di masa mendatang.

G. Referensi

- Adioetomo, SM dan Mujahid, G. (2014). *UNFPA Indonesia Monograph Series No.1: Indonesia on the Threshold of Population Ageing*. Jakarta: UNFPA.
- Adioetomo, S. M., Cich, L. H., Asmanedi, & Toersilaningsih, S. (2018). *Menjadi Lansia: Antara Anugerah dan Tantangan*. Dalam buku *Memetik Bonus Demografi, Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bloom, D. E., Jimenez, E., & and Rosenberg, L. (2011). *Social Protection of Older People. Program on the Global Demography of Ageing*.
- BPS. (2012). *Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020a). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020b). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2021). *Statistics Indonesia*. Jakarta: BPS, dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/34/610/1/indeks-kebahagiaan-menurut-kelompok-umur.html>.
- BPS. (2022a). *Statistics Indonesia*. Jakarta: BPS, dikutip dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab5>.

- BPS. (2022b). *Statistics Indonesia*. Jakarta: BPS, <https://www.bps.go.id/indicator/12/156/1/migrasi-seumur-hidup.html>.
- BPS, Bappenas, UNFPA. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Hasil SUPAS2015*. Jakarta: BPS.
- Chatterji, S., Kowal, P., Mathers, C., Naidoo, N., Verdes, E., Smith, J. P., & and Suzman, R. (2008). The Health of Ageing Populations in China and India. *Health Affairs 2008*, 27(4), 1052-1063.
- Gbolue, U. D. (2020). An Assessment of the Novel COVISTRESS Questionnaire: COVID-19 Impact on Physical Activity, Sedentary Action and Psychological Emotion. *Journal of Clinical Medicine*, 9(10), 3352.
- Fitri, Hanna dan Basri. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lanjut Usia Bekerja di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Gilbert dan Gugler (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga'* Terjemahan: Anshori dan Juanda. Yogyakarta: PT. Tiara Wacan.
- Harmadi, S. H. (2017). *Analisis Data Demografi*. Jakarta: Universitas terbuka.
- Haviland, A William. (1985). *Antropologi Edisi Keempat Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Hermalin, A. I. (2002). *The Well-Being of the Elderly in Asia: a Four-Country Comparative Study*. US: University of Michigan Press.
- Hilbrand, S. C. (2017). Caregiving within and Beyond the Family is Associated with Lower Mortality for the Caregiver: A Prospective Study. *Journal Evolution and Human Behavior*, 38.
- Indriani, N. (2012). *Perbedaan Kepuasan Hidup Lansia Dini yang Tinggal Bersama Anak, Mandiri, dan di Panti Werdha*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Kemendes. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Analisis Kebijakan Mewujudkan Lanjut Usia Sehat Menuju Lanjut Usia Aktif (Active Ageing)*. Jakarta: Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Kholifah, S. (2016). *Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Kemenkes.
- Kidd, S., Gelders, B., Rahayu, S. K., Larasati, D., Huda, K., & dan Siyaranamual, M. (2019). *Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia*. TNP2K dan Australian Government.
- Kodaruddin, W. N. (2019). Motivasi Lanjut Usia Merawat Cucu. *Sosio Informa*. 5(3).
- Kominfo. (2014). *Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Nilsson, A. (2015). Who Suffers from Unemployment? The Role of Health and Skills. *IZA Journal of Labor Policy*, 4(19), 24.
- Nugroho, Wahyudi. (2000). *Keperawatan Gerontik. Edisi 2*. Jakarta: Balai Penerbit EGC.

- Olson, D. a. (2003). *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Rahmawati, F. d. (2016). Makna Sukses di Masa Lanjut. *Psymphathic. Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 51.
- Rowe J. W. & Kahn R. L (1998). *Successful Ageing*. New York.: Pantheon.
- Satgas COVID-19. (2022). Retrieved from <https://data.covid19.go.id/public/index.html>
- Setianingrum, M., & Kusumiati, d. E. (2017). *Quality of Life Janda Lanjut Usia yang Tinggal Sendiri di Pedesaan*. Prosiding Temu Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan "Suatu Tinjauan Berwawasan Gender"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sparrow, R., Suryahadi, A., & Widyanti., W. (2013). Social Health Insurance for the Poor: Targeting and Impact of Indonesia's Askeskin Programme. *Soc Sci Med*, 96, 264.
- Stanhope dan Lancaster (2016). *Public Health Nursing Population Centered Health Care in the Community (8th ed.)*. Missouri: Elsevier.
- Suardiman., S. P. (2011). *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suharti, Partini, S., & Suwarjo, d. (2015). Peran Lansia dalam Pelestarian Budaya. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 20.
- Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.
- Swasono. (1995). *Peranan dan Kontribusi Usia Lanjut*.
- Swasono, M. (1989). *Proses Menua di Barat dan Timur: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Psikiatri dan Kesehatan Jiwa.
- Tomaka, J., Thompson, S., & and Rebecca, P. (2006). The Relation of Social Isolation, Loneliness, and Social Support to Disease Outcomes Among the Elderly. *Journal of Ageing and Health*, 18(3), 359-384.
- UNFPA. (2012). *Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge*. London: UNFPA.
- UNFPA. (2014). *Indonesia on the Threshold of Population Ageing*. UNFPA Indonesia Monograph Series No 1, Juli 2014. UNFPA.
- United Nations. (2020). Retrieved from <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/> [Accessed 19 Agustus 2021].
- Vodopivec, M. & Arunatilake (2011). Population Ageing and Labour Market Participation of Old Workers in Sri Lanka. *Journal of Population Ageing*, 4(3), 141-163.
- WHO. (2002). *Active Ageing: A Policy Framework, "A Contribution of the World Health Organization to the Second United Nation World Assembly on Ageing"*. Spain: WHO.
- WHO. (2011). *Global Health and Ageing*. National Institute on Ageing and National Institutes of Health, WHO.

WHO. (2015). *World Report on Ageing and Health 2015*. Geneva Switzerland: WHO.

World Bank. (2022). Retrieved from Dikutip dari <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>

World Bank. (2016). *Live Long and Prosper: Ageing in East Asia and Pacific*. Washington DC: World Bank.

<https://www.bps.go.id>



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

